BADAN POM



LAPORAN
KINERJA TAHUNAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

2025





www.bandung.pom.go.id

KATA PENGANTAR

Kepala Balai Besar POM di Bandung

"Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung selaku Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI senantiasa selalu berkomitmen menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat"

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja TA 2025 Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan. Tahun 2025, merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029. Pada tahun 2025, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka "menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat".

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan TA 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) TA 2025 Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842), serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
www.bandung.pom.go.id

LAPKIN TA 2025 Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 disusun pada akhir TA 2025 pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua tujuan utama yaitu (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja TA 2025 Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Balai Besar POM di Bandung di Tahun berikutnya.

Bandung, 26 Februari 2026
Kepala Balai Besar POM di Bandung,

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

www.bandung.pom.go.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan /Ikhtisar Eksekutif

Tim Penyusun Laporan Kinerja

Highlight Kinerja

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2025-2029

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025

2.5 Metode Pengukuran

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Sasaran Kegiatan Ke-1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

3.1.2 Sasaran KegiatanKe-2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

3.1.3 Sasaran KegiatanKe-3: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

www.bandung.pom.go.id

3.1.4 Sasaran KegiatanKe-4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

3.1.5 Sasaran KegiatanKe-5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

3.1.6 Sasaran KegiatanKe-6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

3.1.7 Sasaran KegiatanKe-7: Layanan Publik UPT yang Prima

3.1.8 Sasaran KegiatanKe-8: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV
Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

www.bandung.pom.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja TA 2025 Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama TA 2025. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja TA 2025 Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama TA 2025 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Bandung dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BBPOM di Bandung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Bandung berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
www.bandung.pom.go.id

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.



Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2025. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2025. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu "Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
www.bandung.pom.go.id

di wilayah Jawa Barat" diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori Tidak dapat disimpulkan sebanyak 7 (tujuh) indikator, yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 111.00%, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 112.89%, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 117,26%, Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 115.91%, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 115.06%, Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 115.19%, dan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 115.75%. 5 (lima) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM sebesar 106.85%, Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 107.82%, Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103.30%, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT sebesar 100.26%, dan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 106.73%. 3 (tiga) indikator dengan kategori Baik yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 99.72%, Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100,00%, dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sebesar 100%..

Sasaran kegiatan kedua yaitu "Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi" diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100.25%.

Sasaran kegiatan ketiga yaitu "Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat" diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung sebesar 103.39%. Serta 3 (tiga) indikator dengan kategori Baik yaitu Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100.00%, Jumlah desa pangan aman sebesar 100.00%, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00%.

Sasaran kegiatan keempat yaitu "Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu" diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
www.bandung.pom.go.id

Sangat Baik, yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 104.01%.

Sasaran kegiatan kelima yaitu "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sebesar 116.42%.

Sasaran kegiatan keenam yaitu "Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif" diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung sebesar 100,74%.

Sasaran kegiatan ketujuh yaitu "Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima" diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT sebesar 104.68%.

Sasaran kegiatan kedelapan yaitu "Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal" diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung sebesar 100.46%. 3 (tiga) indikator dengan kategori Baik yaitu Nilai AKIP Balai Besar di Bandung sebesar 97.89%, Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung sebesar 100%, dan Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung sebesar 99.59%.

Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp66.390.943.000,- dengan pagu dikurangi Blokir sebesar Rp36.886.313.000,-. Pada TA 2025 terdapat pengurangan Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp172.683.000,- dan penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp491.675.000,- sehingga Pagu Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung TA 2025 menjadi Rp66.709.935.000,- dengan pagu dikurangi Blokir sebesar Rp37.650.601.000,-. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 dengan presentase 99.62% yaitu sebesar Rp37.506.843.954,-. Dari Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan diperoleh tingkat efisiensi tertinggi, yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Sedangkan tingkat efisiensi terendah adalah pada Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
www.bandung.pom.go.id

Kegiatan BBPOM di Bandung yang dilakukan selama Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan Tidak Efisien karena adanya Efisiensi Anggaran. Meskipun demikian pada Tahun berikutnya akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman Renstra Balai Besar POM tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

www.bandung.pom.go.id

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERA TA 2025

Penanggung Jawab	:	Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.
Pengarah	:	Dwi Kurniasari, S.Si., Apt. Endang Yaya Suwarya A, S.Si., Apt. Leni Maryati, S.Si., Apt., M.Si. Ayi Mahpud Sidik, S.Si, Apt., M.H. Dwie Astrini, S.Si , Apt., M.SI
Ketua	:	Jajat Setia Permana, S.Si., Apt., M.Si.
Wakil Ketua	:	Rio Sudarman, S.E.
Sekretaris	:	Yadi Cahyadi, S.Kom.
Anggota	:	R. Oppy Sophiawaty, S.Si, Apt. Fitria Augustin T, S.Si., Apt. Fitria Puspawati, S.Si, Apt, M.S.Farm. Mila Nur Mauludiawati, S.Si, Apt. Alia Kadarsih Abubakar, S.Si, Apt. Siti Aminah, S.Si., Apt., M.Si. Insan Nurul Padjar, S.Si, Apt., M.S.Farm. Fany Nurmalasari, S.Si, Apt. Nina Listiani, S.Psi. Aini Ratnawati, S.Si, Apt., M.K.M. Vinnie, S.Si, Apt. Ernitasari Sipayung, S.Si, Apt. Imas Ridawati, S.Si., M.Si. Puji Astuti, S.Si., Apt. Yenny Nina F. K, S.Si, Apt. M.Si. Afinna Nurfitri Annandari, S.Farm, Apt, M.S.Farm. Oktanella Rembulan Sari, S.Si, Apt. Dwi Hotnauli Tambun, S.Farm, Apt. Rina Fatmawati Suhendar, S.T., M.Si. Marina Susanti, S.Farm, Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
www.bandung.pom.go.id

Nurlaila, S.Si, Apt.

Inayah, S.Si, Apt, M.Si.

Mahda Sri Yunari, S.Si, Apt.

Fanne Afriane, S.Si.

Tarita Kamardi, ST, M.Si.

Neni Marliani, S.Si, Apt.

Tegar Setya Dharma, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

www.bandung.pom.go.id

HIGHLIGHT KINERJA

1. Balai Besar POM di Bandung telah mendapatkan Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tanggal 20 Desember 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



www.bandung.pom.go.id

2. Sebagai Upaya pemberantasan Korupsi, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sesuai dengan Surat Rekomendasi Sucofindo Iternational Certification Service Nomor. 5932/SERCO-XI/VP/2024 tanggal 20 November 2024. Selain itu Balai Besar POM di Bandung juga secara aktif memberikan

informasi Anti Korupsi melalui Media Sosial dan Subsite Balai Besar POM di Bandung.



IDSurvey

SUCOFINDO

SURAT REKOMENDASI
Nomor: 5932/SERCO-XI/VP/2024

SUCOFINDO SICS ISO 37001

Menyatakan bahwa
Declare that

Balai Besar POM di Bandung
Jl. Pasteur No. 25, Bandung, Jawa Barat 40171, Indonesia

telah memelihara sistem manajemen mutu yang memenuhi
has maintained quality management system that comply with

SNI ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :
Pengawasan Obat dan Makanan pada Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandung
Drug and Food Control of Provincial Office in Bandung

KAN Komite Akreditasi Nasional

Surat ini diberikan berdasarkan hasil kegiatan Audit Surveilan bahwa organisasi dinyatakan dapat melanjutkan penggunaan sertifikat No. **SAB 00144**. Surat ini bukan sebagai pengganti sertifikat dan berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh **SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES**. Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*This letter is given based on the results of the Surveillance Audit activities that the organization is declared to be able to continue the use of certificate No. **SAB 00144**. This letter is not a substitute for a certificate and is valid provided that the organization always meets the criteria as laid down by **SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES**. Thus this letter of recomendation is issued to be used properly.*

Jakarta, 20 November 2024

Dian Indrawaty
Kepala SBU Sertifikasi & Ecoframework
PT SUCOFINDO


bpom.bandung
#SahabatBPOM, gratifikasi ilegal yang ditawarkan kepada kita tidak hanya yang nilaiya besar, nilai yang kecil juga bisa loh! Tapi ingat, dengan integritas, kita harus melawannya tanpa gentar.
Jangan lupa laporkan gratifikasi ilegal melalui www.sangintegritas.com ya!
TOLAK!
NO CORRUPTION


bpom.bandung
Layanan Publik
Balai Besar POM di Bandung
Bebas dari Kecurangan
TOLAK!
GRATIFIKASI, KORUPSI & SUAP
Saluran Layanan Publik
Balai Besar POM di Bandung
bandung.pom.go.id
bpom_bandung@pom.go.id
08119900533
0224266620
bpom.bandung
bpombandung
BPOMBandung
Balai Besar POM di Bandung


bpom.bandung
LAYANAN BBPOM DI BANDUNG
BEBAS DARI PERCALOAN,
PERANTARA,
BIRO APAPUN!!
BILA MELIHAT PRAKTIK PERCALOAN SILAHKAN LAPORKAN KE:
sangintegritas.pom.go.id


bpom.bandung
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2024
BENTURAN KEPENTINGAN
PEMERASAN
KOLUSI & NEPOTISME
PERBUATAN CURANG
PEMBERIAN SUAP
GRATIFIKASI
LAPORKAN
JIKA ANDA MENEMUKAN AKTIVITAS KORUPSI
https://sangintegritas.pom.go.id/
BBPOM DI BANDUNG MENOLAK SEGALA UPAYA KORUPSI DALAM BENTUK APAPUN
TEGUHKAN KOMITMEN BERANTAS KORUPSI UNTUK INDONESIA MAJU!
TERIMA KASIH SUDAH MENDUKUNG BBPOM DI BANDUNG MEMENUHI KOMITMEN UNTUK MEMBERANTAS PRAKTIK KORUPSI

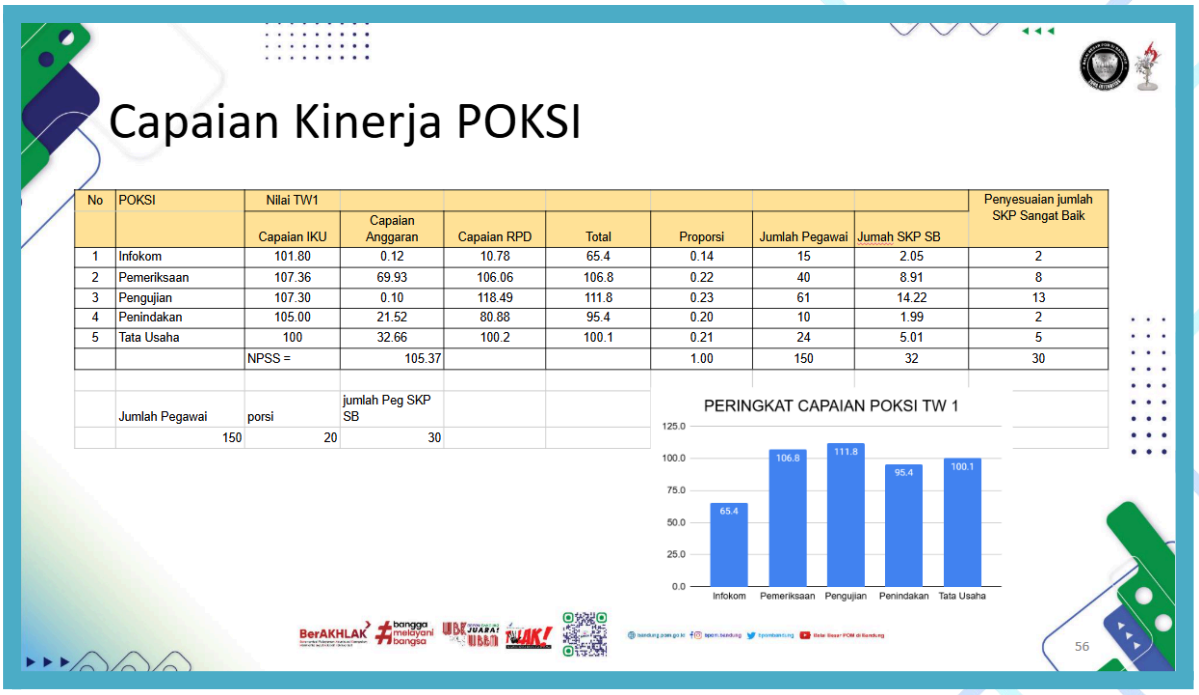


3. Balai Besar POM di Bandung telah membuat Inovasi dalam Pengelolaan Kinerja melalui Google Site Manajemen Kinerja BBPOM di Bandung sebagai aplikasi untuk pengelolaan kinerja BBPOM di Bandung mulai dari perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, sampai dengan pengelolaan Anggaran.



www.bandung.pom.go.id

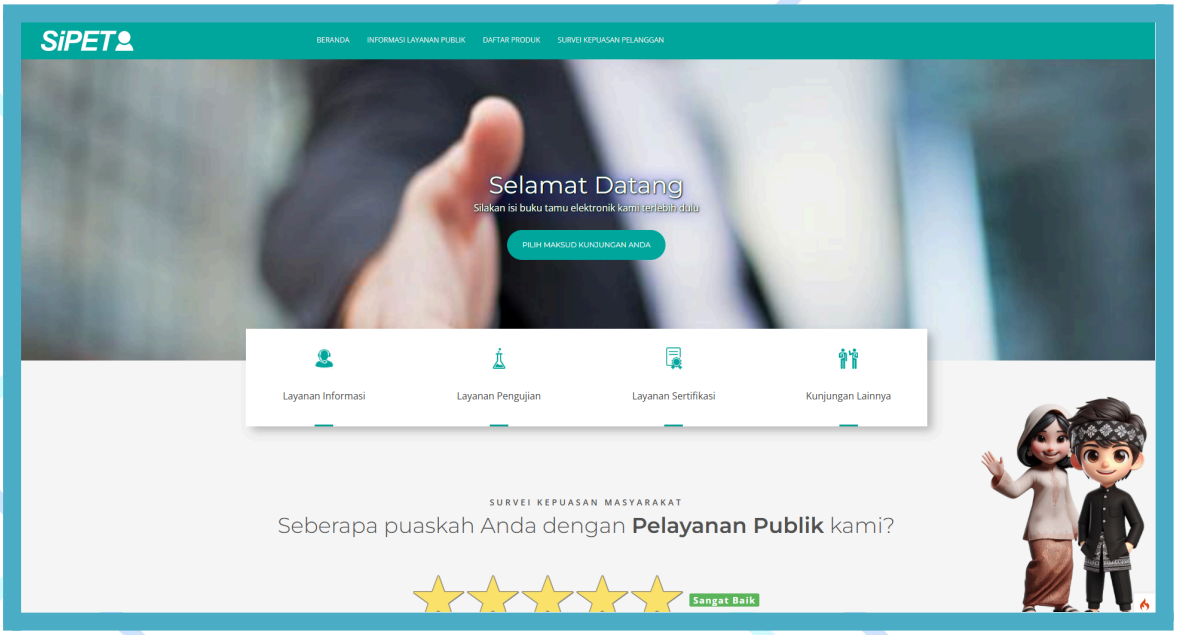
4. Balai Besar POM di Bandung telah membuat inovasi penerapan Reward and Punishment pengukuran kinerja Pegawai untuk menentukan proporsi predikat kinerja Pegawai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab setiap pegawai.



No	POKSI	Nilai TW1							Penyesuaian jumlah SKP Sangat Baik
		Capaian IKU	Capaian Anggaran	Capaian RPD	Total	Proporsi	Jumlah Pegawai	Jumah SKP SB	
1	Infokom	101.80	0.12	10.78	65.4	0.14	15	2.05	2
2	Pemeriksaan	107.36	69.93	106.06	106.8	0.22	40	8.91	8
3	Pengujian	107.30	0.10	118.49	111.8	0.23	61	14.22	13
4	Penindakan	105.00	21.52	80.88	95.4	0.20	10	1.99	2
5	Tata Usaha	100	32.66	100.2	100.1	0.21	24	5.01	5
		NPSS =	105.37			1.00	150	32	30

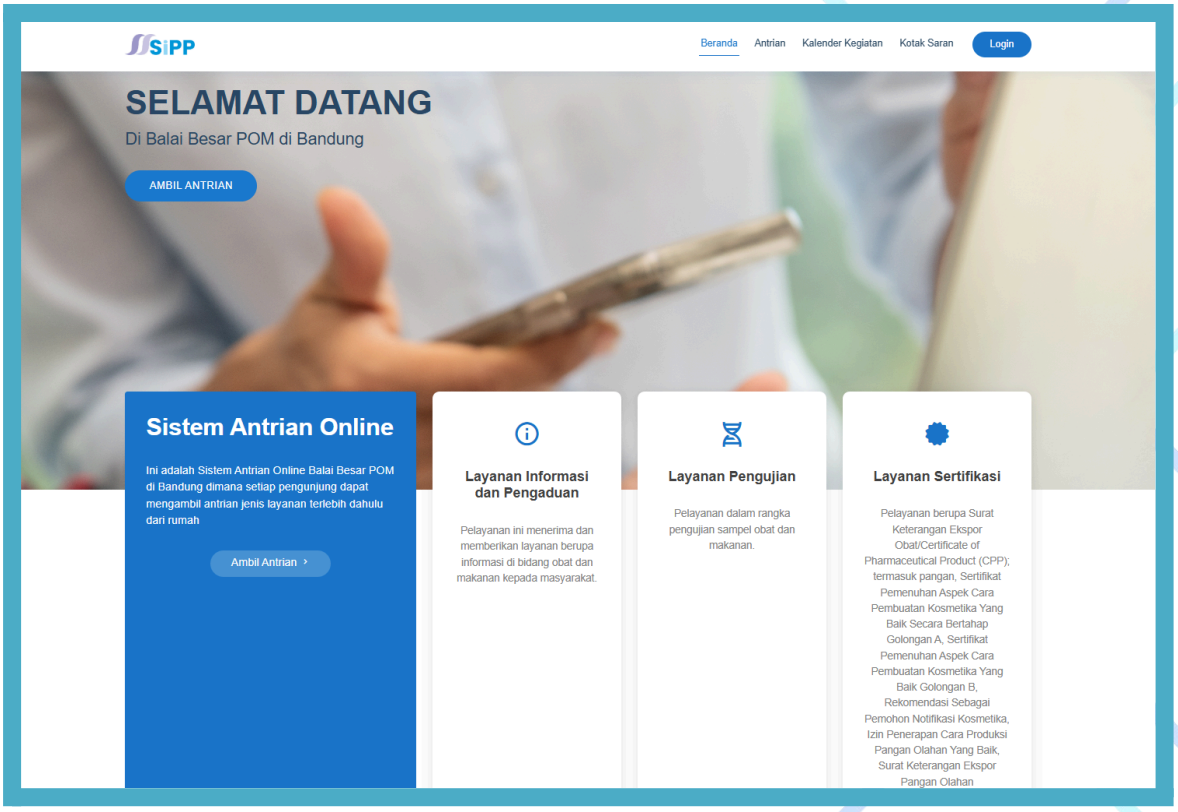
Jumlah Pegawai	porsi	jumlah Peg SKP SB
150	20	30

5. Sebagai Upaya meningkatkan Pelayanan Publik BBPOM di Bandung membuat aplikasi pencatatan buku tamu berbasis elektronik berupa SIPETA untuk Layanan di ULPK BBPOM di Bandung.

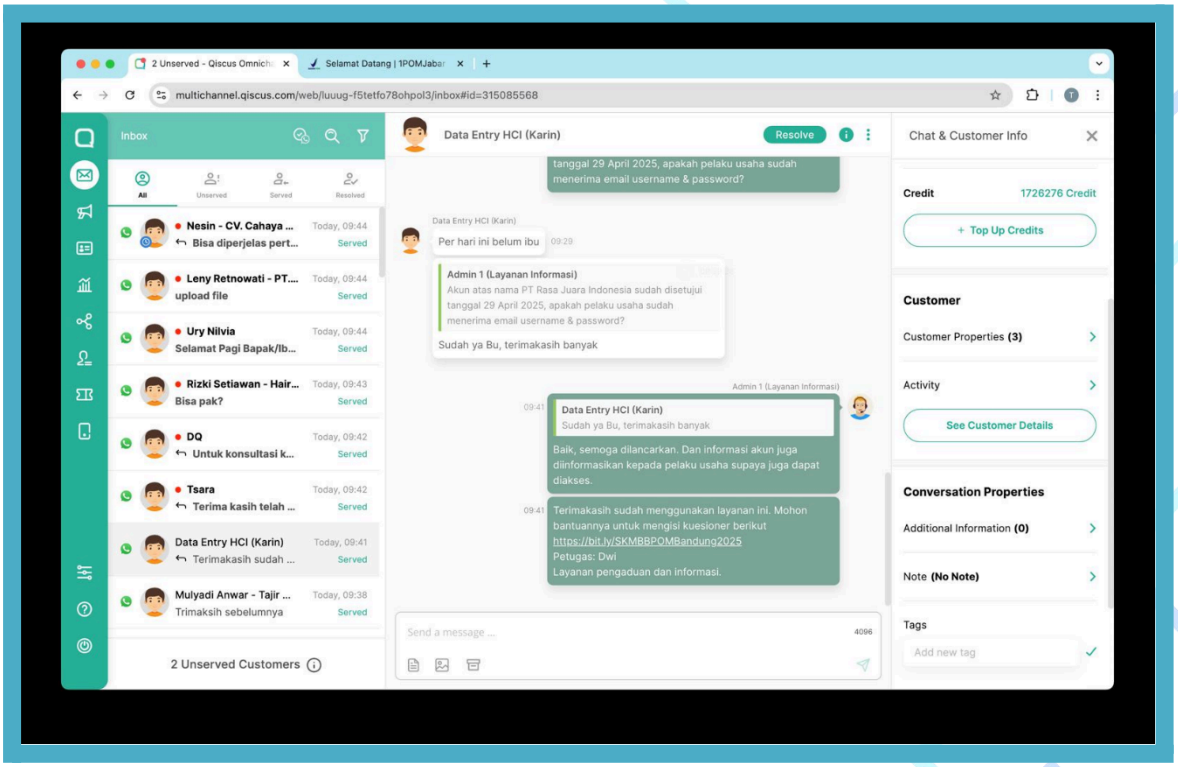


www.bandung.pom.go.id

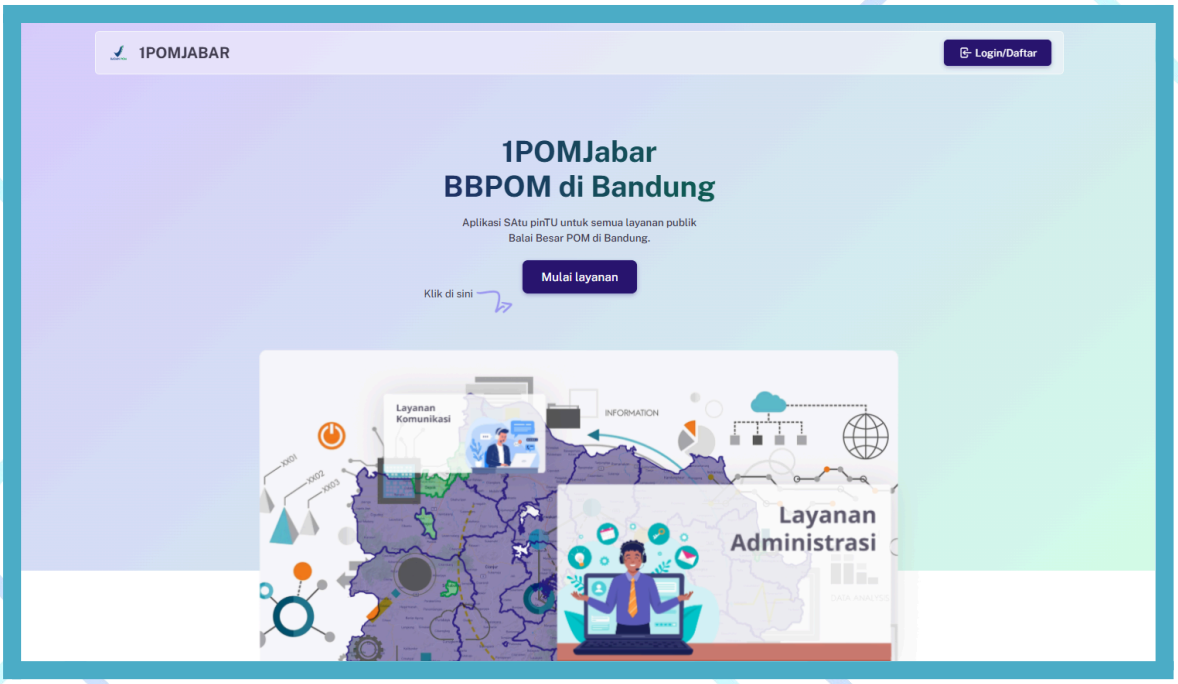
6. Sebagai Upaya meningkatkan pelayanan publik BBPOM di Bandung hadir pada setiap Mall Pelayanan Publik (MPP) pada beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat dan menerapkan sistem Antrian Online untuk pendataan Pelanggan di MPP.



7. Layanan Online BBPOM di Bandung melalui aplikasi Whatsapp satu nomor 08119900533 untuk memudahkan pelanggan mendapatkan informasi di BBPOM di Bandung.



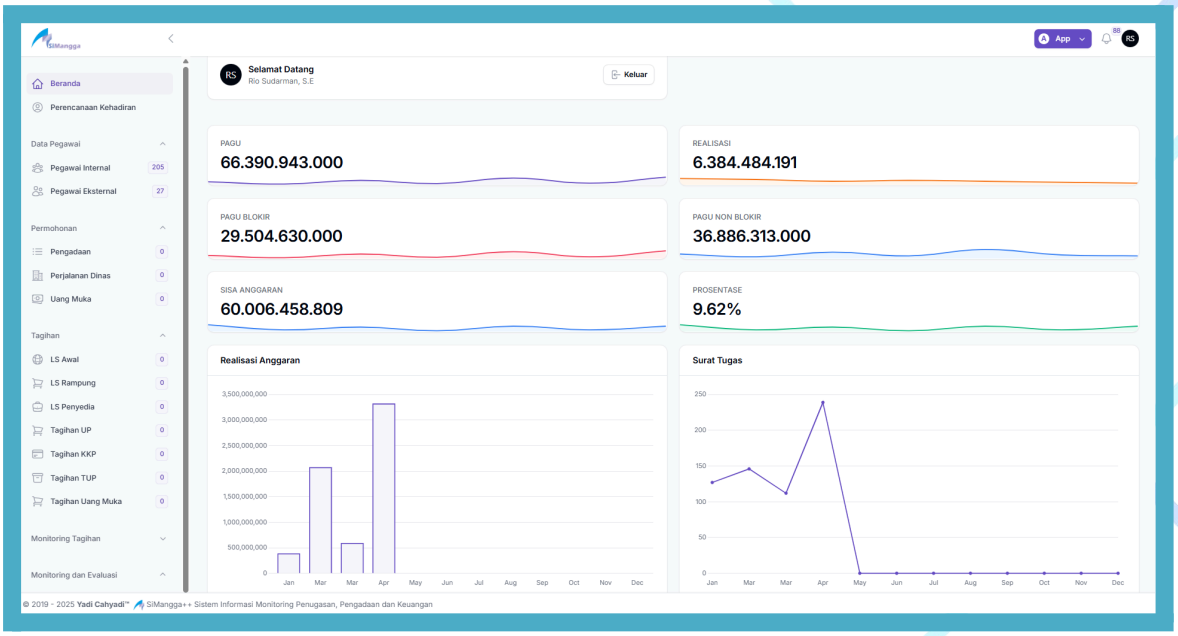
8. Balai Besar POM di Bandung telah membuat aplikasi Satu POM Jabar yang menjadi Layanan satu pintu BBPOM di Bandung untuk menjangkau seluruh pelanggan dan sarana dalam pengawasan obat dan makanan.



9. Dalam pengelolaan Keuangan yang akuntabel, Balai Besar POM di Bandung telah membuat aplikasi Simangga (Sistem Informasi Monitoring Penugasan, Pengadaan dan Keuangan) untuk mempermudah proses pengadaan dan Keuangan di BBPOM di

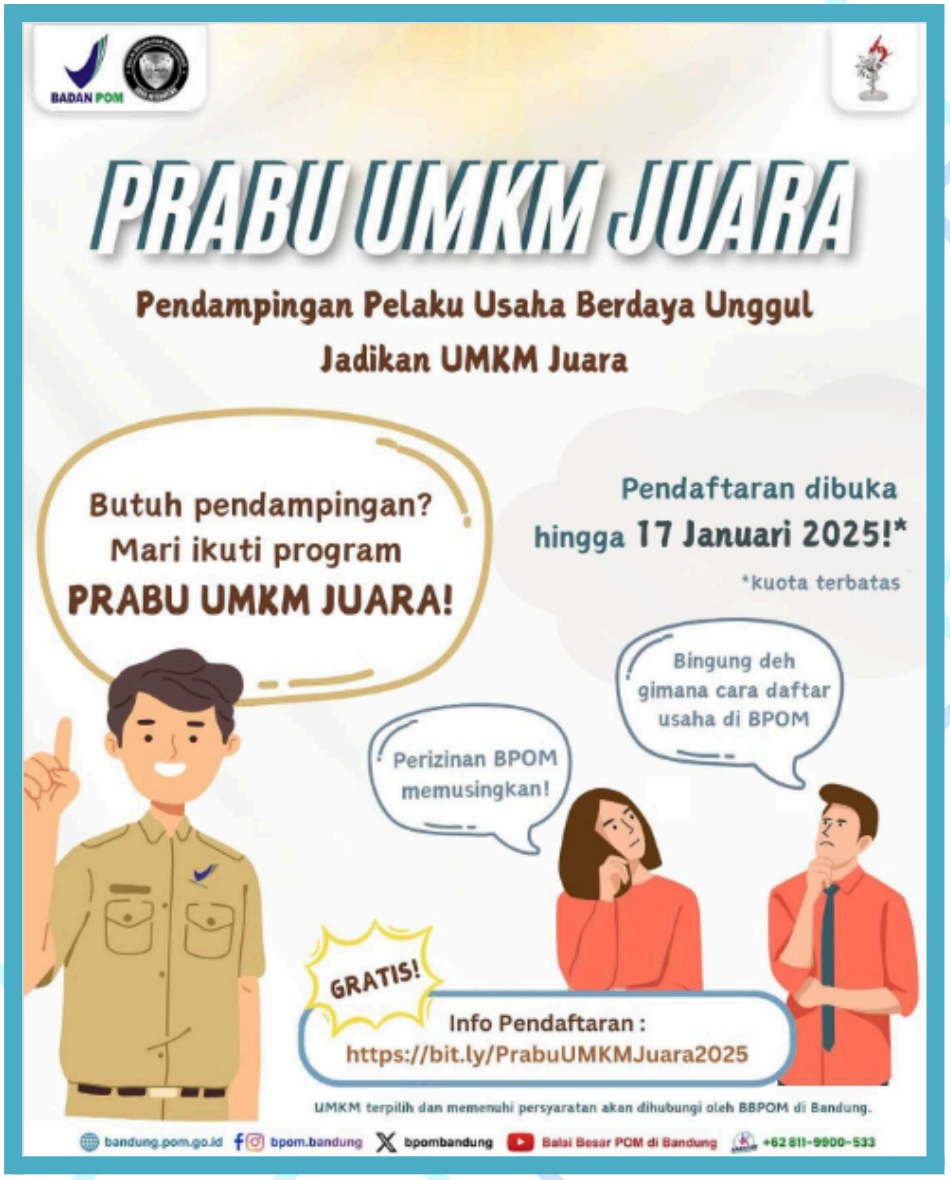
www.bandung.pom.go.id

Bandung sejak Tahun 2019 sehingga proses pertanggungjawaban lebih akuntabel, efektif, dan efisien.



www.bandung.pom.go.id

10. Balai Besar POM di Bandung menggelar pendampingan UMKM melalui program Prabu UMKM Juara sebagai Upaya untuk memfasilitasi UMKM Obat dan Makanan di Jawa Barat mendapatkan pendampingan dan izin edar.



11. Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sesuai dengan Sertifikat No. QSC 01806 dari Sucofindo International Certification Service yang berlaku dari tanggal 18 November 2024 hingga 17 November 2027.



IDSurvey

SUCOFINDO

CERTIFICATE

Certificate No. QSC 01806

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
Graha Sucofindo B1 Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Phone : +62-21-7983666 ext. 1021; Fax : +62-21-7987015 / 7987029; Email : cs.sics@sucofindo.co.id

Menyatakan bahwa
Certify that

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia

telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi
has implemented quality management system that comply with

SNI ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan
Quality Management Systems - Requirements

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :

Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
Drug and Food Control Management at the Indonesian Food and Drug Authority.

KODE SEKTOR/SECTOR CODE: 34, 36

Lokasi audit sertifikasi tercantum dalam Lampiran – 1 s.d. 12
The audite location of certification is described in Appendix – 1 until 12

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as laid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Sertifikat ini harus diperagakan/diperbanyak bersamaan dengan Lampiran - 1 s.d. 12
This certificate must be displayed/reproduced in conjunction with Appendix - 1 until 12

Dian Indrawaty
Vice President

IAF KAN

Sertifikat ini berlaku dari 18/11/2024 sampai 17/11/2027
This certificate is valid from 2024/11/18 until 2027/11/17

01-Rev.00

5051322

SCI-2023A

www.bandung.pom.go.id

12. Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan ISO 17025:2017 Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi sesuai dengan Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional Nomor LP-173-IDN yang berlaku dari tanggal 3 Januari 2022 hingga 5 September 2026.



ilac-MRA

KAN
Komite Akreditasi Nasional

SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-173-IDN

Ditetapkan tanggal : 3 Januari 2022

Diberikan kepada

Berlaku hingga : 5 September 2026

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

di

Jl. Pasteur No. 25, Bandung
Jawa Barat

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc

KETUA

Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Gambaran Umum Organisasi
1.3 Struktur Organisasi
1.4 Isu Strategis

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 dan tahun pertama dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842), serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 6 (enam) tahun kedepan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, antara lain : 1) aspek kesehatan-penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans, dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif; 2) aspek sosial-perubahan demografi dan epidemiologi yang meningkatkan tren kebutuhan masyarakat dalam penggunaan produk sediaan farmasi dan pangan olahan serta perubahan pola penyakit, yang memerlukan respon cepat, efektif dan efisien; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan, dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan, sehingga dapat menghasil produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan bermanfaat yang dapat bersaing dalam dinamika pasar yang dinamis; 4) aspek keamanan nasional - meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, terutama pelanggaran di media online/e-commerce dan kejahatan siber, termasuk bioterorisme; 5) aspek teknologi-perkembangan teknologi yang akseleratif khususnya dibidang bioteknologi dan nanoteknologi yang memberikan paradigma baru dan melakukan inovasi pengembangan

www.bandung.pom.go.id

produk baru, yang memerlukan peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi terutama untuk menjamin keamanan produk yang beredar; dan 6) aspek lingkungan – Isu lingkungan dan keberlajutan mendorong tuntutan pasar agar produk yang produksi dan diedarkan ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya perubahan regulasi, standar dan persyaratan dalam pengawasannya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makananpenataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindaklanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif

www.bandung.pom.go.id

dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21(dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 21 (dua puluh satu); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 34 (tiga puluh empat).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

www.bandung.pom.go.id

l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

TABEL 1.1
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

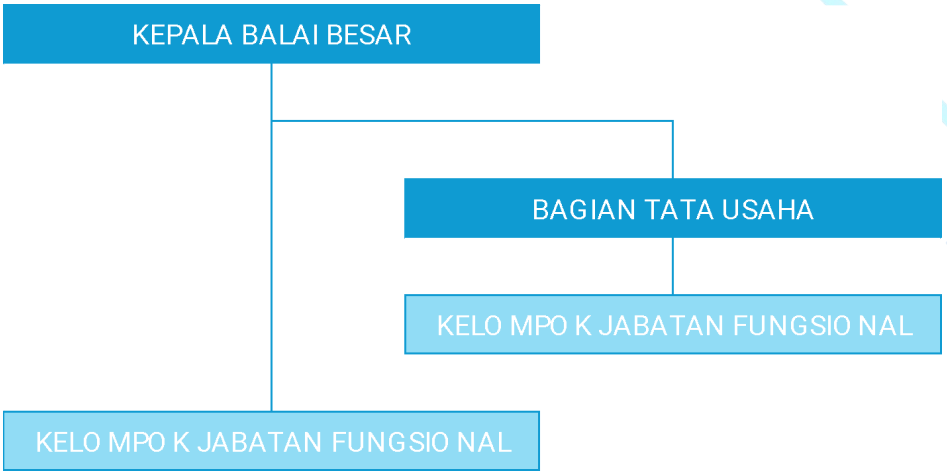
UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi 13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023

www.bandung.pom.go.id

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023.



Gambar 1.1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung

1.4 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2025 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Tatakelola Regulasi, Organisasi dan Pelayanan Publik

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Dalam rangka untuk memperkuat peran regulasi dan pengawasan, diperluakan peningkatan status Organisasi BPOM menjadi setingkat kementrian. Serta melakukan penyelarasan kewenangan/fragmentasi kebijakan antar lembaga, agar tidak tumpang tindih yang menyebabkan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal.

Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengendalian intern untuk efisiensi dan akuntabilitas tata kelola bbpom di bandung, untuk meningkatkan efektfitas dan efisiensi pelayanan publik, dan transparansi serta partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.

Tatakelola Sumberdaya Manusia

www.bandung.pom.go.id

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan, dengan jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan–pelatihan teknis, penguatan budaya organisasi dan core value BerAKHLAK, serta penerapan kode etik dan disiplin ASN, untuk meningkatkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Tatakelola Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m2 dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m2. Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Tatakelola sarana prasarana dilakukan dengan digitalisasi dan optimalisasi Pengelolaan BMN untuk Efisiensi Anggaran, efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa melalui optimalisasi Produk Dalam Negeri (PDN), digitalisasi dan modernisasi Kearsipan untuk mengurangi biaya operasional, dan efisiensi pemenuhan sarana dan prasarana untuk optimalisasi kinerja BBPOM di Bandung

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat

www.bandung.pom.go.id

menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2025, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam Region 3 dengan Koordinator BBPOM di DKI Jakarta, dan anggota terdiri dari BBPOM di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Serang. Manfaat dari sistem manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan.

www.bandung.pom.go.id

Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

   Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

   a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
   b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususunya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

   Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

   a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan
   b. tingkat maturitas
   c. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
   d. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan
   e. masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
   f. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
   g. Pengembangan jejaring laboratorium POM
   h. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan

www.bandung.pom.go.id

i. farmasi dan pangan olahan sesuai standar
j. g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
k. h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
a. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai
l. Standar kemampuan Laboratorium
m. j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi
n. standar kompetensi
o. k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
p. l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka
q. pelaporan KTD/ESO
r. m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan
s. Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
t. n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
u. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
v. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
w. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

   Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

   BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2025

Implementasi Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 bertujuan untuk mengendalikan dan mengoptimalkan belanja negara

www.bandung.pom.go.id

dan daerah agar lebih efekif dan efisien untuk melaksanakan program-program prioritas yang lebih produktif dalam mencapai tujuan nasional.

Sebagaimana Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, semua kementrian dan Lembaga termasuk BPOM diminta untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Pada Awal Tahun Anggaran
   b. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi Revisi Anggaran
   c. Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Belanja Pemerintah Daerah (Transfer Ke Daerah) sesuai Bidang dan Lingkup Kerja Kementerian/Lembaga Masing-Masing
2. Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Berkualitas (Spending Better), dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
   b. Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek
   c. Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja (Value For Money),
   d. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Bersumber dari Dana PHLN dan SBSN,
3. Melakukan Akselerasi Program/Kegiatan Pemerintahan Baru, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Melakukan Akselerasi Operasionalisasi dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga Baru Terdampak Transisi Kabinet Merah Putih (KMP),
   b. Memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins Presiden RI,
4. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
   b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal
   c. Meningkatkan Kualitas dan Validitas Capaian Output Serta Pelaporannya

www.bandung.pom.go.id

Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya.

Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional.

Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan

www.bandung.pom.go.id

kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan
mempengaruhi masyarakat luas.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional.

AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Kolaborasi dengan stakeholders

Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

www.bandung.pom.go.id

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

Peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra

www.bandung.pom.go.id

dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin

www.bandung.pom.go.id

dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan,

www.bandung.pom.go.id

pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

www.bandung.pom.go.id

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
2.5 Metode Pengukuran

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana strategis BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa

www.bandung.pom.go.id

pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi pembangunan nasional Indonesia 2025-2029 adalah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesi Emas 2045.

Dalam RPJPN 2025-2045 Tahap Pertama yaitu RPJMN 2025-2029, fokusnya adalah Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Etologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, serta Kesinambungan Pembangunan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2025-2029 yaitu: –

""Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai Besar POM di Bandung dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional..

Visi Balai Besar POM di Bandung untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Besar POM di Bandung. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: Besar POM di Bandung berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar

www.bandung.pom.go.id

memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: Besar POM di Bandung mendukung industry sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya Besar POM di Bandung adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan Besar POM di Bandung menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). Besar POM di Bandung berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Besar POM di Bandung untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Besar POM di Bandung dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BBPOM di Bandung telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi-misi ini disusun dengan memperhatikan misi Badan POM, yang telah mendukung Asta Cita Misi Presiden. Misi BBPOM di Bandung tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

www.bandung.pom.go.id

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan
5. pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung disusun dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta memperhatikan kondisi tantangan dan peluang masa depan serta sumber daya uang dimiliki. Sasaran Kegiatan ini juga sejalan dan memperkuat sasaran strategis BPOM untuk periode 2025 – 2029, dan secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat:

   Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Bandung dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar, serta pada kejadian Kejadian Luar Biasa keracunan pangan. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis, peningkatan infrastruktur dan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menguatkan pengawasan proaktif, yang lebih responsif dan efektif. Selain itu, juga menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan kejadian yang tidak diinginkan dari konsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga dapat meningkatkan respon perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kejadian emerging disease. Sasaran kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan dari para pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini juga dapat memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang

www.bandung.pom.go.id

kondusif dan berdaya saing, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Sasaran kegiatan ini juga difokuskan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dengan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, melalui kegiatan pemeriksaan yang efektif dan menyeluruh mulai dari sebelum produk diedarkan, pada saat proses produksi dan setelah produk diedarkan melalui jalur distribusi yang sesuai ketentuan. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi serta automisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat menguatkan system pemeriksaan yang efektif, responsive dan menyeluruh. Selain itu Sasaran kegiatan ini menggaris bawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Bandung sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BBPOM di Bandung berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

   Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan peran aktif BBPOM di Bandung mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, terutama di wilayah Jawa Barat. Pengawasan pangan fortifikasi ini merupakan upaya untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang ditambahkan zat gizi tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan menurunkan angka stunting.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat

   Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BBPOM di bandung berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

   Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

www.bandung.pom.go.id

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

   Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan BBPOM di Bandung dalam mendeteksi, menemukan dan menindak tegas pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi kejadian kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi peningkatan koordinasi dan advokasi dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan bagian yang penting meningkatkan kesepahaman bahwa kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kejahatan kemanusiaan, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dalam menurunkan tingkat kejahatan tersebut.

6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

   Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

7. Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima

   Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BBPOM di bandung kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal

   Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membangun BBPOM di Bandung sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang

www.bandung.pom.go.id

telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.1 berikut:

TABEL 2.1.1
SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025-2029

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	90.00	91.25	92.50	93.75
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85.25	85.50	85.75	86.00
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	9075	92.50	93.75	95.25

www.bandung.pom.go.id

8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	83.00	85.00	87.00	90.00
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	94.25	95.50	96.75	98.00
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00
11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.68	86.68	88.88	90.88	92.28
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	85.8	89.5	91.2	92.7
15. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalamPencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.26	10.53	21.05	31.58	63.16
16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.00	82.00	83.00	84.00
SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi					

www.bandung.pom.go.id

17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	63.00	68.00	71.00	75.00
SK 3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					
18. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	87.81	88.68	89.55	90.42
19. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	20	23	24	26
20. Jumlah desa pangan aman	6	10	10	10	10
21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	3	3	5	5
SK 4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu					
22. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0
SK 5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
23. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	74	76	78	80
SK 6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif					
24. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital	90	91	92	93	94

www.bandung.pom.go.id

yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung					
SK 7. Layanan Publik UPT yang Prima					
25. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
SK 8. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel					
26. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5	91,75	92,0	92,25	92,50
27. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10	83,25	83,40	83,55	83,70
28. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	5	5	5	5
29. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	3	3.05	3.1	3.15

www.bandung.pom.go.id

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.8A.09.24.605 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2.1

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BBPOM DI BANDUNG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94
		15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17
		16. Jumlah desa pangan aman	6
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	85.0

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72
7.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90
8.	Layanan Publik UPT yang Prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
9.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5
		22. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10
		23. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5
		24. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95

www.bandung.pom.go.id

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RKT Tahun 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 66.390.943.000,-.

Pada tanggal 2 Desember 2024 ditetapkan DIPA Balai Besar POM di Bandung menjadi Rp. 66.390.943.000,-.

Terdapat perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 29 Agustus 2025 dengan Pagu Anggaran Rp.66.709.935.000,-. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 2.3.1

PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI BANDUNG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	88.75
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	26
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88.75
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	93
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	84.68
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	81.7
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		5.26

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	86.94
		18. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	17
		19. Jumlah desa pangan aman	6	6
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.0	16.45
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	72
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90	90

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	24. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.7
8.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.5	91.5
		25. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.10	83.10
		26. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	5
		27. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	2.95

Kegiatan :	Anggaran
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp.46.778.823.000,-
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp.19.931.112.000,-

www.bandung.pom.go.id

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4.1 berikut:

TABEL 2.4.1

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	1.492.536.000
	2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26												26.00	99.200.000
	3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	405.173.200
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	62.112.800
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	155.282.000
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	64.683.000

www.bandung.pom.go.id

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*											Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	320.563.000
	8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	305.724.000
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	642.279.000
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	417.745.000
	11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	44.945.000
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	0.00	4.80	11.00	19.00	32.00	44.00	44.00	44.00	57.00	57.00	57.00	57.00	58.922.000
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan	81.7			79.00	79.00	79.00	80.00	80.00	80.00	81.00	81.00	81.00	81.70	12.603.107.000

www.bandung.pom.go.id

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium														
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94			86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	22.383.776.000
	15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	0.00	10.00	20.00	25.00	40.00	40.00	50.00	75.00	75.00	90.00	100.00	17.00	558.912.000
	16. Jumlah desa pangan aman	6	0.00	10.00	15.00	25.00	35.00	35.00	60.00	80.00	80.00	100.00	100.00	6.00	929.917.000
	17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	0.00	10.00	20.00	25.00	60.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	166.002.000
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.0	0.00	10.00	15.00	40.00	50.00	60.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	85.00	109.594.000
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	14.00	16.00	17.00	55.88	57.65	58.00	59.00	60.00	62.00	64.00	66.00	72.00	866.166.000

www.bandung.pom.go.id

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*											Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	90.00	283.012.000
Layanan Publik UPT yang Prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	829.727.000
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	22. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5												91.50	20.247.184.000
	23. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10												83.10	3.084.740.000
	24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5												5.00	100.140.000
	25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95												2.95	159.501.000

Terdapat perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 29 Agustus 2025 dengan Pagu Anggaran Rp.66.709.935.000,-. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*											Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	1.491.483.000

www.bandung.pom.go.id

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26												26.00	99.200.000
	3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	399.859.200
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	45.841.800
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	169.467.000
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	78.401.000
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	315.073.500
	8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	315.073.500

www.bandung.pom.go.id

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*											Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	93	93	93	93	93	582.583.500
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	453.528.500
	11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	84.68	84.68	84.68	84.68	84.68	25.593.000
	12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar									80	80	80	80	80	1.053.000
	13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	25.686.000
	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				79	79	79	80	80	80	81	81	81	81.7	7.912.527.000
	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman													5.26	7.400.000

www.bandung.pom.go.id

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	0.00	4.80	11.00	19.00	32.00	44.00	44.00	44.00	57.00	57.00	57.00	57.00	58.922.000
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94			86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	22.875.451.000
	18. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	0.00	10.00	20.00	25.00	40.00	40.00	50.00	75.00	75.00	100.00	100.00	17.00	586.716.000
	19. Jumlah desa pangan aman	6	0.00	10.00	15.00	25.00	35.00	35.00	60.00	65.00	75.00	80.00	100.00	6.00	916.015.000
	20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	0.00	10.00	20.00	25.00	60.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	152.100.000
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.0	0.00	10.00	15.00	40.00	50.00	60.00	70.00	72.00	73.00	74.00	75.00	16.45	109.594.000
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	14.00	16.00	17.00	55.88	57.65	58.00	59.00	60.00	62.00	64.00	66.00	72.00	866.166.000

www.bandung.pom.go.id

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
yang efektif di wilayah kerja UPT															
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	90.00	283.012.000
Layanan Publik UPT yang Prima	24. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70												4.70	829.727.000
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	25. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5												91.50	24.886.694.000
	26. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10												83.10	2.981.328.000
	27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5												5.00	72.400.000
	28. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95												2.95	169.040.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

www.bandung.pom.go.id

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dan dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM, dengan rincian sebagai berikut

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5.1

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
X >110%	100% < x ≤ 110%	90% < x ≤ 100%	60% ≤ x ≤ 90%	< 60%

Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dari capaian indikator kinerja di setiap sasaran strategis yang disebut dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Kemudian, nilai dari seluruh NSS dalam setiap Perspektif dikonsolidasi sehingga menghasilkan Nilai Perspektif (NP) dengan formula berikut:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

www.bandung.pom.go.id

Keterangan :

NP : Nilai Perspektif

NSS : Nilai Sasaran Strategis

SS : Sasaran Strategis

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi disebut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS dapat dihitung dengan formula berikut:

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Keterangan:

NPSS : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

NP : Nilai Perpektif

SS : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan peredikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:.

TABEL 2.5.2

KRITERIA PENCAPAIAN NPSS

				
Istimewa	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
>100%	90 ≤ NPSS ≤ 100	70 ≤ NPSS < 90	50 ≤ NPSS < 70	< 50

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

www.bandung.pom.go.id

TABEL 2.5.3

KRITERIA PENGUKURAN REALISASI TERHADAP TARGET TAHUNAN

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

B. REALISASI ANGGARAN

- Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran
- Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan.
- Evaluasi dan Analisis Anggaran berisikan mengenai rencana dan realisasi penyerapan pendanaan per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisis tingkat pencapaiannya.
- Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

www.bandung.pom.go.id

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut

TABEL 2.5.4

KRITERIA TINGKAT EFISIENSI

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

www.bandung.pom.go.id

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi
3.3 Realisasi anggaran

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi merupakan gambaran tingkat pencapaian efektivitas organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Pada Tahun 2025, sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2025-2029, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung, yang memuat 8 (delapan) sasaran kegiatan, dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada Tahun 2025 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PRODUK SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT	106.31	SANGAT BAIK	
2. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI	100.25	SANGAT BAIK	
3. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT	100.85	SANGAT BAIK	
4. MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU	104.01	SANGAT BAIK	
5. TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT	116.42	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
6. TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DIWILAYAH KERJA UPT	100.74	SANGAT BAIK	
7. LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA	104.68	SANGAT BAIK	

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL	99.49	BAIK	

Pencapaian Sasaran kegiatan ini diukur dari pencapaian IKU, yang merupakan perbandingan target dan realisasi setiap IKU dari masing-masing sasaran kegiatan. Hasil pencapaian IKU dapat dilihat pada tabel 3.1.2 di bawah ini:

TABEL 3.1.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TA 2025	REALISASI TA 2025	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	98.51	111.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	27.78	106.85	SANGAT BAIK
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	95.96	112.89	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	BAIK
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	99.67	117.26	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TA 2025	REALISASI TA 2025	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.00	84.76	99.72	BAIK
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	95.69	107.82	SANGAT BAIK
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	92.73	115.91	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	96.07	103.30	SANGAT BAIK
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.80	115.06	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.68	97.54	115.19	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	80.00	92.60	115.75	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TA 2025	REALISASI TA 2025	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	100.26	100.26	SANGAT BAIK
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.70	87.20	106.73	SANGAT BAIK
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.26	5.26	100.00	BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			106.31	SANGAT BAIK
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	57.14	100.25	SANGAT BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.25	SANGAT BAIK
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94	89.89	103.39	SANGAT BAIK
		18. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	17	100.00	BAIK
		19. Jumlah desa pangan aman	6	6	100.00	BAIK

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TA 2025	REALISASI TA 2025	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.85	SANGAT BAIK
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16.45	17.11	104.01	SANGAT BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104.01	SANGAT BAIK
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	72.00	83.82	116.42	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			116.42	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	90.00	90.67	100.74	SANGAT BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.74	SANGAT BAIK
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	24. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.92	104.68	SANGAT BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104.68	SANGAT BAIK

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TA 2025	REALISASI TA 2025	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
8.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.50	91.92	100.46	SANGAT BAIK
		26. Nilai AKIP UPT BPOM	83.10	81.35	97.89	BAIK
		27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00	BAIK
		28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95	2.938	99.59	BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			99.49	BAIK
NILAI KINERJA ORGANISASI					104.29	ISTIMEWA

Berdasarkan data capaian IKU dan Sasaran Kegiatan tersebut, pada Tahun 2025 ini, capaian kinerja organisasi BBPOM di Bandung adalah sebesar 104,29% dengan predikat"ISTIMEWA". Terdapat lima (5) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, dan satu (1) sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN KE-1

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PRODUK SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 15 (lima belas) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kelima belas indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **106.36%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.3.

TABEL 3.1.3
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	98.51	111.00	Tidak Dapat Disimpulkan	
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26.00	27.78	106.85	Sangat Baik	
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	95.96	112.89	Tidak Dapat Disimpulkan	
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100.00	100.00	Baik	

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	99.67	117,26	Tidak Dapat Disimpulkan	
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	84.76	99.72	Baik	
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	95.69	107.82	Sangat Baik	
8. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	92.73	115.91	Tidak Dapat Disimpulkan	
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	96.07	103.30	Sangat Baik	
10. Persentase sarana distribusi Pangan	85,00	97.80	115.06	Tidak Dapat Disimpulkan	

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	97.54	116.84	Tidak Dapat Disimpulkan	
12. Persentase Label Produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	92.6	115.75	Tidak Dapat Disimpulkan	
13. Persentase pemenuhan target AMR di wilayah UPT	100.00	100.26	100.26	Sangat Baik	
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sedian Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.70	87.20	106.73	Sangat Baik	
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.26	5.26	100.00	Baik	

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			106.31%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

   Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

   Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

   Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

   Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

   Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

   Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

   A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

      a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

         30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),

         Mencakup kesesuaian dengan:

         1. Target sampel,
         2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),

3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan

tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%.

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Samplingp
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

TABEL 3.1.4
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75%	98.51%	111,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025, Perhitungan kinerja pada manual IKU ini telah disesuaikan dengan hasil pembahasan pada tanggal 24-26 Juni 2025. Hal ini menyebabkan adanya perubahan data capaian kinerja pada Triwulan I dan triwulan II, menjadi sebagai berikut :

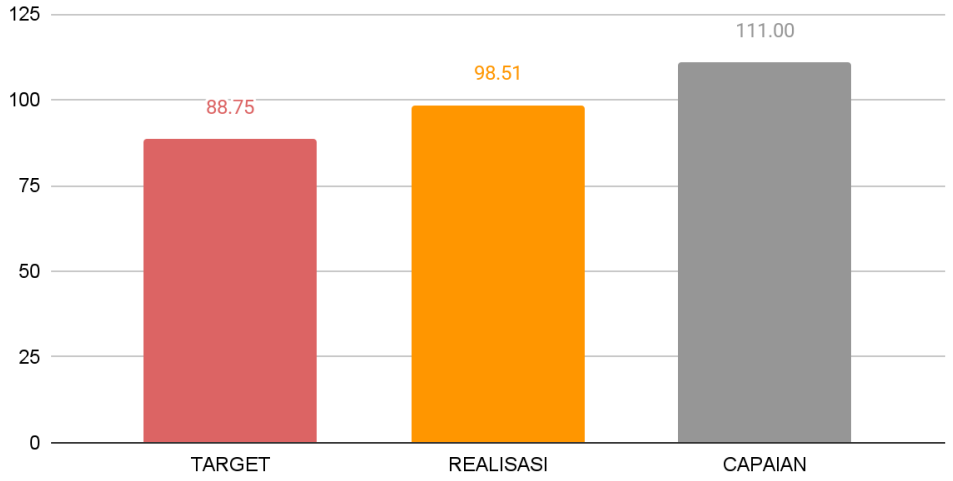
TABEL 3.1.5
PERUBAHAN DATA CAPAIAN KINERJA
TA 2025

INDIKATOR	Manual IKU Lama		Manual IKU Baru	
	TW I	TW II	TW I	TW II

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	96,09%	100%	97,43%

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88,75%. Seluruh sampel sediaan farmasi telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Dengan demikian ketepatan pelaporan sampling dan pengujian memenuhi *timeline* yang ditetapkan. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,51%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 111,00% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Grafik 3.1.1
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

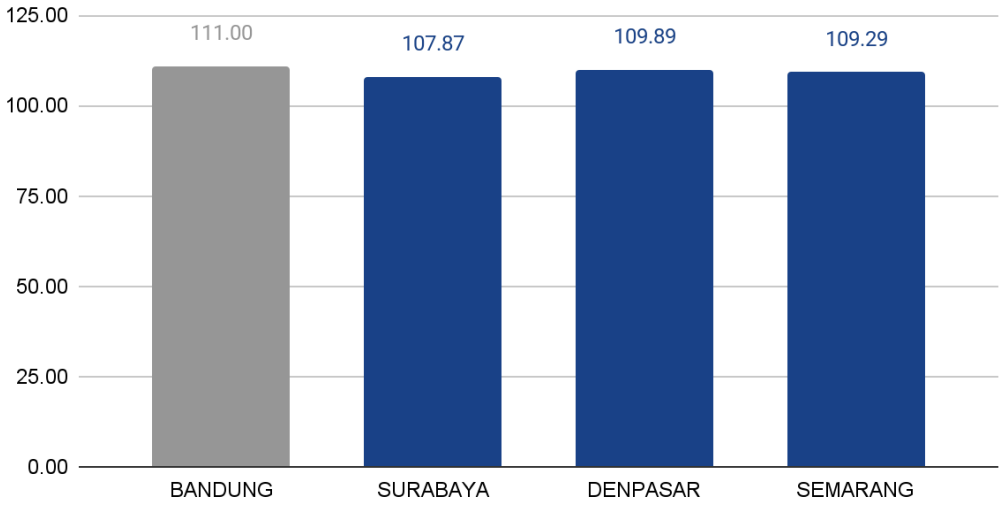
Target Rencana Strategis Tahun 2029 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93,75%. Jika realisasi kinerja pada TA 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada TA 2025 sebesar 101,51% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.6
PERBANDINGAN REALISASI TA 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2029
PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75%	98,51%	105,07%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.2
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai ketentuan pada tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Denpasar sebesar 100,00%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 100,00% Balai Besar POM di Bandung 98,51%,serta Balai Besar POM di Surabaya sebesar 96,54%. Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung 111,00%, Balai Besar POM di Denpasar 109,89%, Besar POM di Semarang 109,29% serta Balai Besar POM di Surabaya 107,87%. Dari capain tersebut, Balai

Besar POM di Bandung masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan karena capaian >110%, sedangkan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Semarang masuk dalam kategori sangat baik. Capaian Balai Besar POM di Bandung tidak dapat disimpulkan salah satunya disebabkan oleh rendah nya target yang ditetapkan.

Jika realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 98,51% dibandingkan dengan Target Nasional sebesar 86,40% maka capaian kinerja nya adalah 114,02%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Pada tahun 2025 sampel sediaan farmasi yang disampling dan diuji Balai Besar POM di Bandung sebesar 100,06% (1767 sampel dari target 1766 sampel). Seluruh sampel sediaan farmasi yang diuji Balai Besar POM di Bandung yang berasal dari anggota Balai Regional Semarang sebesar 100,00% (2228 sampel dari 2228 sampel dengan 31 sampel melewati timeline yang dipersyaratkan, yaitu 4 sampel obat, 7 sampel suplemen kesehatan, 1 sampel Obat Bahan Alam dan 19 sampel kosmetik).
2. Renlak sampling disusun berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2025 dan waktu pelaksanaan sampling dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya aplikasi internal (Appsheet) pada pelaporan sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang mempercepat dan memudahkan untuk mengakses data sehingga mempercepat proses Tindak Lanjut.
4. Pelatihan personel sampling sediaan farmasi yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS pada bulan Januari 2025.
5. Pengambilan contoh sampel sediaan farmasi yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan

pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.

6. Peningkatan pemahaman dan ketepatan personil sampling dalam menentukan kesimpulan penandaan sampel sediaan farmasi

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja) :

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
2. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan sampel sediaan farmasi untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.
3. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.
4. Melakukan monitoring tindak lanjut surat Badan POM terkait Sediaan Farmasi yang TMS.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Pelatihan personel pelaksana sampling sediaan farmasi yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Kimia Obat-Nappza Verifikasi Metode Penetapan Kadar Sediaan Obat sesuai PERBPOM 10 Tahun 2025 dan Penilaian Kewajaran Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran; Laboratorium Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi Verifikasi MA Logam Berat Pb, Cd, As secara AAS-GFA MA 09/OT-PK/15 (Sediaan Cair) dan 28/OTSK/MA-PPPOMN/18 : (Sediaan Padat); Laboratorium Kosmetik Identifikasi Acid Yellow 11 (CI 18820) dan Metanil Yellow (CI 13065) dalam Kosmetik Sediaan Semi Solid secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-PDA (MA 77/KO/MA-PPOMN/21) yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 29 Agustus 2025. Bimbingan Teknis Internal laboratorium Mikrobiologi Uji Potensi Pada Sediaan Oral Bentuk Tablet Obat yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 18 Juli 2025.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.7
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111,00%	99.92%	1.11	0.11	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

2. PERSENTASE SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit

atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diukur dengan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%.

Keterangan:

A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Target Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM Tahun 2025 adalah 26% diukur pada Akhir Tahun.

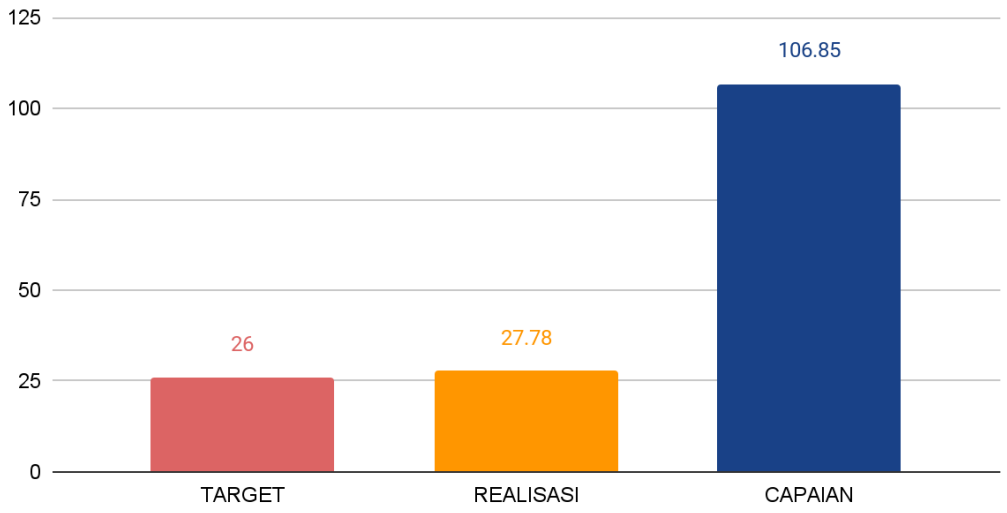
TABEL 3.1.8
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00%	27,28%	106,85%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target Tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 26,00% dengan realisasi sebesar 27,78%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 106,85% dengan kriteria SANGAT BAIK.

Grafik 3.1.3
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

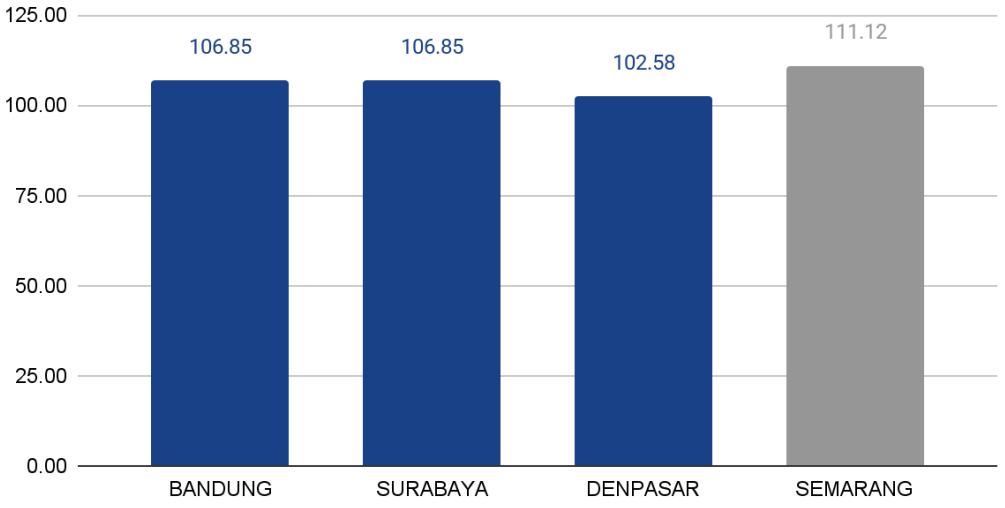
Target akhir tahun renstra yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 30%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap akhir renstra tahun 2029, maka capaiannya sebesar 90,93% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.9
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2029
PERSENTASE SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	30%	27,28%	90,93%	Akan Tercapai	

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.4
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka persentase Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang sebesar 28,89%, Balai Besar POM di Surabaya 27,78%, Balai Besar POM di Bandung sebesar 27,78%, dan Balai Besar POM di Denpasar sebesar 26,67%.

Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Semarang 111,12%, Balai Besar POM di Surabaya sebesar 106,85%, Balai Besar POM di Bandung 106,85% serta Balai Besar POM di Denpasar sebesar 102,58%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Pemilihan sarana yang efektif terutama yang memiliki kendala dalam pelaporan KTD/ESO.
- Pendampingan terkait teknis pelaporan kepada sarana pelayanan kesehatan yang memperoleh KIE pelaporan KTD/ESO
- Komunikasi yang efektif kepada Apoteker Penanggung jawab Sarana

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Menyusun perencanaan target KIE pelaporan KTD/ESO dengan lebih baik
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor terkait
3. Mengoptimalkan pendampingan sarana pelayanan kesehatan secara langsung maupun daring untuk memperjelas teknis pelaporan

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Perencanaan dan pemilihan pendampingan sarana pelayanan kesehatan untuk pelaporan KTD untuk yang Efektif.
2.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkala untuk pendataan pelaporan KTD yang sudah dilakukan.
4. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi dengan Direktorat KMEI, sarana pelayanan kesehatan yang sudah mendapat KIE dan stake holder terkait.

DOKUMENTASI



Gambar 3.1.1 Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi aplikasi e-meso

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.10
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	106.84%	97.59%	1.09	0.09	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian kinerja sebanding dengan realisasi Anggaran.

3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F.

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100 %

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan : ((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%.

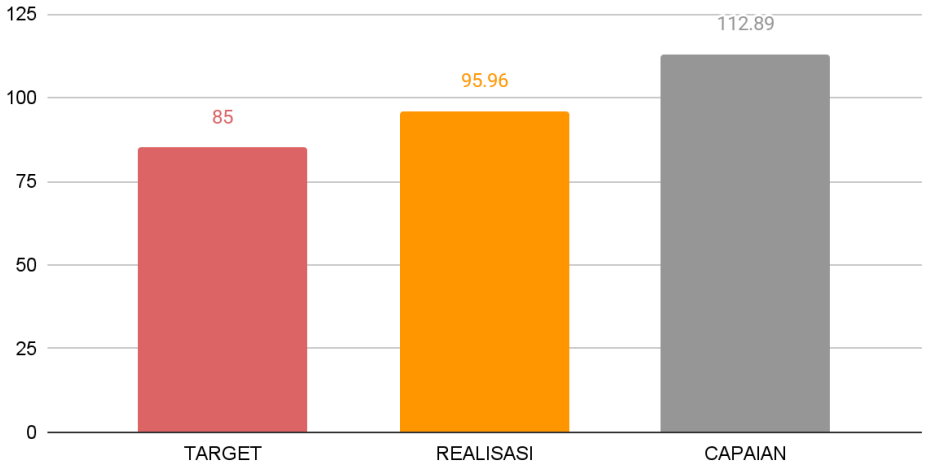
TABEL 3.1.11
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	95,96%	112,89%	Tidak dapat disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00%. Seluruh sampel pangan olahan telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Persentase realisasi sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 95,96%. Sebanyak 675 sampel Pangan Olahan telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 580 sampel memenuhi syarat dan 95 sampel tidak memenuhi syarat (Vitamin A, Benzoat, Siklamat, As.Propionat, Aflatoksin, Cemaran Logam, ALT, AKK, Enterobacter). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 112,89% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Grafik 3.1.5
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

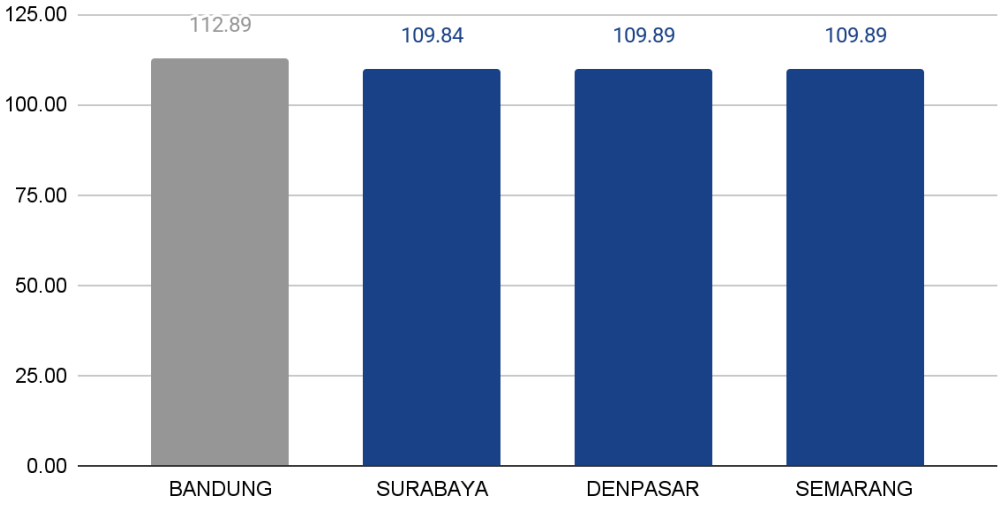
Target Rencana Strategis Tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93,00%. Jika realisasi kinerja pada TA 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada TA 2025 sebesar 103,18% dengan kategori Tercapai/Melampaui. Hal ini mencerminkan bahwa strategi, kebijakan, serta program yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif.

TABEL 3.1.12
PERBANDINGAN REALISASI TA 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2029
"PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93,00%	95,96%	103,18%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.6
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Persentase realisasi **sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka **sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang sebesar 100,00%, Balai Besar POM di Denpasar 100,00%, Balai Besar POM di Surabaya sebesar 98,86%, dan Balai Besar POM di Bandung sebesar 95,96%.

Persentase capaian Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung 112,89% dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Surabaya sebesar 109,84%. Sedangkan capaian Balai Besar POM di Denpasar serta Balai Besar POM di Semarang mempunyai nilai yang sama, yaitu sebesar 109,89%. Dari capain tersebut, Balai Besar POM di Bandung masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan karena capaian >110%, sedangkan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Semarang masuk dalam kategori sangat baik.

Persentase capaian Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti jika dibandingkan terhadap target nasional sebesar 78,00% maka capaian tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang sebesar 128,05 %, Balai Besar POM di Denpasar sebesar

128,05 %, Balai Besar POM di Surabaya sebesar 126, 74% dan Balai Besar POM di Bandung sebesar 123,03%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Persentase Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sudah mencapai target dengan kategori melampaui. Adapun kendala yang dihadapi adalah:

1. Instrumen ICPMS dan AAS yang sering mengalami gangguan dikarenakan beban kerja yang tinggi, sehingga berdampak pada belum terpenuhinya target waktu pengujian.
2. Keterbatasan anggaran sampling dan jumlah sampel dengan batch yang sama untuk uji mikrobiologi menyebabkan pengujian mikrobiologi tidak dapat dilaksanakan.
3. Pengiriman sampel ke laboratorium region dengan volume yang besar berdampak pada meningkatnya anggaran pengiriman sampel.

Sedangkan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan ini pada tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Adanya aplikasi internal (Appsheet) yang mempercepat dan memudahkan untuk mengakses data sehingga mempercepat proses Tindak Lanjut.
3. Pelatihan personel sampling dan pengujian pangan olahan yang dilaksanakan secara daring (aplikasi IDEAS) dan secara luring.
4. Peningkatan pemahaman dan ketepatan personil sampling dalam menentukan kesimpulan penandaan sampel produk pangan olahan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

E. Perbaikan alat Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP MS).
F. Penyusunan Renlak dilakukan menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan di laboratorium

G. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai dengan jadwal laboratorium regional dan dilaksanakan tepat waktu sesuai perencanaan sampling.
H. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan pangan olahan untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.
I. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.
J. Melakukan monitoring tindak lanjut produk pangan olahan TMS sehingga sampel dapat ditindaklanjuti tepat waktu.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.13
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	112.90%	99.71%	1.13%	0.13%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

4. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau

pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
b. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dihitung dengan rumus = Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar / Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM x 100%.

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.

g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
   - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
   - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
   - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

TABEL 3.1.14
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100.00%	100.00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, terdapat 10 sampel KLB keracunan pangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan berupa sampel pangan siap saji dengan hasil uji "Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST)". Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100,00%. Persentase sampel KLB

keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100% .

Grafik 3.1.7
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2029

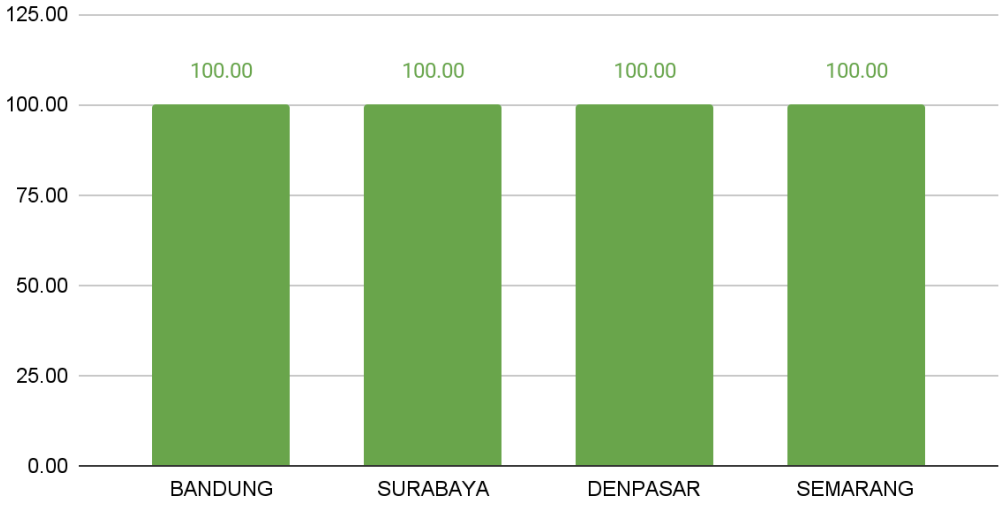
Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.15
PERBANDINGAN TARGET TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2029
PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100,00%	100%	Tercapai/ Melampauai	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.8
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Persentase realisasi Sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, diperoleh realisasi yang sama yaitu sebesar 100%.

Persentase capaian Sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar, baik Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Semarang mempunyai nilai yang sama, yaitu sebesar 100%. Capaian tersebut masuk dalam kategori baik

Persentase capaian Sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar Balai Besar POM di Bandung sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target nasional, capaiannya adalah 100%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target adalah:

1. Meningkatkan kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan.

2. Meningkatkan kesesuaian parameter uji dengan Pedoman Sampling dan Pengujian jika sampel dugaan KLB KP adalah pangan olahan dalam kemasan.
3. Petugas Balai Besar POM di Bandung membantu dinas kesehatan untuk menentukan dugaan agen penyebab KLB.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui Bimtek, antara lain Training of Trainer Penguatan Sistem Ketertelusuran dan HACCP Pangan Olahan Siap Saji yang melibatkan petugas BBPOM Bandung dan Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 19 s.d 21 November 2025.
2. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait, salah satunya melalui Rapat Koordinasi Strategi dan Manajemen Pengawalan Insiden Keamanan Pangan/KLB KP yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Juni 2025 di BBPOM di Bandung dan di Mall Layanan Publik Kota Cimahi dengan mengunang seluruh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Petugas BBPOM Bandung
3. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
4. Program Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
5. Program Pasar Aman

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.16
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100.00%	1.00%	0.00%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A. Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%.

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%.

E. Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%.

F. Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan : (Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%.

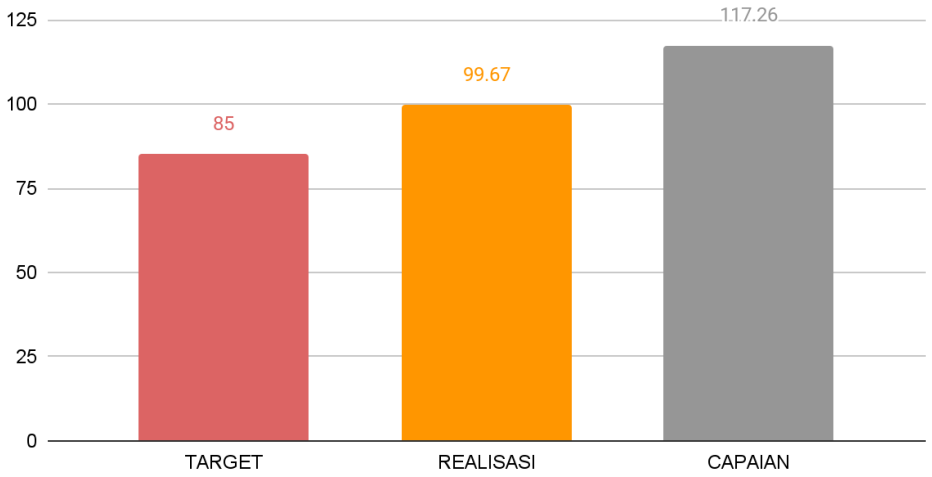
TABEL 3.1.17
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	99,67%	117,26%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00%. Seluruh sampel PIRT yang telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Sebanyak 60 sampel PIRT telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 49 sampel memenuhi syarat, 11 sampel tidak memenuhi syarat yang terdiri dari 3 sampel TMS Kimia (Kadar tartrazin, Kadar Cemaran Logam, Benzoat) dan 8 sampel TMS Mikro (ALT, AKK). Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100,00%. Berdasarkan capaian tersebut maka nilai pencapaian indikator adalah sebesar 117,26% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Grafik 3.1.9
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

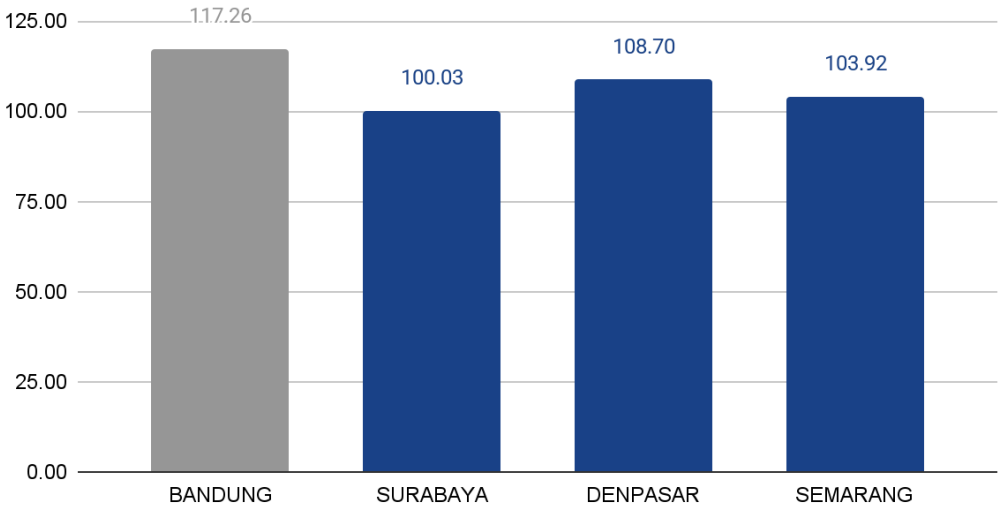
Target Renstra tahun 2029 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 95,00%. Jika realisasi kinerja tahun 2025 dihitung terhadap target Renstra tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 104,92 % dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.18
PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET RENSTRA 2029
PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95,00%	99,67%	104,92 %	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.10
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Persentase realisasi Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Denpasar sebesar 100,00%, Balai Besar POM di Bandung sebesar 99,67%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 95,61%, serta Balai Besar POM di Surabaya sebesar 91,03%. Persentase capaian Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung 117,26% dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Surabaya sebesar 100,30%. Untuk Balai Besar POM di Denpasar capaiannya sebesar 108,70% dan Balai Besar POM di Semarang sebesar 103,92%. Dari capaian tersebut, Balai Besar POM di Bandung masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan karena capaian >110%, sedangkan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Semarang masuk dalam kategori sangat baik.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sudah mencapai target dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Sampling PIRT telah diselesaikan di bulan Maret dengan realisasi 60 sampel.

Kegiatan yang menunjang Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

a. Melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, melaksanakan sampling lalu mengirim sampel ke pengujian sebelum batas waktu yang ditentukan, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi PIRT tepat waktu

b. Upaya terkait pengujian adalah menyelesaikan pengujian sebelum batas waktu dengan parameter uji sesuai pedoman sampling, melakukan input SIPT untuk laporan hasil uji serta tetap mempertahankan jaminan mutu hasil pengujian agar diperoleh hasil pengujian yang tepat.

c. Sampling PIRT telah diselesaikan bulan Februari dengan realisasi 60 sampel dan pengujian sampel diselesaikan pada bulan Maret.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Tersedianya sarana dan prasarana (reagensia, media, alat gelas dan instrumen) yang mendukung dalam proses sampling dan pengujian.
2. Sumber Daya Manusia yang telah memenuhi kompetensi.
3. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
5. Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.19
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	117,26%	99.64%	1.18%	0.18%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diukur dengan rumus : (A+B) /2 dengan rincian sebagai berikut :

A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha X 100%.

B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor X 100%.

TABEL 3.1.20
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER
TAHUN 2025

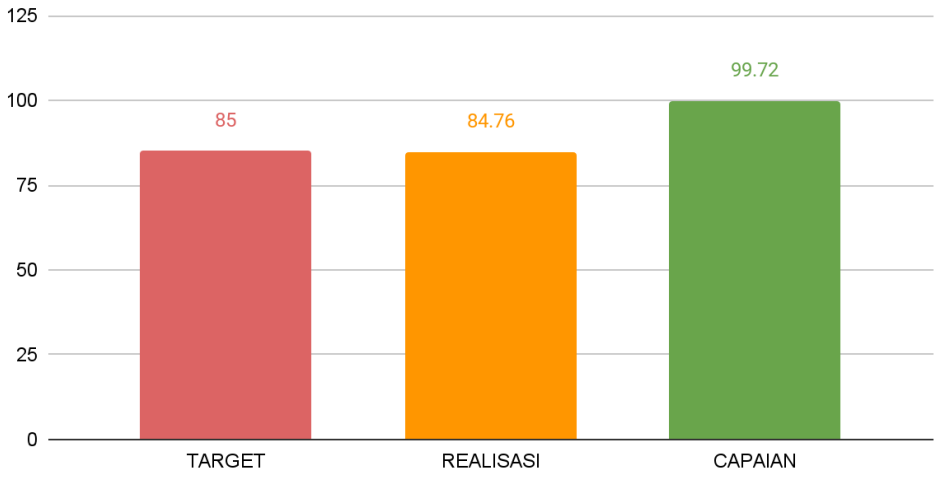
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00%	84,76%	99,72%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target Tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 85 % dengan realisasi sebesar 84,76 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 99,72 %.

Sebanyak 504 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh stakeholder dari 725 rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dan lintas sektor sehingga persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 84,76%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 99,72% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.11
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

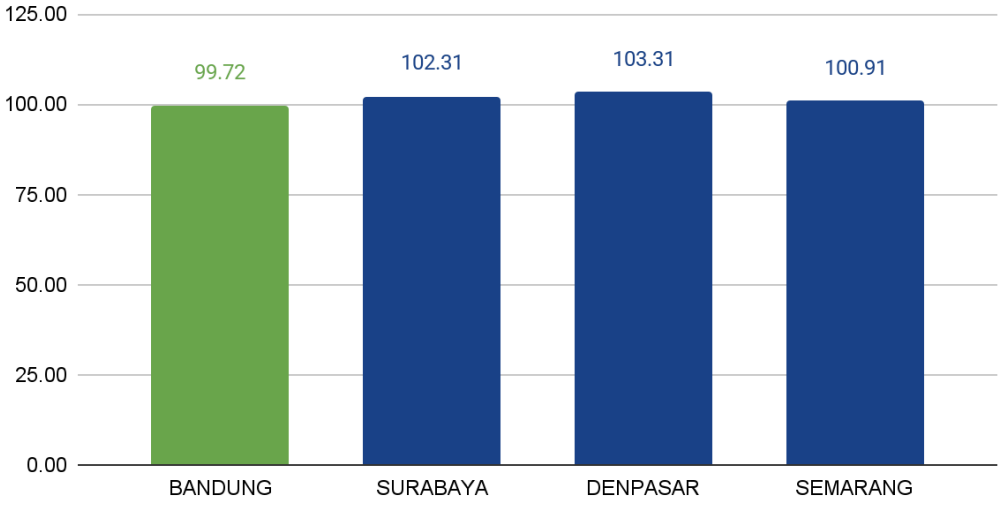
Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 86%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target akhir RENSTRA tahun 2029, maka capaiannya sebesar 98,56% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.21
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN AKHIR TAHUN RENSTRA 2025 - 2029
PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

INDIKATOR	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	86%	84,76%	98,56%	Akan Tercapai	

C. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Dalam Satu Kluster

Grafik 3.1.12
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka yang tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya sebesar 90,03%, Balai Besar POM di Denpasar 87,81%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 86,78%, dan Balai Besar POM di Bandung sebesar 84,76%.

Apabila dibandingkan persentase capaiannya maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Denpasar sebesar 103,31%, diikuti oleh Balai Besar POM di Surabaya 102,31%, Balai Besar POM di Semarang 100,91% serta Balai Besar POM di Bandung sebesar 99,72%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Kegagalan capaian kinerja kegiatan tersebut pada Tahun 2025 disebabkan sebagai berikut :

- Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan respon terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan makanan.

- Belum optimalnya pola komunikasi antara petugas dengan pelaku usaha dan lintas sektor dalam mendorong perbaikan terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Peningkatan komunikasi petugas dengan pelaku usaha dan lintas sektor untuk jemput bola CAPA melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, yaitu diberikan surat penagihan CAPA sebagai pengingat terkait kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan
- Dikembangkan sistem notifikasi dan reminder secara elektronik melalui aplikasi 1POMJABAR untuk mengingatkan tenggat waktu tindak lanjut bagi pelaku usaha

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Kegiatan desk CAPA adalah proses evaluasi, verifikasi, dan monitoring tindakan perbaikan dan pencegahan (Corrective and Preventive Action) yang dilakukan melalui penilaian dokumen yang disampaikan oleh pihak sarana baik secara offline maupun online. Dengan melakukan desk CAPA maka sekaligus memberikan bimbingan bagaimana membuat CAPA yang jelas dan benar.




Gambar 3.1.2 Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa desk CAPA secara mandiri yang bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

2. Diberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha misalnya dengan memberikan bimbingan teknis bagaimana menyusun CAPA yang efektif, focus pada akar masalah dan pencegahan berulang.
3. Penggunaan platform digital dalam monitoring CAPA yaitu aplikasi Satu POM Jabar dan Galura Inspeksi. Monitong progress CAPA yang dikirimkan oleh pelaku usaha dan evaluasi oleh petugas.
4. Jemput bola CAPA dengan cara mendatangi kembali sarana yang diperiksa untuk memonitor secara langsung perbaikan yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.22
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	99.72%	83.15%	1.20%	0.20%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

a. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
b. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
c. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%.
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%.
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = rata-rata persentase sub aspek 1-6 :
    1. Ketepatan penetapan tindak lanjut
    2. Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
    3. Kesesuaian format laporan inspeksi
    4. Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
    5. Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi

6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Inspeksi bersama dengan unit pusat hanya dihitung dalam komponen B-Jumlah Pelaksanaan Inspeksi. Target tahunan B12 minimal sejumlah target RO tahun berjalan.

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

TABEL 3.1.23

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75%	95,69%	107,82%	Sangat Baik	

Pada Tahun 2025, seluruh sarana produksi sediaan farmasi yang ditargetkan dapat terlaksana, namun terdapat ketidaksesuaian pemenuhan timeline untuk sarana produksi obat dan sarana produksi obat bahan alam. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.1.24
RINCIAN PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

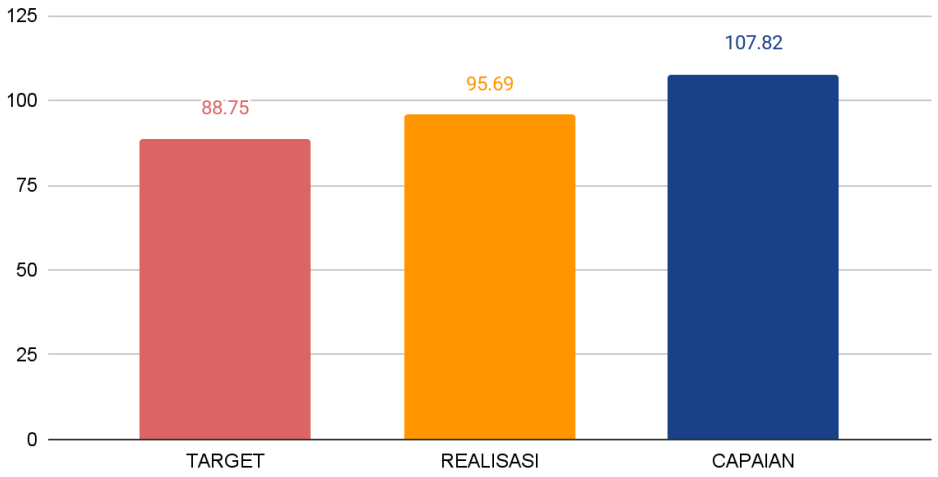
SARANA	KESESUAIAN DENGAN PEDOMAN	% Kesesuaian
INDUSTRI OBAT	A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	108,11%
	B. Jumlah pelaksanaan inspeksi	100%
	C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	88,75%
	CAPAIAN INDUSTRI OBAT	98,95%
IOT/IEBA	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	100%
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	68,75%
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	100%
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	100%
	CAPAIAN INDUSTRI IOT/IEBA	92,19%

SARANA	KESESUAIAN DENGAN PEDOMAN	% Kesesuaian
INDUSTRI SK	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	100%
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	81,25%
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	100%
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	100%
	CAPAIAN INDUSTRI SK	95,31%
INDUSTRI KOSMETIK	A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	100%
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	85,29%
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	100%
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	100%
	CAPAIAN INDUSTRI KOSMETIK	96,32%
CAPAIAN SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI		95,69 %

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target Tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 88,75 % dengan realisasi sebesar 95,69 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 107,82 % dengan kriteria SANGAT BAIK.

Grafik 3.1.13
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA

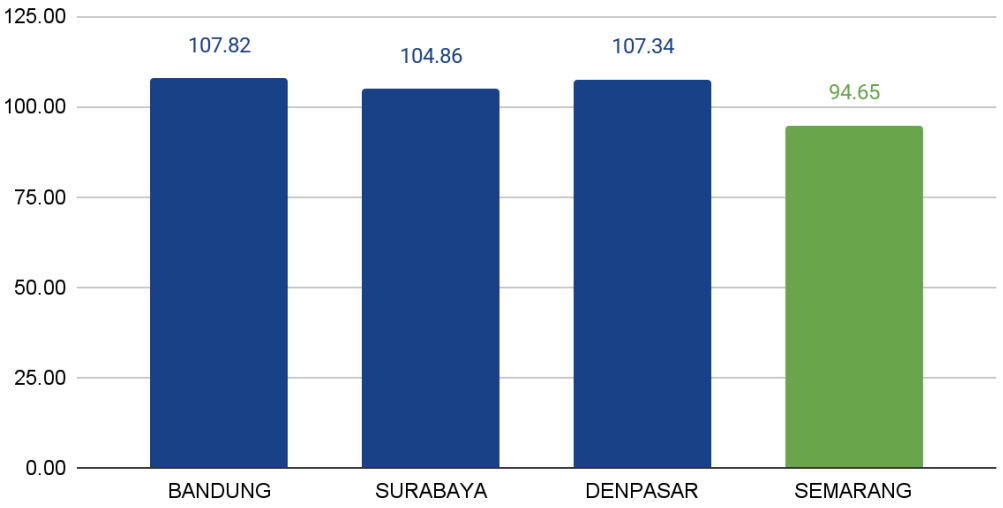
Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 95.25%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target akhir RENSTRA tahun 2029, maka capaiannya sebesar 116,66% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.25
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN AKHIR TAHUN RENSTRA 2025 - 2029
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

INDIKATOR	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.25%	95,69%	107,82%	Tercapai/ Melampaui	

C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN DALAM SATU KLUSTER

Grafik 3.1.14
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka persentase Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Denpasar sebesar 98,75%, Balai Besar POM di Bandung 95,69%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 95,44% dan Balai Besar POM di Surabaya sebesar 91,49%.

Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentase capaian tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung 107,82%, Balai Besar POM di Surabaya sebesar 104,86%, Balai Besar POM di Denpasar sebesar 96,60%, dan Balai Besar POM di Semarang sebesar 94,65%,

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Penyusunaan kajian risiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penetapan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi telah dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan Bimtek dan metode lainnya, salah satunya melalui IDEAS. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur CPOB 33 orang, CPOTB 42 orang dan CPKB 49 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Kepala, Senior ataupun Junior.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corrective Action dan Preventive Action (CAPA).
- Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian IKU ini dilakukan secara rutin bulanan. Hal tersebut dapat mengantisipasi permasalahan yang menjadi kendala serta menetapkan alternatif solusinya.

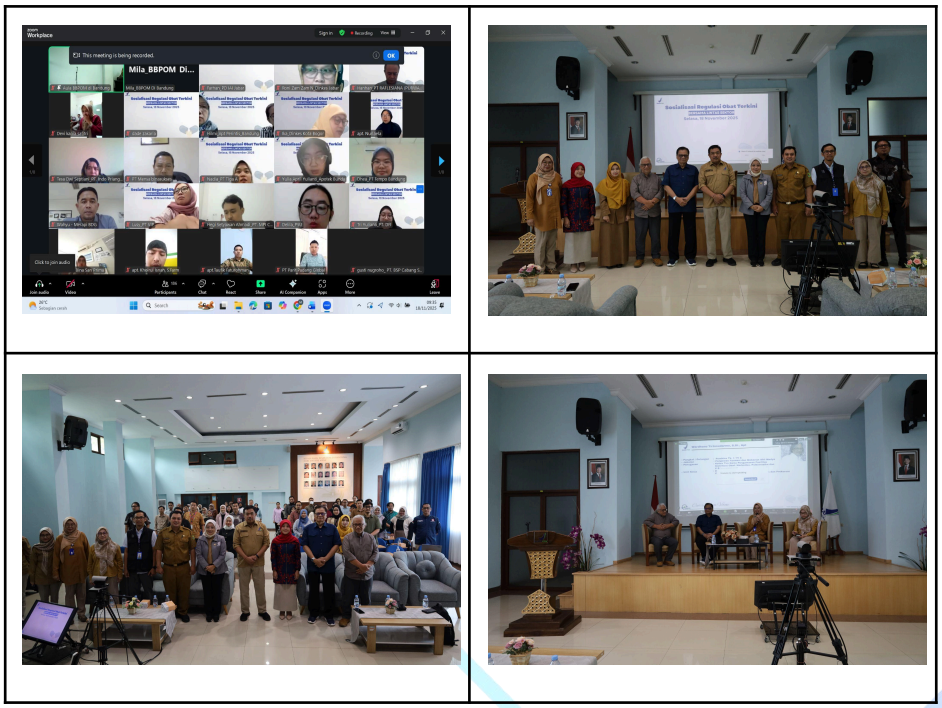
Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.
- Penugasan personel khusus sebagai PIC untuk mengawal pencapaian timeline pemeriksaan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

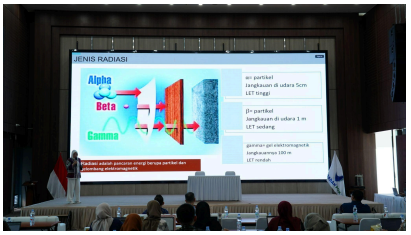
- Kegiatan bersama lintas sektor untuk sosialisasi regulasi terkini pada tanggal 18 November 2025, dengan peserta berasal dari Organisasi Profesi (IAI, IDI dan IDUI), pelaku usaha (Apotek, PBF, Klinik) dan Instansi pemerintah lainnya (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat).



Gambar 3.1.2 Sosialisasi Regulasi Terkini Bersama Lintas Sektor

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
- Pelatihan personil yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BPOM Pusat, antara lain Bimtek CPOB Dasar pada tanggal 4 - 8 Agustus 2025, Bimbingan Teknis CPOB Radiofarmaka pada tanggal 29 Agustus 2025, serta Workshop CPOB di Fasilitas Produksi Produk Biologi pada tanggal 15 - 18 September 2025.







Gambar 3.1.3 Bimbingan Teknis CPOB Dasar, Bimbingan Teknis CPOB Radiofarmaka dan Workshop CPOB Fasilitas Produk Biologi

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.26
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107.82%	99.98%	1.08	0.08	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun

pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus % Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa x 100%.

Keterangan:

1. Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
2. Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
   a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
   b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut (TL). TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
   c. Kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
      - pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK).
      - pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK).
      - pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

d. Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

TABEL 3.1.27
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	92.73%	115.91%	Tidak dapat Disimpulkan	

Pada tahun 2025 seluruh sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang ditargetkan dapat terlaksana dan ditindaklanjuti sesuai pedoman, namun terdapat ketidaksesuaian pemenuhan timeline pada pelaporan SIPT sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP. Secara terperinci capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

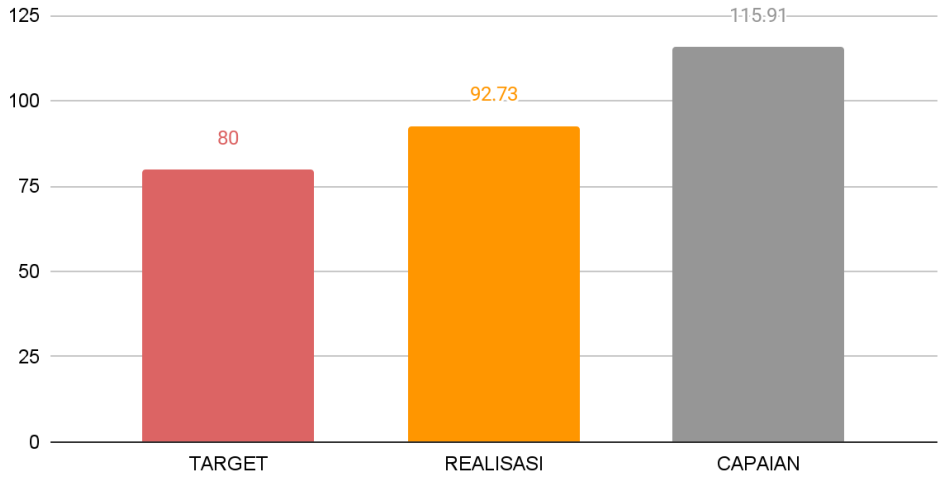
TABEL 3.1.28
PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

SARANA	KESESUAIAN DENGAN PEDOMAN	% Kesesuaian
INDUSTRI PANGAN	A. Ketepatan waktu	78,16%
	B. Kesesuaian tindak lanjut	100%
	C. Kesesuaian waktu pelaporan	100%
	CAPAIAN INDUSTRI PANGAN	92.73%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,00%. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92.73%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 115.91% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.

Grafik 3.1.15
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2025 - 2029

Target akhir tahun renstra yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 90,00%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target akhir RENSTRA tahun 2029, maka capaiannya sebesar 103,03% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

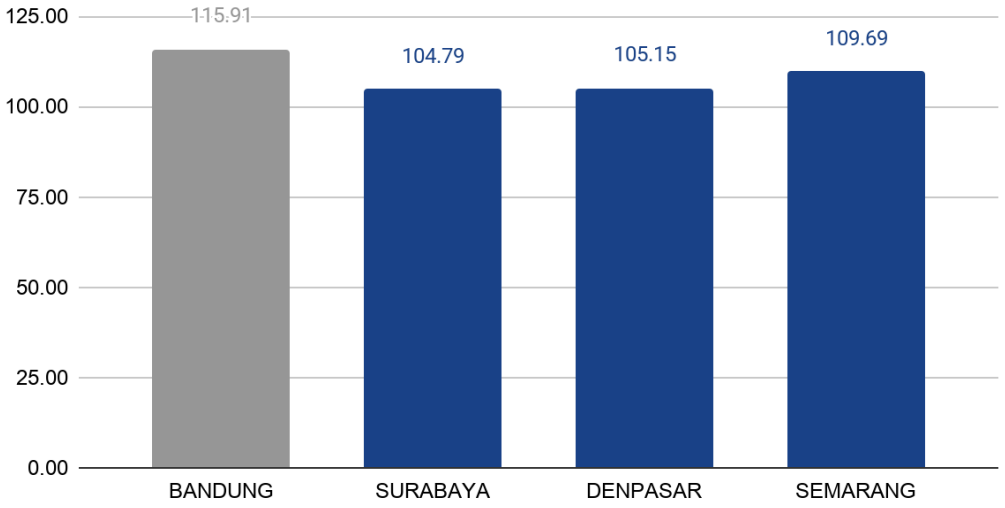
TABEL 3.1.29
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA 2025 - 2029
PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	KATEGORI

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00%	92.73%	103.03%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN DALAM SATU KLUSTER

Grafik 3.1.16
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Denpasar sebesar 96,74%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 93,24%, Balai Besar POM di Bandung 92,73%, dan Balai Besar POM di Surabaya sebesar 89,07%

Jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung 115,91%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 109,69%, Balai Besar POM di Denpasar sebesar 105,15% dan Balai Besar POM di Surabaya 104,79%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Penyusunaan kajian risiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penyusunan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi sediaan Pangan Olahan termasuk IRTP. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur Pangan sebanyak 48 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Madya, Muda maupun Pertama.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corrective Action dan Preventive Action (CAPA).
- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan pangan olahan, khususnya Pangan Industri Rumah Tangga melalui berbagai cara, baik formal maupun informal.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.





Gambar 3.1.4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
- Pelatihan personil yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PPSDM bekerjasama dengan Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan antara lain Food Inspector (FI) Dasar pada tanggal 25 - 29 Agustus 2025 dan Bimbingan Teknis Penanganan KLB Keracunan Pangan pada tanggal 8-11 Juli 2025, serta Training of Trainer Penguatan Sistem Ketertelusuran dan HACCP Pangan Siap Saji pada tanggal 19-21 November 2025.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.30
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP) YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan	115.91%	99.98%	1.16	0.16	Efisien

ditindaklanjuti sesuai ketentuan					

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Efisien (0<1.00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

9. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian;
b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
d. Fasilitas distribusi sediaan Kosmetik meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
   1. Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %
   2. Persentase kesesuaian tindak lanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%
   3. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)
   a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%.
   b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
   c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
   d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

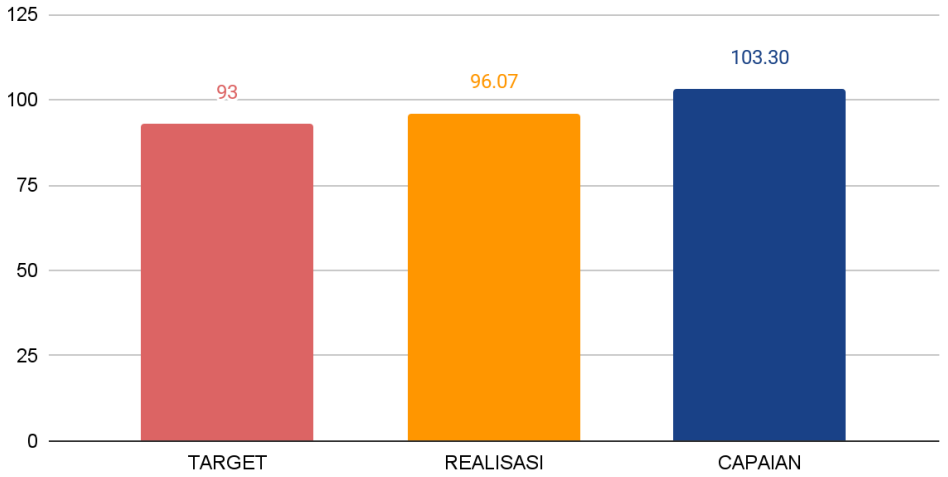
TABEL 3.1.31
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00%	96.07%	103.30%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target Tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 93 % dengan realisasi sebesar 96,07 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103,30 % dengan kriteria SANGAT BAIK.

Grafik 3.1.17
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

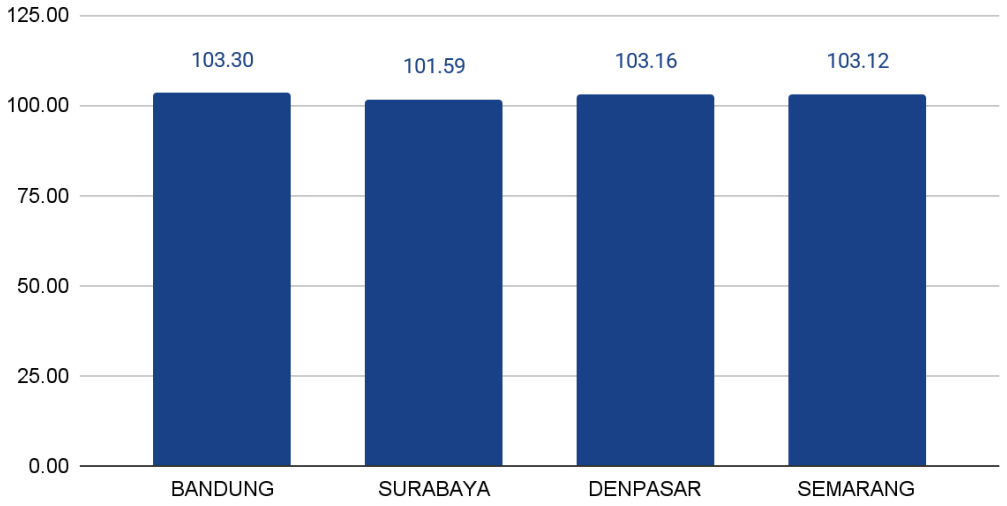
Target akhir tahun renstra yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 98%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target akhir RENSTRA tahun 2029, maka capaiannya sebesar 98,03% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.32
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2025 - 2029
PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

INDIKATOR	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98%	96,07%	98,03%	Akan Tercapai	▲

C. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Dalam Satu Kluster

Grafik 3.1.18
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka persentase Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang sebesar 99,77%, Balai Besar POM di Denpasar 98,39%, Balai Besar POM di Bandung sebesar 96,07%, dan Balai Besar POM di Surabaya sebesar 95,24%.

Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung 103,30%, Balai Besar POM di Denpasar sebesar 103,16%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 103,12%., serta Balai Besar POM di Surabaya 101,59%

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Terkait pemenuhan target pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan rencana kerja (renlak).

- Terkait kesesuaian Tindak lanjut dan akurasi kesimpulan hasil inspeksi, telah dilakukan komunikasi maupun peningkatan kompetensi petugas melalui sharing knowledge antar inspektur maupun pelatihan termasuk pelatihan melalui IDEAS, sehingga petugas dapat menerapkan ketentuan dalam pola tindak lanjut pengawasan.
- Terkait ketepatan dan kelengkapan pelaporan, berdasarkan hasil reviu, laporan yang disampaikan melalui SIPT sudah tepat dan lengkap.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Menyusun perencanaan pemeriksaan berbasis risiko sesuai juknis
2. Optimalisasi sumber daya pemeriksa dengan menyusun tim kerja, penjadwalan dan pengaturan beban kerja
3. Meningkatkan komunikasi maupun peningkatan kompetensi petugas melalui sharing knowledge antar inspektur
4. Monitoring progres capaian pemeriksaan setiap bulan dan triwulan pada aplikasi SIPT dan 1POM Jabar
5. Melakukan reviu hasil pemeriksaan dan tindak lanjut oleh supervisor independen

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan yang Efektif. Menyusun jadwal pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko masing-masing fasilitas untuk memastikan prioritas yang tepat. Selain itu Mengalokasikan tim pemeriksa sesuai dengan kompleksitas dan jumlah fasilitas yang akan diperiksa.
2. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi yang dapat berupa pelatihan internal dan eksternal
3. Penggunaan Teknologi Informasi dengan mengoptimalkan penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan 1POM Jabar untuk penyampaian tindak lanjut dan CAPA dari sarana yang diperiksa.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala. Melakukan penilaian rutin terhadap capaian kinerja individu dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

5. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi. Mengadakan pertemuan rutin antar tim pemeriksa untuk membahas progres dan kendala yang dihadapi.
6. Sharing knowledge antar inspektur untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
7. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain, baik melalui komunikasi formal dan informal.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.33
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.31 %	100.00%	1,03	0.03	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Pengawasan melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran,

pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C) dengan rincian sebagai berikut :

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

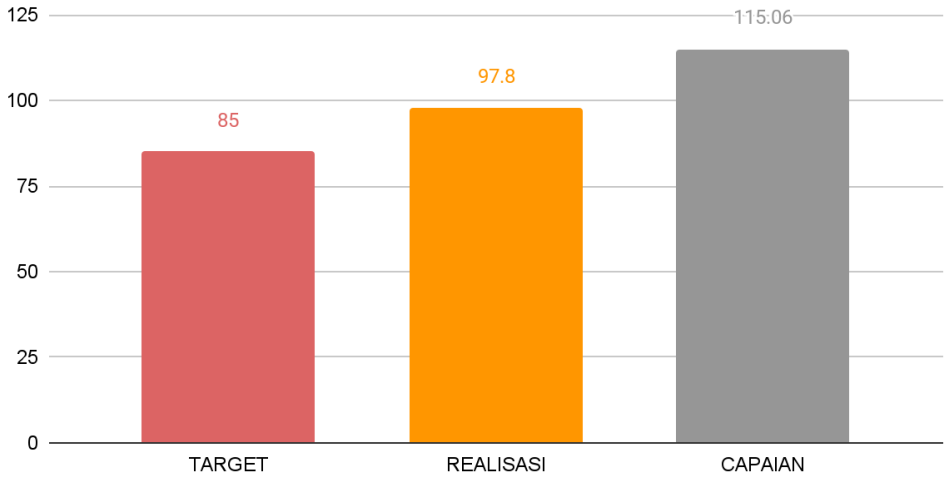
TABEL 3.1.34
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	97,80%	115.06%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target Tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 85 % dengan realisasi sebesar 97,80 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 115,06 % dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.

Grafik 3.1.19
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

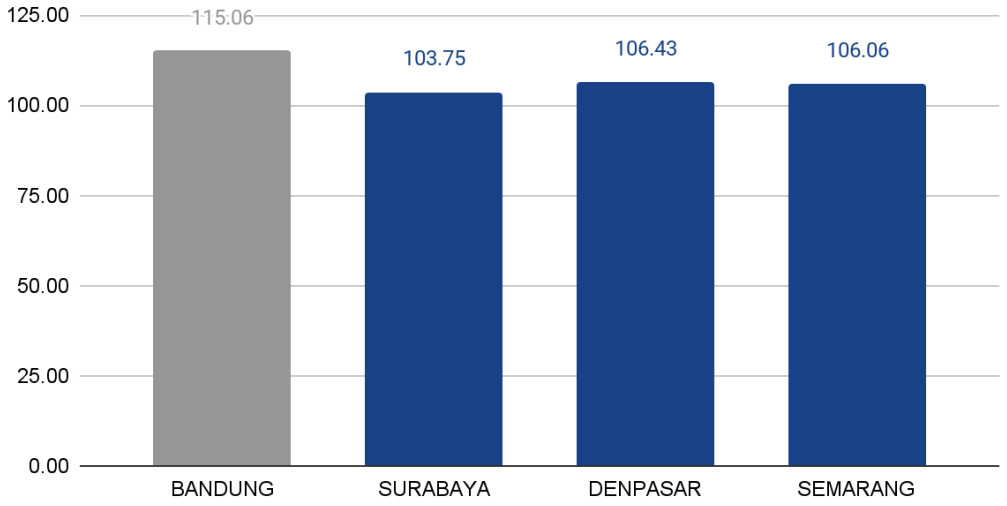
Target tahun akhir tahun renstra yang ditetapkan adalah sebesar 95.25%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target akhir RENSTRA tahun 2029, maka capaiannya sebesar 116,66% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

TABEL 3.1.35
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2029
PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95%	97,8%	114.89%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Dalam Satu Kluster

Grafik 3.1.20
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Denpasar sebesar 97,92%, Balai Besar POM di Bandung 97,80%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 84,85%, dan Balai Besar POM di Surabaya sebesar 83%.

Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung 110%, Balai Besar POM di Denpasar sebesar 106,43%, Balai Besar POM di Semarang 106,06% serta Balai Besar POM di Surabaya sebesar 103,75%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja kegiatan tersebut pada Triwulan III tahun 2024 disebabkan antara lain :

1. Perencanaan pengawasan berbasis risiko. Sarana distribusi diprioritaskan berdasarkan kategori risiko tinggi riwayat pelanggaran misalnya produk tanpa izin edar

2. Penggunaan sistem digital dalam pengawasan. Aplikasi Galura Inspeksi dan Satu POM Jabar mempermudah dalam dokumentasi, pelaporan dan pemantauan hasil inspeksi maupun tindakan perbaikan dan pencegahan
3. Pemantauan capaian kinerja secara berkala untuk dapat mendeteksi dini jika terjadi hambatan maupun penyimpangan

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana pemeriksaan berbasis risiko dan prioritas bulanan/triwulanan
2. Optimalisasi sumber daya pemeriksa (tim kerja, jadwal fleksibel, pengaturan beban kerja)
3. Monitoring rutin progres pemeriksaan dan evaluasi bulanan
4. Review hasil pemeriksaan dan tindak lanjut oleh supervisor
5. Pembinaan teknis kepada sarana untuk mengurangi kesalahan atau ketidakpatuhan berulang.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan yang Efektif dan berbasis risiko
2. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan internal dan eksternal
3. Penggunaan Teknologi Informasi dengan mengoptimalkan penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan aplikasi 1POM Jabar
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap capaian kinerja individu dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan
5. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi. Mengadakan pertemuan rutin antar tim pemeriksa untuk membahas progres dan kendala yang dihadapi
6. Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.36
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115,06%	99.78%	1.15	0.15	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

11. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

a. Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen kesehatan, dan Obat Kuasi.
b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada

pedoman dan SOP terkait.

e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.
g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = a+b/2
    a. Pemenuhan jumlah target pengawasan = Jumlah iklan yang selesai diawasi/Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak x 100%
    b. Ketepatan waktu pelaporan = Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/Jumlah target iklan yang diawasi x 100%
B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
    a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
    b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
    c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
    a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
    b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
    c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4). Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2. Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%. Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)
a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

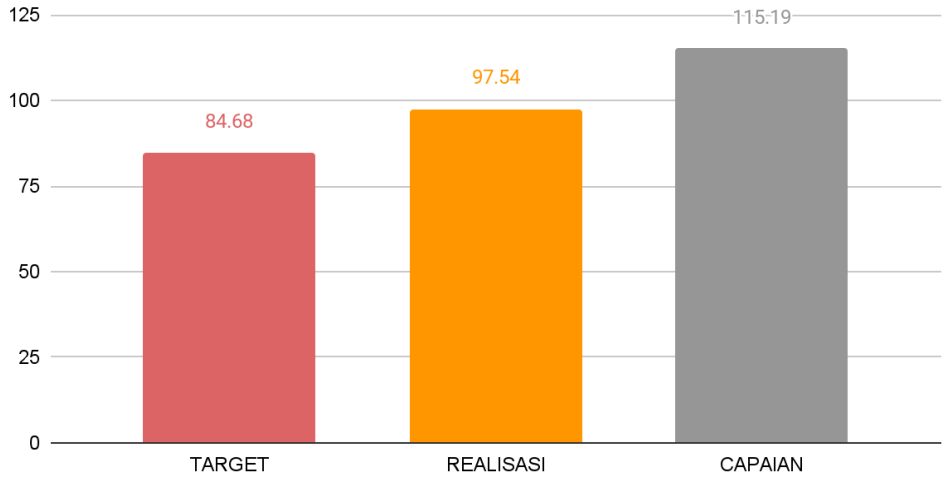
TABEL 3.1.37
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,68%	97,54%	115,19%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 97,54%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 115,19% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.

Grafik 3.1.21
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 84,68%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target akhir RENSTRA tahun 2029, maka capaiannya sebesar 105,70% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

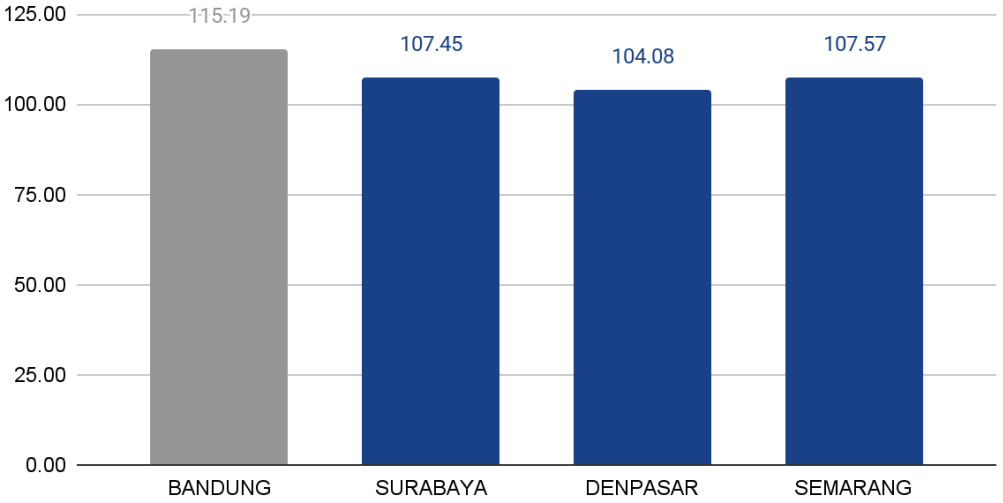
TABEL 3.1.38
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN AKHIR TAHUN RENSTRA 2029
PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	92,28%	97.54%	105.70 %	Tercapai/ Melampaui	▲

diawasi sesuai ketentuan					

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.22
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya sebesar 99,93%, Balai Besar POM di Denpasar sebesar 99,63%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 97,89% dan Balai Besar POM di Bandung 97,54%,

Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung 115,19%, Balai Besar POM di Surabaya 107,43%, Besar POM di Semarang sebesar 107,00% serta Balai Besar POM di Denpasar sebesar 104,08%. Dari capain tersebut, Balai Besar POM di Bandung masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan karena capaian >110%, sedangkan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Semarang masuk dalam kategori sangat baik. Capaian Balai Besar POM di Bandung tidak dapat disimpulkan salah satunya disebabkan oleh rendah nya target yang ditetapkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan IV tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Peningkatan kompetensi personil yang melakukan pengawasan iklan dengan melakukan kegiatan Sharing Knowledge Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam memberikan kesimpulan hasil pengawasan iklan.
- Peningkatan pemahaman dalam pelaporan hasil pengawasan iklan tepat waktu sesuai pedoman.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil pengawasan iklan.
- Melakukan monitoring timeline pelaporan SIPT Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
- Sharing knowledge antar personil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel.
- Peningkatan kompetensi personil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengadakan sharing knowledge tentang pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara internal yang diselenggarakan secara luring pada tanggal 9 Januari 2025.




Gambar 3.1.5 Kegiatan Sharing Knowledge Pengawasan Iklan untuk personil pengawasan Iklan di Sub Kelompok Inspeksi BBPOM Di Bandung

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.39
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	115.18%	100.00%	1.15	0.15	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

12. PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan

pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Pada tahun 2025 persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

TABEL 3.1.40
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR
PADA TAHUN 2025

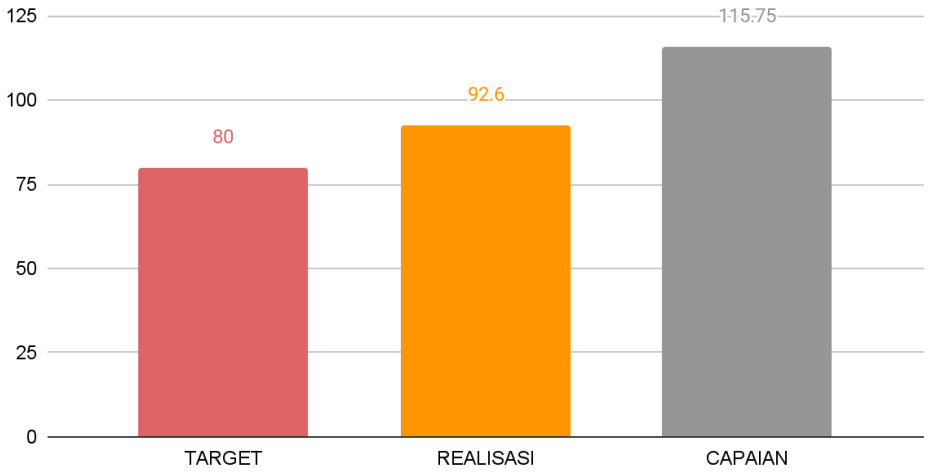
INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	80,00%	92.60%	115.75%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,00%. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar sebesar 92.60%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 115.75% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan

Grafik 3.1.23
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

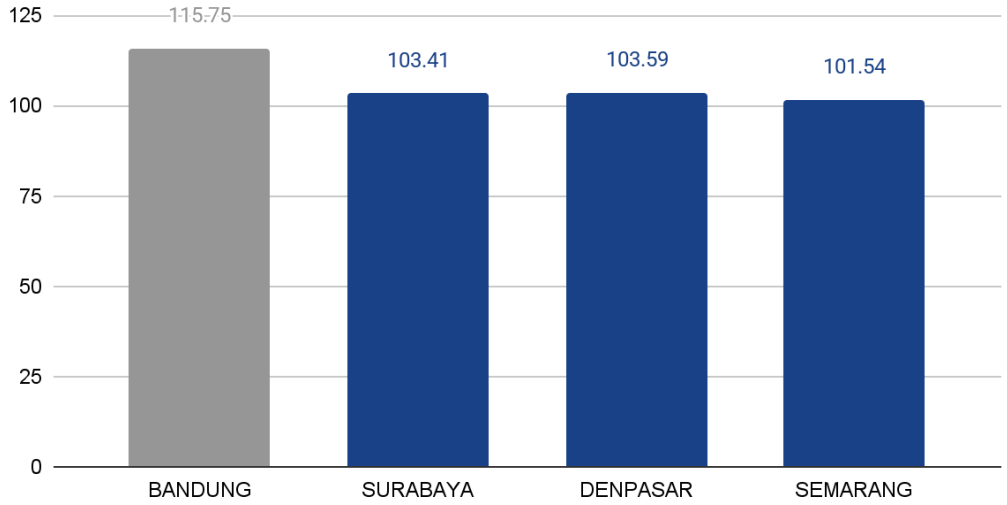
Target Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 84,00%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target akhir RENSTRA tahun 2029, maka capaiannya sebesar 110.24% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.41
PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR "
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	84,00%	92.60%	110.24%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain dalam Satu Kluster

Grafik 3.1.24
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Denpasar sebesar 94.90%, Balai Besar POM di Surabaya sebesar 94.10%, Balai Besar POM di Bandung 92.60%, dan Balai Besar POM di Semarang sebesar 92.40%. Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung 115.757%, Balai Besar POM di Denpasar sebesar 103.59%, Balai Besar POM di Surabaya 103.41%, dan Balai Besar POM di Semarang sebesar

101.54%. Dari capain tersebut, Balai Besar POM di Bandung masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan karena capaian >110%, sedangkan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Semarang masuk dalam kategori sangat baik. Capaian Balai Besar POM di Bandung tidak dapat disimpulkan salah satunya disebabkan oleh rendah nya target yang ditetapkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan IV tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Peningkatan kompetensi personil yang melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik dengan mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik kepada petugas Balai Besar POM di Bandung.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam memberikan kesimpulan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik
- Peningkatan pemahaman dalam pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik tepat waktu sesuai pedoman.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik
- Melakukan monitoring timeline pelaporan SIPT label produk tembakau dan/atau rokok elektrik

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

- Peningkatan kompetensi personil yang melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik dengan mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakan dan Rokok Elektronik kepada petugas Baai Besar POM di Bandung yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025 di Balai Besar POM di Bandung.



Gambar 3.1.6 Pemberian Arahan dan Pembukaan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dan suasana Bimtek Pengawasan Produk Tembakan dan Rokok Elektronik

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.42
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	115.75%	100.00%	1.16	0.16	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai ketentuan disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

13. PERSENTASE PEMENUHAN TARGET AMR DI WILAYAH UPT

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

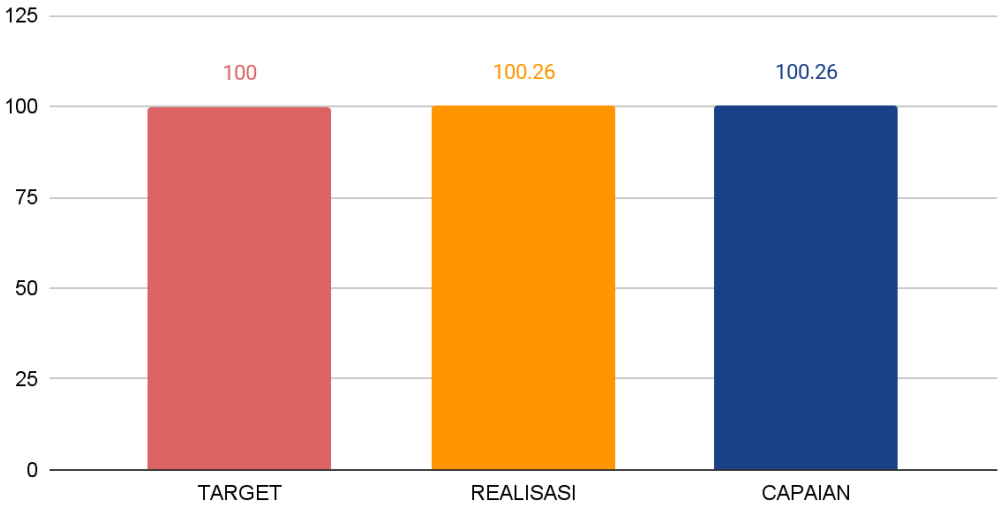
TABEL 3.1.43
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE PEMENUHAN TARGET AMR DI WILAYAH UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Pemenuhan Target AMR di Wilayah UPT	100%	100,26%	100,26%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target Tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100,26 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,26 % dengan kriteria SANGAT BAIK.

Grafik 3.1.25
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2029

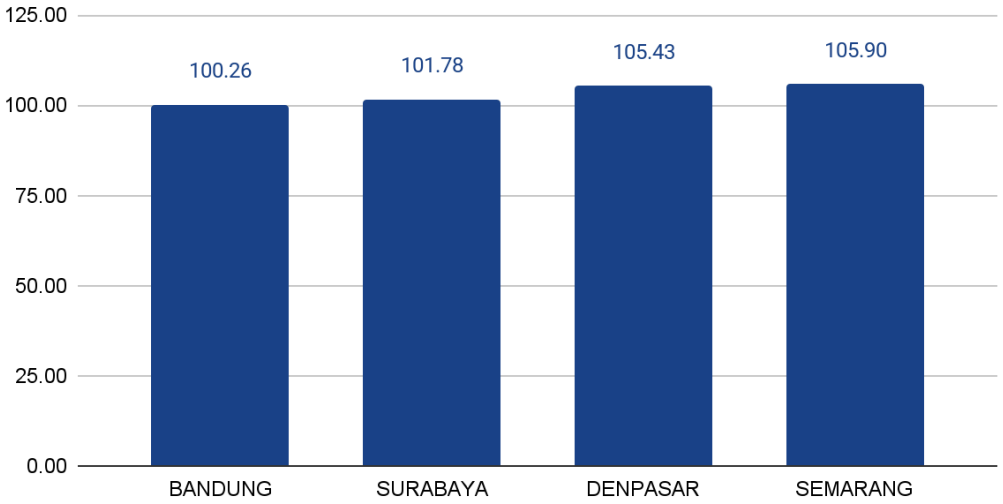
Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target akhir RENSTRA tahun 2029, maka capaiannya sebesar 100,26% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.44
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN AKHIR TAHUN RENSTRA 2025 - 2029
PERSENTASE PEMENUHAN TARGET AMR DI WILAYAH UPT

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2029	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Pemenuhan Target AMR di Wilayah UPT	100%	100,26%	100,26%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.26
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase Pemenuhan Target AMR di Wilayah UPT dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka persentase Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang sebesar 105,90%, Balai Besar POM di Denpasar 105,43%, Balai Besar POM di Surabaya sebesar 101,78%, dan Balai Besar POM di Bandung sebesar 100,26%.

Jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Semarang sebesar 105,90%, Balai Besar POM di Denpasar 105,43%, Balai Besar POM di Surabaya sebesar 101,78%, dan Balai Besar POM di Bandung sebesar 100,26%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Penyusunan perencanaan dalam pelaksanaan program bimtek dan publikasi yang tepat.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam penggunaan Antibiotik oleh masyarakat
- Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian IKU ini dilakukan secara rutin bulanan. Hal tersebut dapat mengantisipasi

permasalahan yang menjadi kendala serta menetapkan alternatif solusinya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Kerjasama/Kolaborasi yang baik dengan stakeholder pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan resistensi antimikroba.
2. Penyampaian informasi hasil pegawasan pemeriksaan sarana pelayanan apotek di wilayah catchment Jawa Barat.
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan perubahan pola pikir masyarakat dalam penggunaan obat antibiotik dan bahaya resistensi antimikroba
4. Pengendalian resistensi mikroba dengan Joint Inspection dalam pengawasan peredaran bahan obat dan atau obat jadi sektor kesehatan manusia yang beririsan dan digunakan dalam sektor hewan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Advokasi dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025



Gambar 3.1.7 Kegiatan Advokasi pengendalian antimikroba

- Kegiatan Bimtek yang dilakukan pada bulan September 2025 di Hotel Grandia



Gambar 3.1.8 Kegiatan Bimtek pengendalian antimikroba

- KIE di Karawang yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2025



Gambar 3.1.9 Kegiatan KIE pengendalian antimikroba

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.45
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE PEMENUHAN TARGET AMR DI WILAYAH UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Pemenuhan Target AMR di Wilayah UPT	100.26	98.72	1.02	0.02	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase Pemenuhan Target AMR di Wilayah UPT disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi

Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

14. NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Keputusan Kepala BPOM Nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM menetapkan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sebagai acuan dalam pemantauan dan pengendalian kapasitas serta kapabilitas laboratorium UPT BPOM. Standar Kemampuan Laboratorium mencakup empat komponen utama, yaitu standar ruang lingkup pengujian, standar peralatan laboratorium, standar kompetensi laboratorium, dan standar metode terverifikasi.

Standar ruang lingkup menetapkan jenis dan cakupan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai tingkat laboratorium; standar peralatan mengatur ketersediaan dan kecukupan peralatan utama serta penunjang; standar kompetensi laboratorium memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai untuk setiap parameter uji; serta standar metode terverifikasi yang mengatur penggunaan metode pengujian yang telah diverifikasi dan terdokumentasi guna menjamin validitas hasil pengujian.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 161 Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dikategorikan sebagai laboratorium Tingkat 3, dengan pemenuhan seluruh komponen Standar Kemampuan Laboratorium yang meliputi standar ruang lingkup, standar peralatan, standar kompetensi laboratorium, serta standar metode terverifikasi.

TABEL 3.1.46
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM
TAHUN 2025

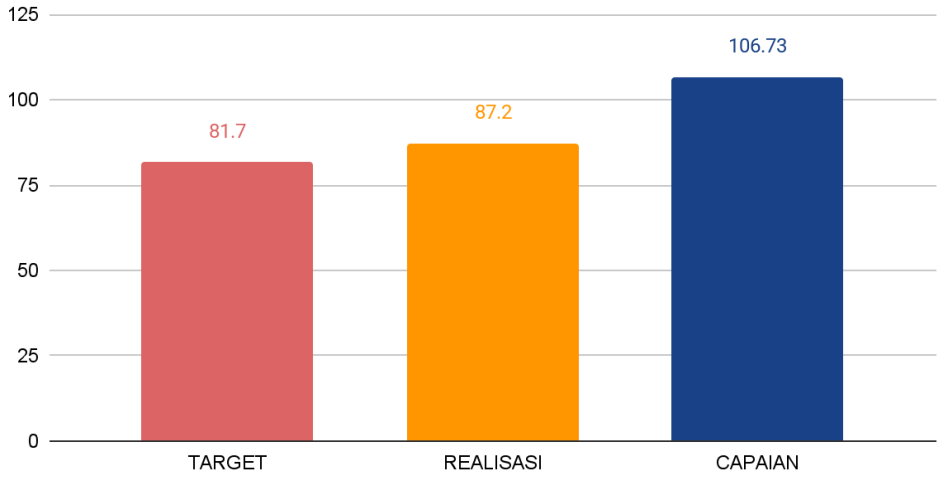
INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KRITERIA

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,70	87,20	106,73%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81,70. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 87,20. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 106.73% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.27
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2029

Target Renstra tahun 2029 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 92,70. Jika realisasi kinerja pada Tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 106.73 dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.47
PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET TAHUNAN

NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM TAHUN 2025

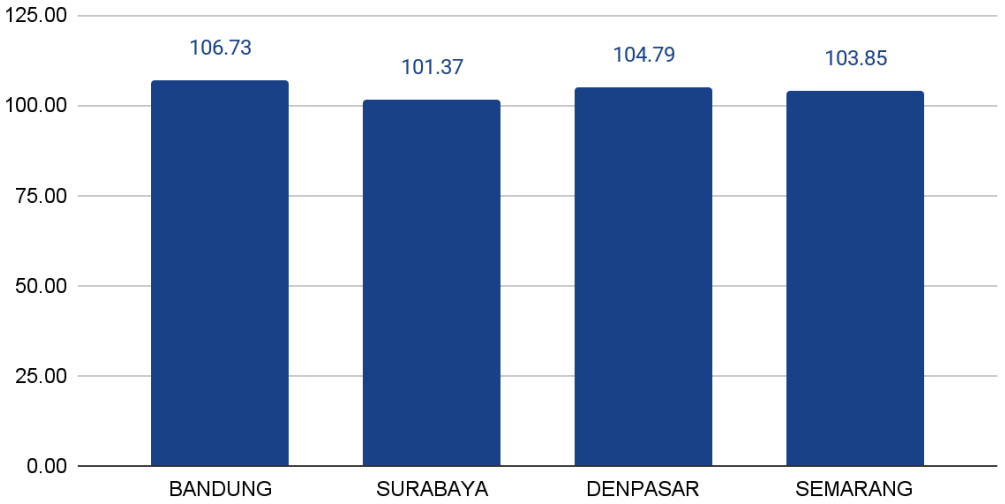
INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KATEGORI	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	92,70	87,20	94,07%	Akan Tercapai	

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Berdasarkan grafik perbandingan capaian antar satker dalam satu klaster menunjukkan bahwa realisasi kinerja BBPOM di Bandung sebesar 106,73%, lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Denpasar sebesar 104,79%, BBPOM di Semarang sebesar 103,85%, dan BBPOM di Surabaya sebesar 101,37%.

Target nasional indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 60,8. Berdasarkan realisasi capaian masing-masing satuan kerja, seluruh satker dalam klaster telah melampaui target nasional, BBPOM di Bandung dengan realisasi 87,2 mencapai 143,42% terhadap target nasional.

Grafik 3.1.26
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Pemenuhan SRL pada Tahun 2025 sebesar 88,4, SRL laboratorium kimia 84,70% dengan rincian laboratorium obat sebesar 77,60%, SRL laboratorium OBA dan SKOK sebesar 88,80%, SRL Laboratorium Kosmetik sebesar 95,00%, SRL laboratorium pangan sebesar 77,40%, dan SRL laboratorium mikrobiologi sebesar 92,00%.
2. Pemenuhan peralatan sebesar 89,90%, dengan rincian nilai pemenuhan peralatan kimia sebesar 92,4% dan pemenuhan peralatan mikrobiologi sebesar 87,4%.
3. Pemenuhan kompetensi laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi sebesar 90,0%.
4. Pemenuhan metode terverifikasi sebesar 70,80%, dengan rincian pemenuhan metode terverifikasi laboratorium obat sebesar 48,20%, SRL laboratorium OBA dan SKOK sebesar 52,90%, SRL Laboratorium Kosmetik sebesar 85,40%, SRL laboratorium pangan sebesar 74,30%, dan SRL laboratorium mikrobiologi sebesar 93,20%.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja) untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup : Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Laboratorium dilakukan melalui penyusunan **roadmap pemenuhan SRL** yang disesuaikan dengan identifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi masing-masing laboratorium. Upaya ini didukung dengan pelaksanaan verifikasi metode analisa secara bertahap, serta penetapan prioritas pemenuhan ruang lingkup berdasarkan kebutuhan pengawasan dan ketersediaan sumber daya.
2. Pemenuhan Kompetensi : Pemenuhan kompetensi dilakukan melalui penyusunan roadmap peningkatan kompetensi penguji, yang disesuaikan dengan kemampuan uji pada masing-masing laboratorium. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan teknis, pendampingan internal (coaching/mentoring), serta pemetaan kompetensi penguji untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi personel dan ruang lingkup pengujian yang dimiliki.
3. Pemenuhan Peralatan : Pemenuhan peralatan laboratorium dilakukan melalui penyusunan **roadmap penambahan peralatan baru serta perbaikan peralatan yang mengalami kerusakan**, dengan mempertimbangkan **prioritas kebutuhan pengujian dan beban penggunaan peralatan**. Selain itu, dilaksanakan **pemeliharaan dan kalibrasi peralatan secara berkala** untuk mendukung pemenuhan standar peralatan.
4. Pemenuhan metode terverifikasi : Membuat roadmap penambahan metode terverifikasi dan pelaksanaan verifikasi pada masing-masing laboratorium.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja :

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Untuk pemenuhan standar ruang lingkup pada tahun 2025 telah dilakukan verifikasi metode analisa sebanyak 26 parameter uji.
- Untuk pemenuhan kompetensi SDM tahun 2025, laboratorium obat, obat bahan alam, suplemen Kesehatan dan obat kuasi, laboratorium kosmetik dan mikrobiologi sudah memenuhi kedua aspek penilaian kompetensi. Sedangkan laboratorium pangan belum memenuhi aspek 2 penilaian kompetensi.
- Untuk pemenuhan metode analisa terverifikasi pada tahun 2025

Laboratorium Obat sebanyak 16 Metode Analisa, laboratorium OBA, SK dan Kuasi sebanyak 6 metode analisa, laboratorium kosmetik 13 Metode Analisa, laboratorium Pangan sebanyak 6 Metode Analisa, dan laboratorium mikrobiologi sebanyak 1 Metode Analisa.

- Kegiatan Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Kimia Obat-Nappza Verifikasi Metode Penetapan Kadar Sediaan Obat sesuai PERBPOM 10 Tahun 2025 dan Penilaian Kewajaran Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran; Laboratorium Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi Verifikasi MA Logam Berat Pb, Cd, As secara AAS-GFA MA 09/OT-PK/15 (Sediaan Cair) dan 28/OTSK/MA-PPPOMN/18 : (Sediaan Padat); Laboratorium Kosmetik Identifikasi Acid Yellow 11 (CI 18820) dan Metanil Yellow (CI 13065) dalam Kosmetik Sediaan Semi Solid secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-PDA (MA 77/KO/MA-PPOMN/21); laboratorium pangan Penetapan Kadar Asetaldehid pada Kemasan Pangan dengan metode GCMS, yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 29 Agustus 2025. Bimbingan Teknis Internal laboratorium Mikrobiologi Uji Potensi Pada Sediaan Oral Bentuk Tablet Obat yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 18 Juli 2025.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.48
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan	106,73%	99.91%	1,07%	0,07%	Efisien

Laboratorium					

Berdasarkan tabel diatas, indicator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

15. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
   a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
   b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
   c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
   a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
   b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)
4. Cara Perhitungan dan Formulasi :
   a. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
   b. Merupakan Kab/Kota di lingkup wilayah kerja UPT
   c. Jumlah target dihitung secara kumulatif
   d. Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Kabupaten/Kota Pangan AmanTahun 2025

No	Tahapan	Timeline

1	Advokasi ke Seluruh Kabupaten/Kota	Minggu ke 3 - 4 Bulan Juli
2	Penyeleksian Kabupaten/Kota yang akan didampingi	Minggu ke 3 - 4 Bulan Juli
3	Pendampingan	Minggu ke 4 Juli - Minggu ke 4 September
4	Pelaporan	Minggu ke 5 Bulan September

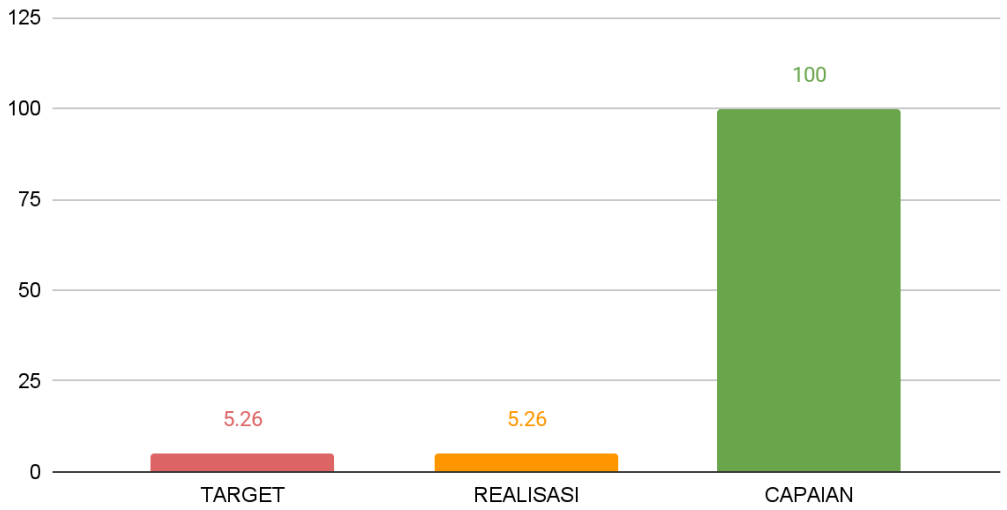
TABEL 3.1.49
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KRITERIA	
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.26	5.26	100.00	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 5.26. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sebesar 5.26. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100.00% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.29
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2029

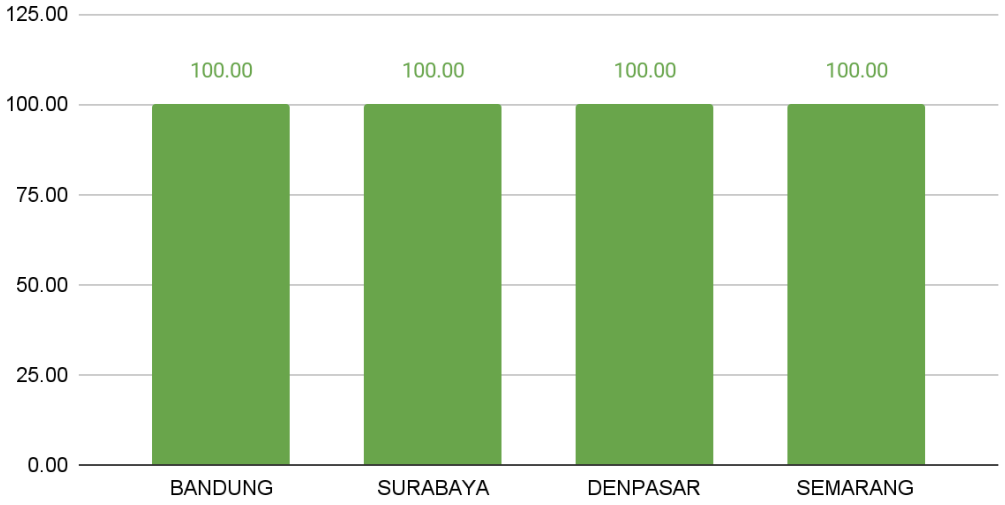
Target akhir tahun Renstra yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 63,16. Jika realisasi kinerja pada Tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 8.33 dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.50
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KATEGORI	
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	63.16	5.26	8.33%	Perlu Upaya Keras	▼

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.30
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Berdasarkan grafik perbandingan capaian antar satker dalam satu klaster menunjukkan bahwa realisasi kinerja BBPOM di Bandung sama dengan BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Semarang yaitu 100%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Upaya

Analisis keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Adanya dukungan dan komitmen dari kepala daerah beserta organisasi perangkat daerah terkait dalam mengikuti Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tahapan pendampingan sesuai dengan juknis yang ditetapkan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap progres yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota yang didampingi dalam pengisian tools.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan OPD dan Badan POM apabila terdapat kendala dalam pengisian tools.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara

lain :

1. Pelaksanaan pendampingan dilakukan sejak awal tahun agar waktu pendampingan lebih lama dan tidak terburu-buru.
2. Peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman
3. Mengusulkan anggaran dari RO khusus untuk kegiatan pendampingan Kabupaten/kota pangan aman

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja :

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

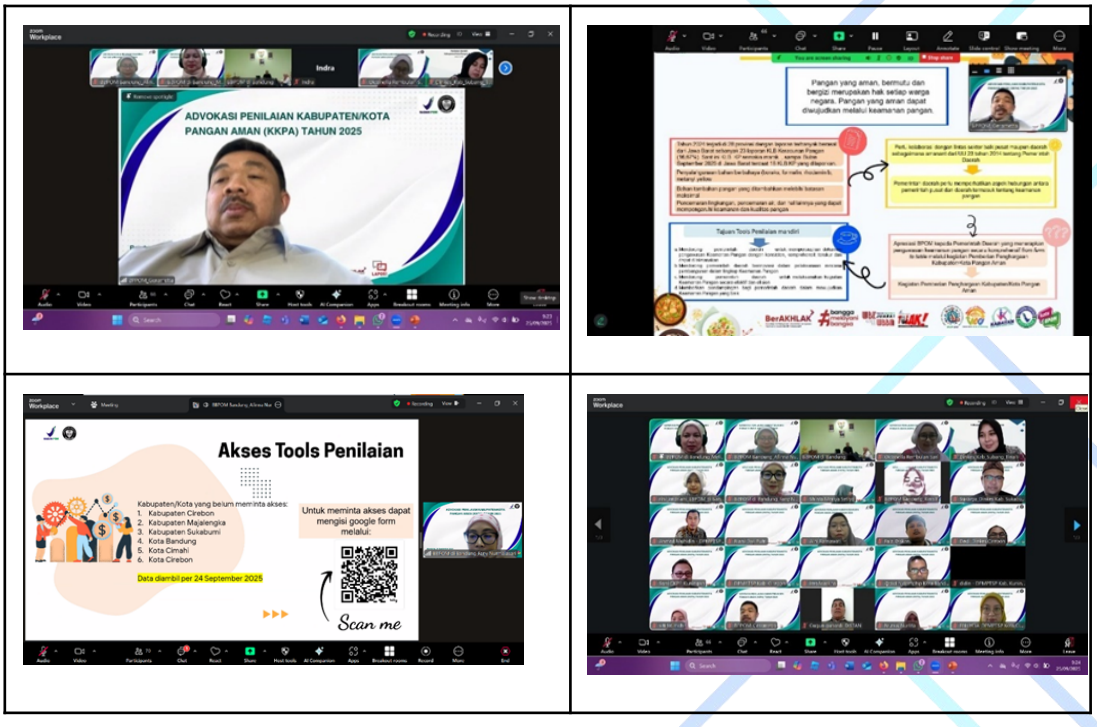
1. Audiensi dan Advokasi dengan Lintas Sektor di Kabupaten Garut tanggal 29 Juli 2025



2. Audiensi dan Advokasi dengan Lintas Sektor di Kabupaten Cianjur tanggal 26 Agustus 2026



3. Advokasi dan Sosialisasi Kabupaten/Kota Pangan Aman tanggal 25 September 2025



E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.51

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100.00%	99.95%	1.00	0.00	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-2 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100.25% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.52.

TABEL 3.1.52
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-2
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57,00%	57.14%	100.25%	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.25%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji

sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

TABEL 3.1.53
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

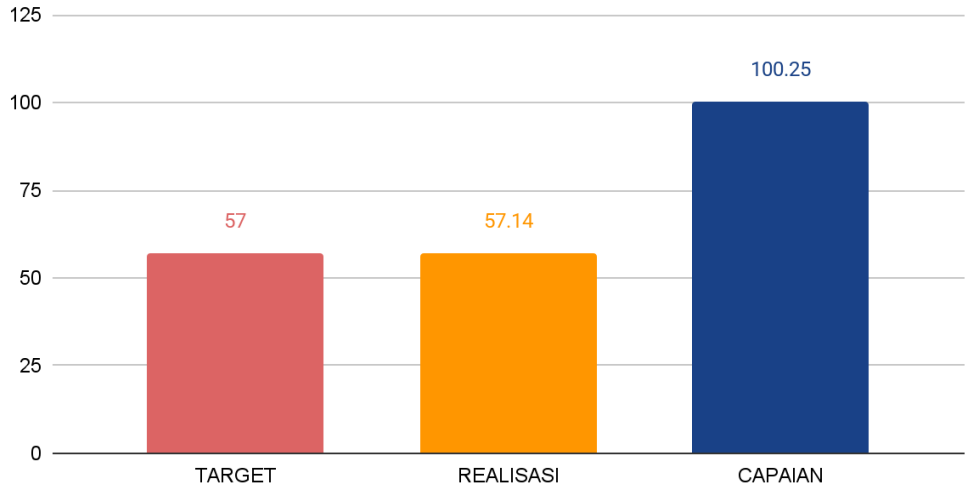
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57,00%	57.14%	100.25%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 57,00%. Jumlah sarana pangan fortifikasi yang berada di cakupan pengawasan Balai Besar POM di Bandung adalah sebanyak 63 sarana. Pada tahun 2025, sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 36 (tiga puluh enam) sarana, sehingga persentase

cakupan sebesar 57.14%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100.25% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.31
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Terget Renstra 2029

Target akhir tahun Renstra 2029 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 75,00%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target akhir RENSTRA tahun 2029, maka capaiannya sebesar 76.19% dengan kategori AKAN TERCAPAI.

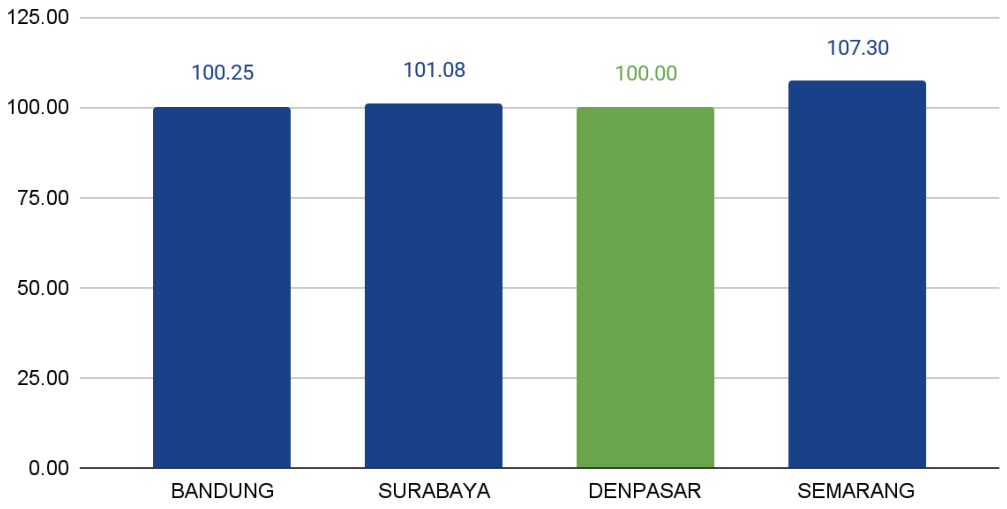
TABEL 3.1.54
PERBANDINGAN REALISASI TARGET TAHUNAN DIBANDINGKAN AKHIR TAHUN RENSTRA 2025 - 2029
PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

INDIKATOR	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	75,00%	57.14%	76.19%	Akan Tercapai	▲

ditindaklanjuti sesuai ketentuan					

C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN DALAM SATU KLUSTER

Grafik 3.1.32
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang sebesar 100,00%, Balai Besar POM di Bandung 99,56%, Balai Besar POM di Surabaya sebesar 98,25%, dan Balai Besar POM di Denpasar sebesar 95,23%.

Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya 100,87%, Balai Besar POM di Denpasar sebesar 100,81%, Balai Besar POM di Bandung 100,57% serta Balai Besar POM di Semarang sebesar 100,00%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Penyusunaan kajian resiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penyusunan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur CPPOB sebanyak 39 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Madya, Muda dan Pertama.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corective Action dan Preventive Action (CAPA).
- Koordinasi internal antara tim inspeksi dengan tim pengujian terjalin dengan baik, sehingga pengawalan kegiatan ini berjalan sesuai dengan perencanaan dan tindak lanjut terhadap hasil pengujian produk fortifikasi dapat dilaksanakan dengan tepat.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisis adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

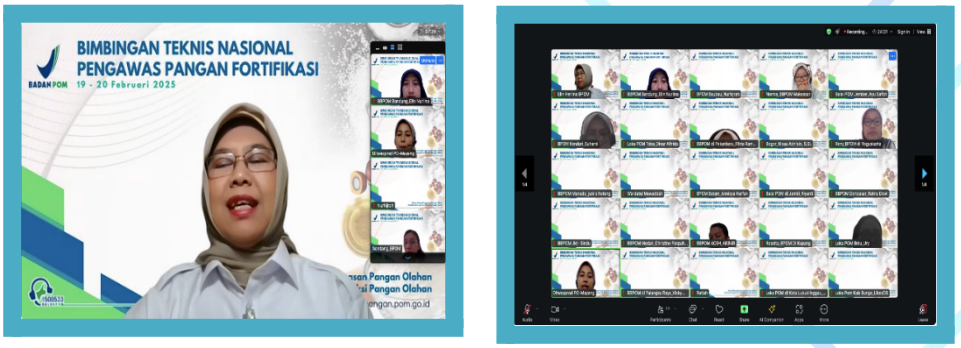
Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.



Gambar 3.1.6 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
- Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
- Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Fortifikasi yang diselenggarakan oleh PPSDM POM Bersama Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan.



Gambar 3.1.7 Bimbingan Teknis Nasional Pengawasan pangan fortifikasi

- Koordinasi lintas sektor, terutama dengan instansi yang berkaitan dengan pangan fortifikasi, antara alain dengan Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, pada tanggal 24 November 2025. Pada pertemuan tersebut disampaikan hasil pengawasan pangan fortifikasi termasuk hasil pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya.





Gambar 3.1.7 Koordinasi dengan Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.55
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.25.00 %	99.99%	1.00	0.00	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-3 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100.85 dengan kriteria SANGAT BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.56.

TABEL 3.1.56
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-3
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86,94	89.89	103.39	Sangat Baik	
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (SAPA Sekolah)	17	17	100.00	Baik	
3. Jumlah desa pangan aman	6	6	100.00	Baik	
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.85	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

   Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan

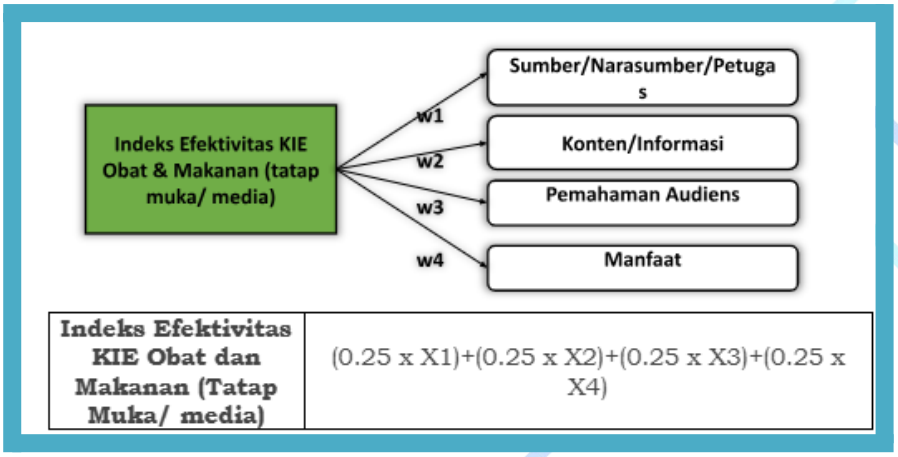
kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online* survey. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Gambar 3.1.8 Rumus Indeks Efektifitas KIE

TABEL 3.1.57

KATEGORI TINGKAT EFEKTIVITAS KIE

SKOR INDEKS 100	INTERPRETASI EFEKTIVITAS
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif

TABEL 3.1.58

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

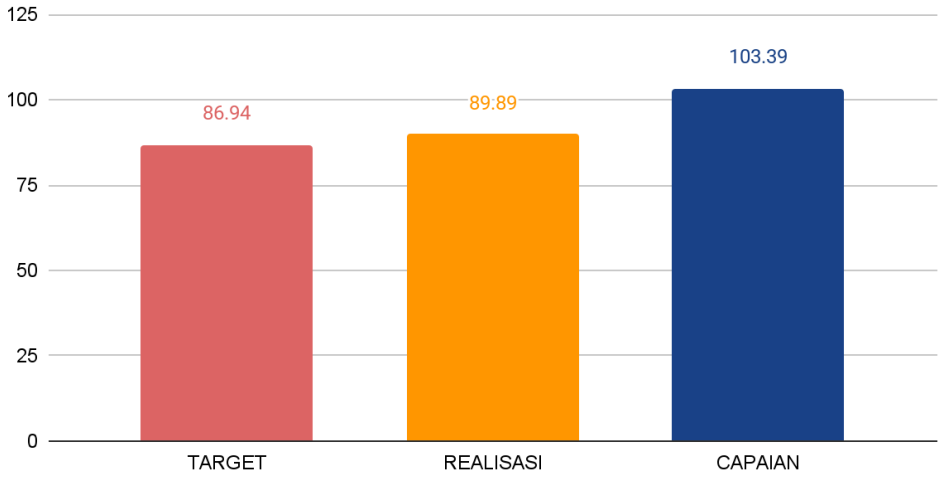
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86,94%	89.89	103.39	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

PadaTahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86,94%. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung sebesar 89.89%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 103.39% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.33
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

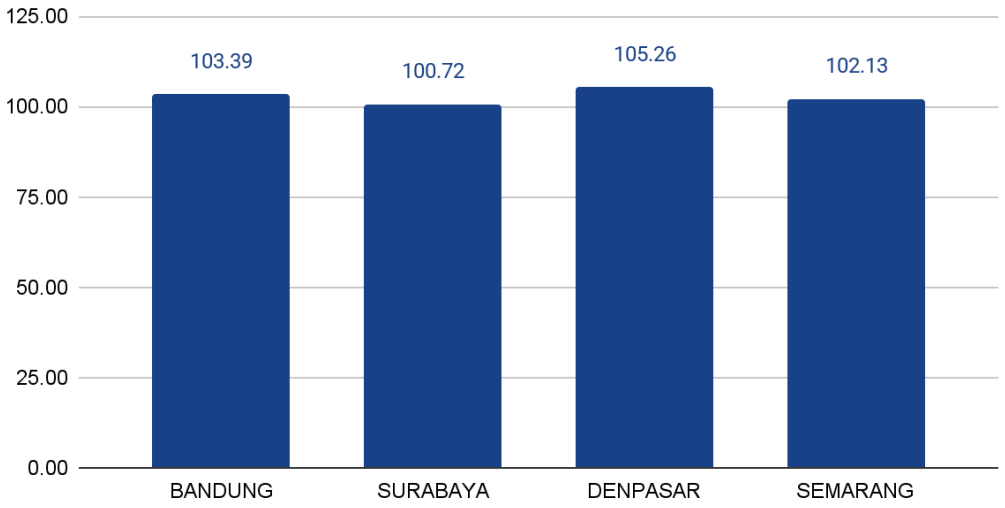
Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 86,94%. Jika realisasi kinerja pada TA 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada TA 2025 sebesar 100,43% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.59
PERBANDINGAN REALISASI 2025 3 DENGAN TARGET RENSTRA 2029
TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	90.42%	89.89%	99.41%	Akan Tercapai	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.34
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung tahun 2025 dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Denpasar sebesar 1005.26%, Balai Besar POM di Bandung 103.39%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 103.39% dan Balai Besar POM di Surabaya sebesar 100.72%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat
2. Melakukan KIE melalui subsite BBPOM Bandung dan sosial media melalui infografis dan video grafis yang menarik di Instagram secara masif dengan topik yang terjadwal
3. Melakukan KIE melalui Media Luar Ruang
4. Melakukan KIE melalui Media Cetak

5. Melakukan KIE melalui SMS Blast
6. Melakukan KIE melalui Iklan Layanan Masyarakat
7. Melakukan KIE bekerjasama dengan Pramuka
8. Melakukan KIE bekerjasama dengan Universitas
9. Membuat link survey yang mudah diakses oleh responden.



Gambar 3.1.9 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada tanggal 05 Agustus 2025



Gambar 3.1.10 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada tanggal 05 Agustus 2025



Gambar 3.1.11 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada tanggal 08 September 2025



Gambar 3.1.12 KIE melalui Sosial Media bulan Juli 2025



Gambar 3.1.13 KIE melalui Sosial Media bulan Agustus 2025



Gambar 3.1.14 KIE melalui Sosial Media bulan September 2025



Gambar 3.1.15 KIE melalui Media Luar Ruang pada Bulan Maret 2025


GALAPERSIB

Lima Pemain Asing Sepakat Gabung

Umuh : Ada dari Prancis, Brasil, dan Argentina

Bojan Hodak Siapkan Program Musim Depan

UMUH MUCHTAR

GALASOREANG

Balas Dendam Berujung Kematian

Dianiaya Tiga Pemuda, Remaja 16 Tahun Alami Luka Tusuk di Kepala

Info Warga

Kang DS Jabat Ketua Harian Aplasi

Program Kampung Tertib Adminduk

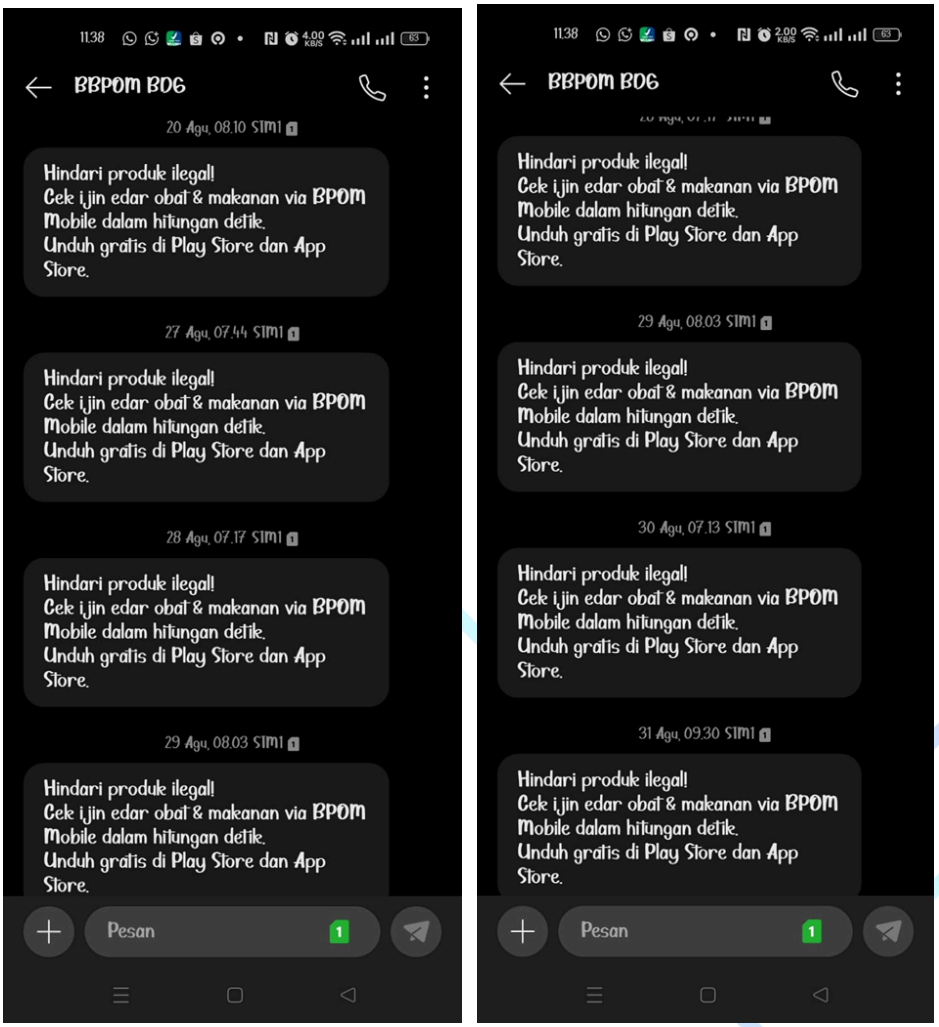
100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bandung Bandung

Jamparing Soroti Pembangunan Infrastruktur

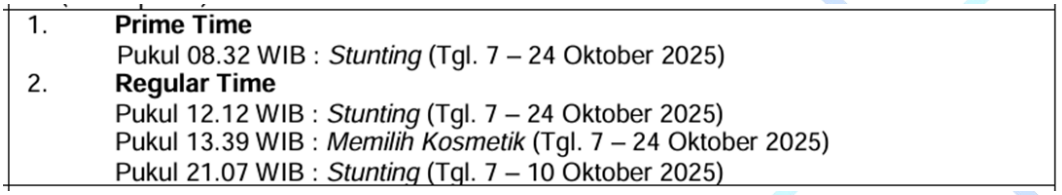
REKAPITULASI PENGADUAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2024

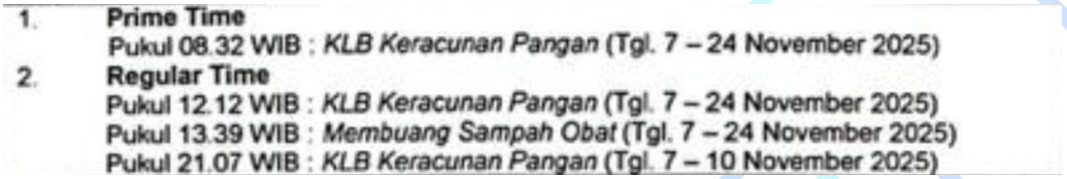
MEIRIAH

Gambar 3.1.15 KIE melalui Media Cetak pada bulan Juni 2025



Gambar 3.1.15 KIE melalui Media SMS Blast pada Bulan Agustus 2025





Gambar 3.1.15 KIE melalui Iklan Layanan Masyarakat pada bulan Oktober dan November 2025



Gambar 3.1.16 Kegiatan Penyebaran Informasi bersama Universitas Padjajaran 29 September 2025



Gambar 3.1.17 Kegiatan Penyebaran Informasi bersama Pramuka Kabupaten Garut 18 Oktober 2025

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatkan cakupan KIE yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas sektor/lembaga lain

2. Melaksanakan KIE melalui webinar tentang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas.
3. Melaksanakan KIE secara merata di seluruh wilayah BBPOM di Bandung secara komprehensif
4. Menjaga konsistensi kegiatan melalui media social

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Melakukan survei efektivitas KIE secara periodik kepada responden yang telah menerima KIE
2. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleansing data jika terdapat data responden ganda.
3. Memberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner efektivitas KIE kepada responden sebelum dilakukan survei efektivitas KIE untuk memastikan pertanyaan pada kuesioner dapat dipahami dengan benar oleh responden
4. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
5. Meningkatkan inovasi pengelolaan media sosial termasuk mengenali karakter/algoritma dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.60
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	103.39%	99.77%	1.04	0.04	Efisien

wilayah kerja BBPOM di Bandung					

Berdasarkan tabel diatas, indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

2. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan program yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

a. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
b. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
c. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
    1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
    2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
    3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. BBPOM di Bandung melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Apabila Kabupaten/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi yang berjumlah 17 sekolah dengan tahapan :
   1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
   4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

   Jumlah sekolah yang akan akan dikawal pada tahun 2025 adalah 26 sekolah dari 3 kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kota Bekasi.

b. Sekolah Perluasan merupakan sekolah yang mendapatkan sosialisasi Keamanan Pangan di luar dari sekolah yang mendapatkan full intervensi. Target jumlah sekolah perluasan yang mendapatkan sosialisasi Keamanan Pangan yaitu 60 sekolah dan pada tahun 2025 dilaksanakan pada 63 sekolah.

TABEL 3.1.61

Tahapan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Tahapan	UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2-4)
	100%	

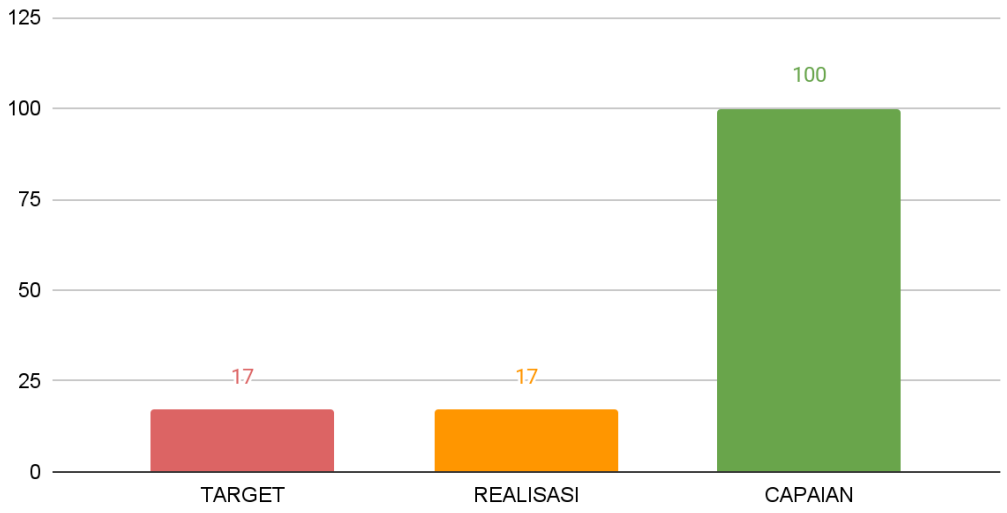
TABEL 3.1.62
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Jumlah sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	17	17	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 17 Sekolah. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sejumlah 17 Sekolah (Progres 100%). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.35
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 3.1.63

Progress Pelaksanaan Kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025

Kegiatan		Pembobotan *Progress* (%)	Progres (Capaian DJA)				Total *Progress*
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25	20	5	0	0	25
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20	0	20	0	0	20
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25	0	0	25	0	25
4	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	0	0	0	25	25
5	Pengawalan	5	0	5	0	0	5
Total Skor		100	20	30	25	25	100

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebanyak 17 sekolah. Selain sekolah yang mendapatkan intervensi seluruh tahapan, terdapat juga target perluasan sekolah yang mendapatkan sosialisasi terkait keamanan pangan sebanyak 60 sekolah, sedangkan realisasi sekolah yang mendapatkan sosialisai keamanan pangan sebanyak 63 sekolah.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

Target akhir tahun Renstra yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 26 sekolah. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target tahun 2029, maka capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 65,38% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

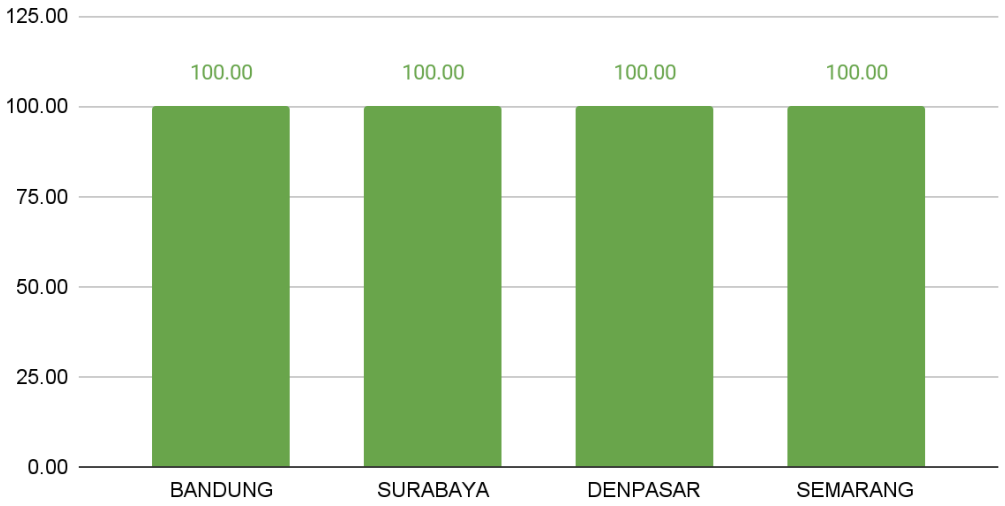
TABEL 3.1.64
PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET TAHUNAN SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KATEGORI	
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	26	17	65,38%	Perlu Upaya Keras	▼

Realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra karena target Renstra tahun 2029 bukan merupakan jumlah akumulasi dari 1 periode Renstra.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.36
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Pada tahun 2025 target Tahapan Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang ditetapkan pada indikator sasaran adalah 100%, BBPOM di Bandung melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan target yang diberikan dengan nilai capaian realisasi 100% sama

dengan BBPOM di Surabaya, Denpasar dan Semarang. Dengan capaian yang sama namun memiliki perbedaan jumlah target sekolah. Pada tahun 2025, BBPOM di Surabaya memiliki target 19 sekolah, BBPOM di Semarang memiliki target 20 sekolah, BBPOM di Denpasar 13 sekolah, dan BBPOM Bandung memiliki target 17 sekolah.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaksanaan setiap tahapan kegiatan agar dilaksanakan sesuai juknis dan timeline yang ditetapkan.
- Adanya dukungan, kolaborasi dan kerja sama yang baik antara BBPOM di Bandung dengan Pemerintah Daerah khususnya dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk turut bersinergi mewujudkan program keamanan pangan.
- Adanya komitmen dari sekolah dan tim keamanan pangan sekolah yang diintervensi dalam melaksanakan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Kolaborasi antara BBPOM di Bandung dengan Dinas Kesehatan kabupaten kota setempat terkait pengawasan obat dan makanan
2. Koordinasi antara BBPOM di Bandung dengan Dinas pendidikan kabupaten kota setempat untuk melaksanakan program yang telah direncanakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Publikasi ke sekolah-sekolah melalui berbagai platform media sosial untuk menyebarluaskan informasi seputar kegiatan sosialisasi
4. Partisipasi Aktif komunitas sekolah (Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan pengelola kantin) sesuai perannya masing-masing dalam mengikuti seluruh tahapan mulai dari sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan, monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

5. Kreatifitas sekolah dalam membuat inovasi untuk membudayakan keamanan pangan di sekolah
6. Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan ini sinergis dengan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sehingga pengetahuan yang dimiliki sekolah tentang pangan yang aman dapat diaplikasikan dalam program tersebut.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

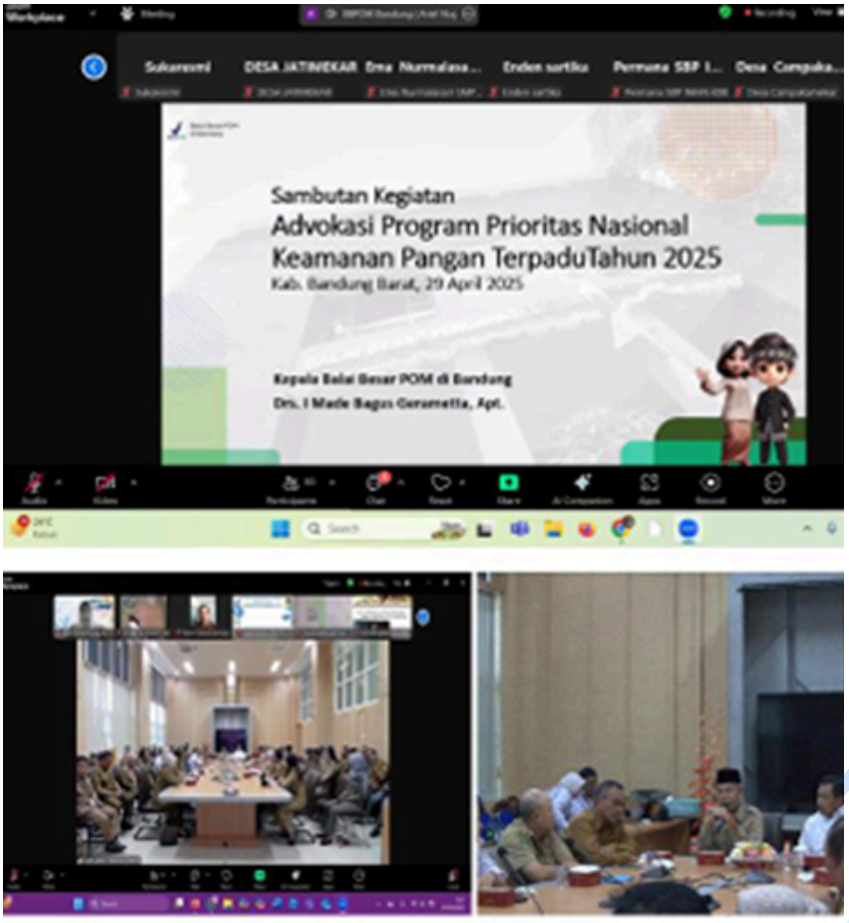
Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah

   Kegiatan advokasi dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat Lantai 1 Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Advokasi dihadiri oleh Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail beserta organisasi pemerintah daerah terkait yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Kesejahteraan Rakyat, Dinas P2KBP3A, Dinas PMPTSP, serta calon desa, pasar dan sekolah yang diintervensi.



Gambar. 3.1.20 Penandatanganan Komitmen



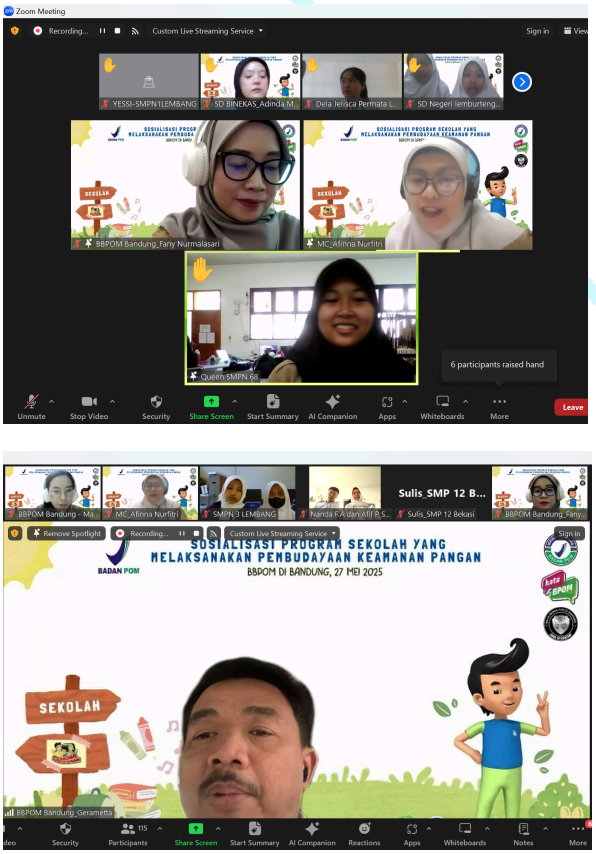
Gambar. 3.1.20 Sambutan dan Pemaparan Materi



Gambar. 3.1.20 Diskusi dan Sikronisasi Kegiatan

2. Sosialisasi Keamanan Pangan dan Pengawalan Sekolah

Sosialisasi Program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 yang diikuti oleh 90 sekolah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cianjur, Kabupaten Subang dan Kota Bekasi yang terdiri dari 17 sekolah yang diintervensi tahun 2025, 60 sekolah sekolah sebagai target perluasan dan 26 sekolah yang diintervensi tahun 2024



Gambar 3.1.16 Sosialisasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan secara Daring

3. Bimtek KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah Tahun 2025 pada Selasa, 29 Juli 2025. Bertempat di Aula PGRI Kabupaten Bandung Barat, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, serta komunitas

sekolah dari 17 sekolah yang tersebar di Kabupaten Bandung Barat. Para peserta terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Pengelola Kantin, Komite Sekolah, hingga orang tua siswa.





Gambar 3.1.17 Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan di Gedung PGRI Padalarang Kabupaten Bandung Barat

4. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

   Kegiatan Monitoring dan Sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2025 untuk 17 sekolah di Kabupaten Bandung Barat yang telah diintervensi. Kegiatan ini merupakan tahap akhir pelaksanaan Program Prioritas Nasional Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.





Gambar 3.1.18 Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

5. Workshop Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu

   Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 yang yang bertempat di Pakuhaji Highland Eco-Resort Bandung Barat Pakuhaji Tonggoh, Pakuhaji, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang dihadiri oleh 17 perwakilan sekolah yang diintervensi di Kabupaten Bandung Barat dan lintas sektor dari pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.







Gambar 3.1.18 Penyerahan Sertifikat kepada Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.65
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100.00%	99.68%	1.00	0.00	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Jumlah sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan aman disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

a. kader keamanan pangan desa yang aktif
b. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
c. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Hasil dari keseluruhan proses Audiensi dan Advokasi dengan pihak Pemda Kabupaten/Kota yang diintervensi, Desa yang diintervensi di Kabupaten Bandung Barat meliputi 3 Desa di Kecamatan Lembang yaitu Desa Lembang, Desa Cikahuripan dan Desa Jayagiri dan 3 Desa di Kecamatan Padalarang yaitu Desa Kertajaya, Desa Kertamulya dan desa Campakamekar.

TABEL 3.1.66
TAHAPAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
4.	Monev	20%	Juli atau November
5.	Pengawalan	10%	Februari - November
	Total Skor	100%	

Pada tabel tahapan kegiatan program desa pangan aman tahun 2025 di atas, terdapat pengurangan 4 tahap kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya di mana pada tahun sebelumnya terdapat kegiatan Pengadaan paket informasi keamanan pangan termasuk rapid test kit, fasilitasi keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan serta lomba desa pangan aman. Nilai pembobotan tertinggi di setiap tahuannya terdapat pada tahapan advokasi kelembagaan desa. Komitmen dari Pemda dan OPD setempat sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan program desa pangan aman.

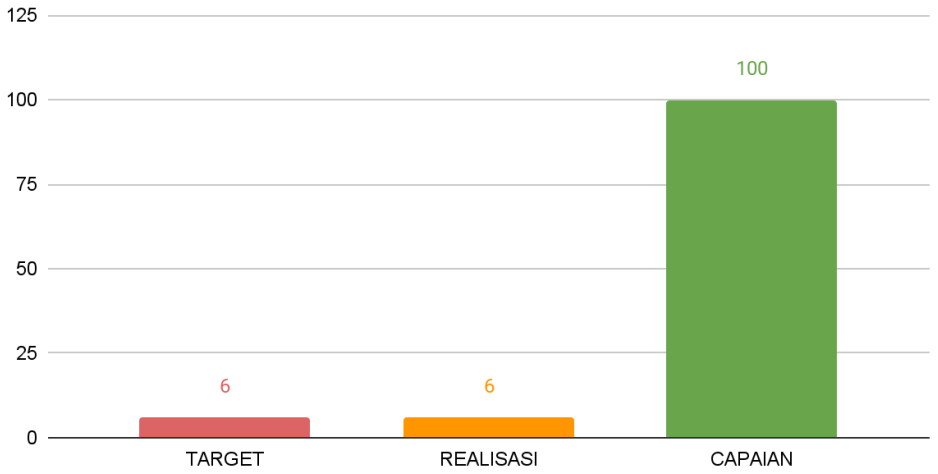
TABEL 3.1.67
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
JUMLAH DESA PANGAN AMAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Jumlah Desa Pangan Aman	6	6	100%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 6 desa. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 6 desa. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.37
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



TABEL 3.1.68
JUMLAH DESA PANGAN AMAN TAHUN 2025

Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Keterangan
Bandung Barat	6	Desa Lembang, Desa Cikahuripan, Desa Jayagiri, Desa Kertajaya, Desa Kertamulya dan Desa Campakamekar

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 6 desa. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100.00% dengan kategori Tercapai.

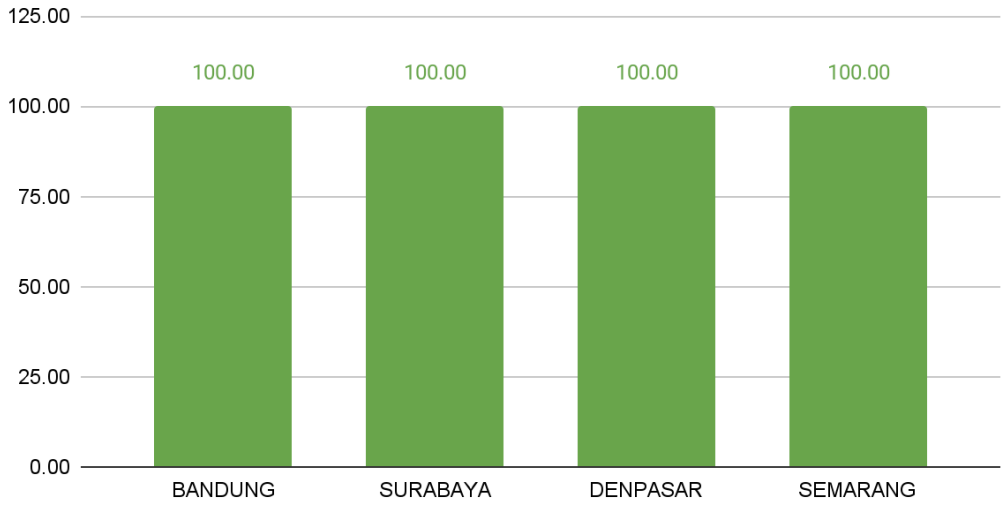
Target akhir tahun renstra yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 10 desa. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap akhir renstra tahun 2029, maka capaiannya sebesar 60,00% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.69
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA
JUMLAH DESA PANGAN AMAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Jumlah Desa Pangan Aman	10	6	60,00%	Perlu Upaya Keras	▼

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/ Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.38
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



	Bandung	Semarang	Surabaya	Denpasar
Capaian	6	6	6	4
Realisasi	100%	100%	100%	100%

Pada TA 2025, seluruh satker pada satu klaster memiliki capaian yang sama yaitu 100%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja disebabkan karena :

- Secara prinsip Perencanaan Pelaksanaan Desa Pangan Aman dilaksanakan sesuai dengan juknis dan timeline yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tahapan kegiatan yang dilakukan secara langsung/ tatap muka akan mempermudah interaksi dengan perangkat desa serta kader keamanan pangan desa

- Koordinasi dengan Pemda setempat dan OPD terkait di kabupaten/ kota berjalan baik menyebabkan semua rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu.
- Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemda di kabupaten/ kota mendukung penuh atas keberhasilan program dan keberlanjutan program desa pangan aman

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain :

- Peningkatan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan dan keberlanjutan program agar tetap bisa berjalan secara mandiri
- Peningkatan komitmen pemerintah Desa untuk dapat melanjutkan program Desa Pangan Aman dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun oleh kader keamanan pangan. Seperti kegiatan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas di desa, dll

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Audiensi dengan Wakil Bupati Bandung Barat beserta jajaran tanggal 24 April 2025. Kegiatan audiensi membahas inventarisasi program lintas sektor yang dapat diintegrasikan serta pemilihan Desa yang akan dijadikan target intervensi berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah/Dinas terkait sesuai kriteria yang ditetapkan. Dilakukan Advokasi yang menghasilkan rekomendasi mengenai sinergisme pelaksanaan desa pangan aman di Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 3.1.18 Audiensi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dengan Wakil Bupati Bandung Barat 24 April 2025

b. Advokasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dengan Lintas Sektor tanggal 29 April 2025. Pada kegiatan advokasi dilanjutkan dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen untuk melaksanakan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan secara Berkesinambungan oleh semua OPD terkait.



Gambar 3.1.19 Advokasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dengan Wakil Bupati Bandung Barat 29 April 2025

Kolaborasi perlu ditingkatkan terus menerus untuk menjamin pelaksanaan program desa pangan secara berkelanjutan sehingga

Desa/ Kelurahan bisa melaksanakan program secara mandiri dan Pemda setempat mampu mereplikasi program desa pangan aman.

c. Pelatihan kader Keamanan pangan bertujuan untuk melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa dan melakukan pengawasan keamanan pangan di desa. Kader yang dilatih dari tiap desa yang direkomendasikan oleh kepala Desa sebanyak 7 orang. Pemilihan kader menjadi hal penting karena dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan

   Bimtek Kader keamanan pangan dilaksanakan dua kali yaitu tanggal 22 Mei 2025 dan 29 Agustus 2025. Bimtek kader tanggal 22 Mei 2025 dilaksanakan di Aula Desa Cikahuripan diikuti oleh desa yang diintervensi di Kecamatan Lembang yaitu Desa Lembang, Desa Cikahuripan dan Desa Jayagiri. Sedangkan bimtek tanggal 29 Agustus 2025 dilaksanakan di Aula Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang. Bimtek ini diikuti oleh Desa Kertajaya, Desa Kertamulya dan Desa Campakamekar.

Kabupaten	Pelaksanaan	Desa	Jumlah Kader (orang)
Bandung Barat Kecamatan Lembang	Aula Desa Cikahuripan, 22 Mei 2025	Desa Cikahuripan	7
		Desa Lembang	7
		Desa Jayagiri	7
Bandung Barat Kecamatan Padalarang	Aula Desa Kertamulya, 29 Agustus 2025	Desa Kertamulya	7
		Desa Kertajaya	7
		Desa Campakamekar	7

Berikut tabel jumlah dan pelaksanaan Bimbingan Teknis Kader Desa Pangan Aman











d.. Bimtek Komunitas Masyarakat

Bimtek Komunitas Desa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman komunitas desa terhadap keamanan pangan. Jumlah Masyarakat yang mengikuti bimtek komunitas sebanyak 28 orang tiap desa yang terdiri dari komunitas dari sisi supply (pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan, pelaku usaha Pangan Siap Saji dan pelaku usaha ritel pangan) dan komunitas dari sisi demand (komunitas ibu rumah tangga, remaja dan sekolah).

Bimtek komunitas dilaksanakan 2 kali yaitu Bimtek komunitas Desa di Kecamatan Lembang dan Kecamatan Padalarang. Bimtek Komunitas Desa Lembang, Desa Jayagiri dan Desa Cikahuripan yang berada di Kecamatan Lembang dilaksanakan di aula kantor desa masing-masing tanggal 24 Juni

2025. Sedangkan bimtek komunitas Desa Kertajaya, Desa Kertamulya dan Desa Campakamekar yang berada di Kecamatan Padalarang dilaksanakan tanggal 23 September 2025 di aula kantor desa masing-masing.






Pentingnya peran Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa dalam pemilihan peserta Bimtek Komunitas Masyarakat Desa sehingga tujuan dan manfaat pelaksanaan bimtek ini tepat sasaran dan menghasilkan output yang diharapkan. Memilih peserta yang masih dalam usia produktif diharapkan bisa memahami materi yang diberikan dengan baik sehingga bisa mensosialisasikan kembali kepada Masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan peserta dari sisi supply, agar merekomendasikan pelaku usaha yang berkomitmen untuk mengurus izin edar SPPIRT atau MD sehingga bimtek yang diberikan bisa bermanfaat dan diterapkan di tempat usaha masing-masing.

Hasil evaluasi risiko tahun 2025, dapat diketahui bahwa risiko jumlah desa yang diintervensi tidak sesuai perencanaan, memiliki level risiko 8. Setelah dilakukan pengendalian risiko dengan cara melakukan koordinasi dengan stakeholder, dapat menurunkan level risiko menjadi 5. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko yang telah dilakukan efektif. Rincian identifikasi risiko kegiatan pemberdayaan terdapat pada tabel berikut :

TABEL 3.1.70

IDENTIFIKASI RISIKO

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Kegiatan / Bisnis Proses	Sumber Risiko	Issue ISO 9001:2015		Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini		Level Risiko Residu
1	Layanan Hubungan Masyarakat	Eksternal	Jumlah desa yang diintervensi tidak sesuai perencanaan	Kurang optimalnya tanggapan Pemerintah Daerah	Rendahnya cakupan Desa Pangan Aman	Koordinasi dengan stakeholder	Efektif	5

TABEL 3.1.87

KOTA/KABUPATEN YANG MEREPLIKASI DESA PANGAN AMAN TAHUN 2025

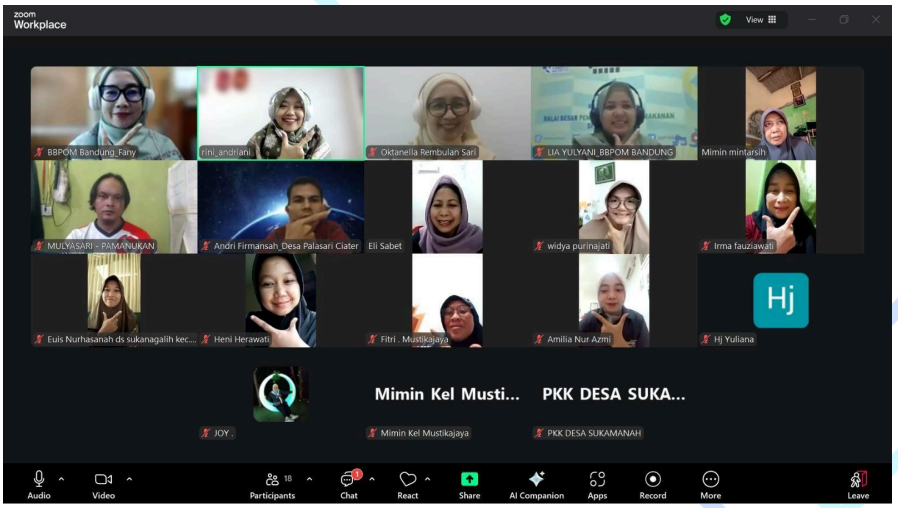
No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Tahun
1	Kabupaten Bandung (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung)	5	2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung secara konsisten melakukan replikasi program Desa Pangan Aman. Replikasi telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan sampai tahun 2024 telah dilakukan replikasi terhadap 15 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melakukan replikasi terhadap 5 desa yaitu desa Citaman dan desa Nagrek (kecamatan Nagrek); desa Solokanjeruk kecamatan Solokanjeruk, desa Sukamenak kecamatan Margahayu dan desa Pamekaran kecamatan Soreang. Sebagai narasumber dalam pelaksanaan bimtek kader, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melibatkan petugas BBPOM Bandung.

E. Pengawalan Desa

Dalam rangka monitoring dan evaluasi Program Desa Pangan Aman, diadakan kegiatan pengawalan guna memastikan program desa pangan aman dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, untuk mengidentifikasi permasalahan terkait keamanan pangan yang terjadi di desa serta memberikan solusi/ saran atas permasalahan tersebut

Kegiatan pengawalan dilakukan secara daring tanggal 11 September 2025 dihadiri oleh desa yang diintervensi tahun 2024 (8 Desa/ Kelurahan yang berasal dari 3 Kabupaten/ Kota)



Secara umum, kader keamanan pangan di desa/ kelurahan telah melaksanakan rencana aksi berupa sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas namun tidak dilengkapi data dukung (daftar hadir dan dokumentasi). Keterbatasan anggaran masih menjadi permasalahan umum terkait kendala pelaksanaan rencana aksi

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.71
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
JUMLAH DESA PANGAN AMAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	100.00%	99.83%	1.00	0.00	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Jumlah Desa Pangan Aman disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar , pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi

menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

TABEL 3.172

TAHAPAN PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10%	Februari - Juli
	Total Skor	100%	

TABEL 3.1.73

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

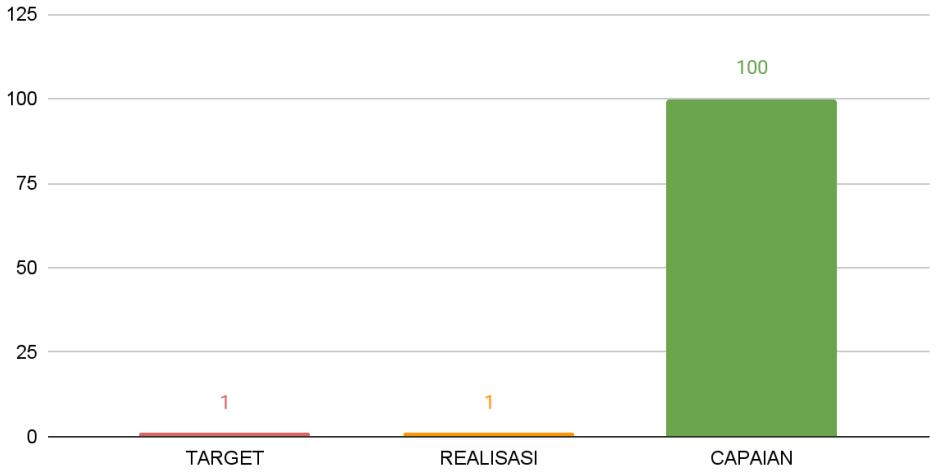
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2025 adalah 1 pasar. Target tahapan pelaksanaan kegaiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 1 pasar. Pada tahun 2025, realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar 1 pasar. Jika diukur terhadap target tahun 2025 maka capaiannya sebesar 100% dengan kriteria BAIK. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1.39
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Progres (capaian Dja)				Total Progres
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	25%	-	-	-	25%
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	-	25%	-	-	25%
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	-	20%	-	-	20%
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	-	20%	-	-	20%
5	Pengawalan	10%	-	10%	-	-	10%
	Total Skor	100%	25%	75%	0%	0%	100%

B. Perbandingan Realisasi KinerjaTahun 2025 dengan Target Renstra 2029

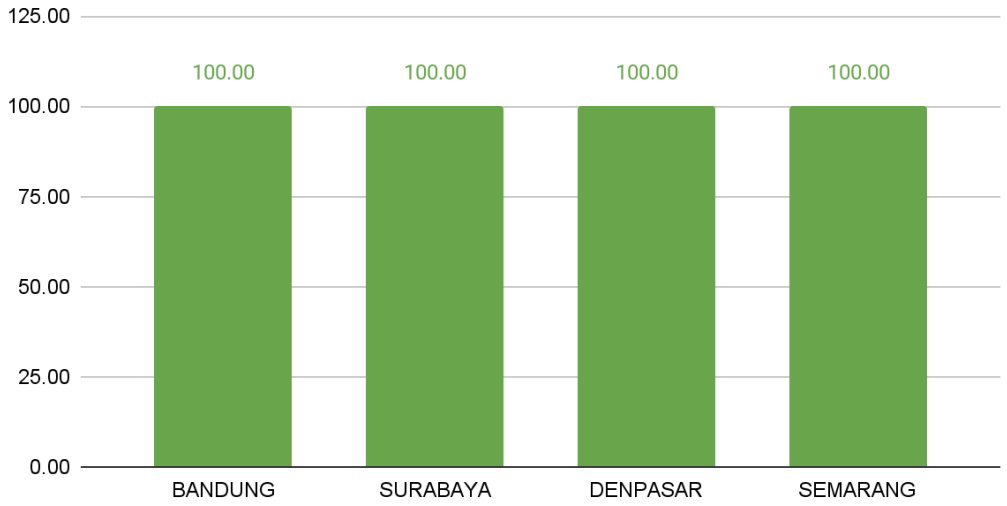
Target akhir tahun Renstra tahun yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 5. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 20% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.74
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA TAHUN 2029
JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	1	20,00%	Perlu Upaya Keras	

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.40
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Berdasarkan grafik perbandingan capaian antar satker dalam satu klaster menunjukkan bahwa realisasi kinerja BBPOM di Bandung sama dengan BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Semarang yaitu 100%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini disebabkan karena:

1. Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut sehingga program dapat berjalan sesuai dengan target
2. Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan
3. Komitmen dan dukungan Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPABK
2. Peningkatan tindaklanjut hasil sampling dan pengujian
3. Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pedagang.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

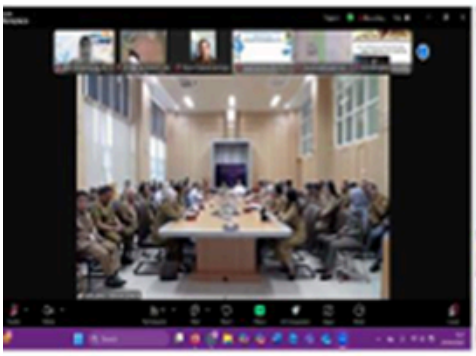
a. Advokasi

Kegiatan advokasi dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat Lantai 1 Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Advokasi dihadiri oleh Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail beserta organisasi pemerintah daerah terkait yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Kesejahteraan Rakyat, Dinas P2KBP3A, Dinas PMPTSP, serta calon desa, pasar dan sekolah yang diintervensi.



Gambar. 3.1.20 Penandatanganan Komitmen







Gambar. 3.1.20 Sambutan dan Pemaparan Materi



Gambar. 3.1.20 Diskusi dan Sikronisasi Kegiatan

b. Bimtek dan penyuluhan kepada komunitas pasar

Bimtek dan penyuluhan kepada komunitas pasar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi pangan yang beredar di Pasar Panorama, meningkatkan partisipasi komunitas pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di Pasar Panorama.

Bimbingan Teknis dan penyuluhan akan dilaksanakan secara tatap muka langsung. Sebelum kegiatan petugas Balai Besar POM di Bandung melakukan koordinasi dengan pengelola pasar yang diintervensi tahun 2025. Undangan, 1 (satu) orang pengelola pasar dari pasar-pasar di wilayang II Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 secara hybrid. Kegiatan luring dilaksanakan di Pasar Panorama Lembang. Peserta yang hadir secara luring sebanyak 35 orang terdiri dari peserta terdiri dari 3 orang pengelola pasar yang diintervensi, 4 orang petugas pasar, 5 orang dari paguyuban, 17 orang pedagang, sedangangkan peserta yang hadir secara daring sebanyak

10 orang yang berasal dari pasar yang berada pada wilayah II Kabupaten Bandung Barat, pasar yang diintervensi tahun 2024.











c. Sosialisasi keamanan pangan

Sosialisasi bertujuan untuk melakukan sosialisasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar dilaksanakan diantaranya melalui pembuatan dan sosialisasi konten terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Keamanan Pangan melalui media sosial atau media lainnya. Sosialisasi keamanan pangan diawali dengan penentuan tema dan konten yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Sosialisasi melaui media sosial dilaksanakan oleh BBPOM di Bandung.

TABEL 3.1.75

SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN MELALUI MEDIA SOSIAL

TAHUN 2025

No	Judul	Tanggal Tayang	Link Konten
1.	5 Kunci Keamanan Pangan untuk Ritel	30 Mei 2025	https://www.instagram.com/p/DKQUEBHzu6i/?igsh=dnhqamJqaTFv

			d3Ni
2.	Alur Belanja di Pasar Tradisional	2 Juni 2025	https://www.instagram.com/p/DKZBUeNzwvl/?igsh=emtrMzN0MDAyaGFq
3.	CEK KLIK	4 Juni 2025	https://www.instagram.com/p/DKetCr7T1On/?igsh=bHdhbXdiazl1cWk1
4.	PPABK	11 Juni 2025	https://www.instagram.com/p/DKw
5.	Keamanan Pangan	15 Juni 2025	https://www.instagram.com/p/DK6yFLKzqds/?img_index=4&igsh=MXZldmJkOG03Y2I2Zg==
6.	Keamanan Pangan	16 Juni 2025	https://www.instagram.com/p/DK9OraUTkbi/?img_index=1
7.	Bahan Berbahaya Borak	23 Juni 2025	https://www.instagram.com/p/DLPPjAQzmeR/?img_index=1
8.	BPOM Mobile	23 Juni 2025	https://www.instagram.com/p/DLhzzqqzIlz/
9.	Bahan Berbahaya Formalin	4 Juli 2025	https://www.instagram.com/p/DLrxAq5zSlj/?img_index=1
10	Bahaya Pewarna Tekstil	8 Juli 2025	https://www.instagram.com/p/DL2NfFgTh1T/?img_index=1

Petugas Pasar Panorama selanjutnya melakukan sosialisasi secara daring dan luring. Sosialisasi secara daring dilakukan dengan cara menyebarkan melalui *WhatsApp Group*.

TABEL 3.1.76
SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SECARA LURING DAN DARING OLEH PETUGAS PASAR PANORAMA
TAHUN 2025

No	Nama Kader /Komunitas Pasar	Judul Konten	Tanggal share	Metode	Jumlah Penerima
1.	Paguyuban Pasar	CEK KLIK, 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Ritel	05 Juni 2025	Melalui WAG pengurus Pasar Panorama	50
2.	Pedagang Pasar	CEK KLIK dan BPOM Mobile	09 Juni 2025	Penyuluhan langsung	20
3.	Pedagang Pasar Panorama	CEK KLIK, BPOM Mobile, Keamanan Pangan untuk Ritel, Alur berbelanja, Keamanan Pangan, Bahan berbahaya	10 Juni 2025	Melalui WAG	23
4.	Pedagang Pasar Wilayah II	CEK KLIK, BPOM Mobile, Keamanan Pangan untuk Ritel, Alur berbelanja, Keamanan Pangan, Bahan berbahaya	11 Juni 2025	Melalui WAG	21
5.	RT 02	CEK KLIK, BPOM Mobile, Keamanan Pangan untuk Ritel, Alur berbelanja, Keamanan Pangan, Bahan berbahaya	16 Juni 2025	Melalui WAG	50
6.	Operasional Pengelola Pasar Panorama	CEK KLIK, BPOM Mobile, Keamanan Pangan untuk Ritel, Alur berbelanja, Keamanan Pangan, Bahan berbahaya	17 Juni 2025	Melalui WAG	16
7.	Divisi Kebersihan Pasar Panorama	CEK KLIK, BPOM Mobile, Keamanan Pangan untuk Ritel, Alur berbelanja, Keamanan Pangan, Bahan berbahaya	17 Juni 2025	Melalui WAG	32

Sosialisasi secara luring dilakukan dengan cara mendatangi kios yang menjual pangan olahan. Petugas pasar menyampaikakn tentang keamanan pangan, Cek KLIK, Cara Ritel yang baik. Sosialisasi dilaksanakan pada bulan 09 Juni 2025.



Gambar. 3.1.20 Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan CEK KLIK oleh Petugas Pasar Panorama

d. Kegiatan pengawasan pangan di Pasar Panorama dilaksanakan oleh petugas pasar pada tanggal 31 Juli 2025. Pengawasan menggunakan metoda CEK KLIK terhadap pangan olahan berkemas.





Gambar. 3.1.20 Kegiatan Pengawasan Pangan secara CEK KLIK oleh Petugas Pasar Panorama

Monitoring dan evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan tanggal 31 Juli 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau kesesuaian pelaksanaan program dengan petunjuk teknis serta *timeline* yang telah ditentukan. Pada kegiatan ini, Pasar Panorama menyampaikan rencana aksi program keamanan pangan tahun 2026.



Gambar 3.1.21 Monitoring dan Evaluasi di Pasar Panorama

e. Workshop Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 yang yang bertempat di Pakuhaji Highland Eco-Resort Bandung Barat Pakuhaji Tonggoh, Pakuhaji, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Organisasi pemerintah daerah yang hadir dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bandung Barat, Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bandung Barat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bandung Barat, Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bandung Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bandung Barat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bandung Barat, Kanwil Kementrian Agama Bandung Barat, Camat Padalarang, Camat Lembang, Kepala UPT Pasar Wilayah I (Pasar Panorama), desa dan sekolah yang diintervensi tahun 2025.







Gambar. 3.1.20 Sambutan dan Pembukaan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung



Gambar. 3.1.20 Penyerahan Sertifiat oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung



Gambar. 3.1.20 Penyerahan Sertifkat bagi Nominator Lomba Program Prioritas Nasional



Gambar. 3.1.20 Pemaparan Materi oleh Ketua Tim Kerja Program Prioritas Nasional



Gambar. 3.1.20 Diskusi Keberlanjutan Program Prioritas Nasional

E. Manajemen Risiko

Hasil evaluasi risiko tahun 2025, dapat diketahui bahwa risiko jumlah pasar yang diintervensi tidak sesuai dengan perencanaan setelah dilakukan pengendalian risiko dengan cara Audiensi denga stakeholder/Pemerintah Daerah untuk menunjuk pasar yang mampu berkomitmen menjalankan program hingga selesai, dapat menurunkan level risiko menjadi 8. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko yang telah dilakukan efektif. Risiko **Kegiatan PN Pemberdayaan Masyarakat tidak berlanjut di daerah yang telah diintervensi setelah** dilakukan pengendalian risiko dengan cara **Program pengawalan**

PRO PN, dapat menurunkan level risiko menjadi 8. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko efektif. Rincian identisikasi risiko kegiatan pemberdayaan terdapat pada Tabel berikut:

TABEL 3.1.77

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	Kegiatan/ Proses Bisnis		Issue ISO9001:2015		Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini		
			Risk event/Uraian peristiiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Penendalian	Simpulan/Efekstifitas Pengendalian	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Program Nasional GKPD,	Ekternal	**Jumlah pasar yang diintervensi tidak sesuai perencanaan**	**Pasar yang ditetapkan tidak bersedia melaksanakan program PPABK**	Target intervensi tidak tercapai	Audiensi dengan stakeholder/ Pemerintah Daerah untuk menunjuk pasar yang mampu berkomitmen menjalankan program hingga selesai	efektif	8

	PJAS, Basar Aman)							
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Program Nasional GKPD, PJAS, Basar Aman)	Eksterna	**Kegiatan PN Pemberdayaan Masyarakat tidak berlanjut di daerah yang telah diintervensi.**	**Kurangnya komitmen stakeholde**	Target keberlanjutan program didaerah tidak tercapai	**Program pengawalan PRO PN**	efektif	8

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.78
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00%	99.97%	1.00%	0.00	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-4 MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 104.01 dengan kriteria SANGAT BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.79.

TABEL 3.1.79
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16.45	17.11	104.01	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104.01	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan jumlah UMKM yang memenuhi standar dengan jumlah UMKM yang sedang didampingi pada tahun berjalan. UMKM yang didampingi mencakup UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional. Adapun ruang lingkup UMKM-nya adalah sebagai berikut :

a) UMKM pangan mencakup skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin edar atau PIRT yang akan naik kelas ke MD;

b) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
   - UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
   - UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
   - UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
   - UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
   - UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor;

UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) dan yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

A. Ruang Lingkup UMKM:
   1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
      a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
      b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
   2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
      a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
         - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
         - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
      b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:
   1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
   2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara

pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);

3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan :
   a) Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB
   b) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

1. Untuk UMK Pangan Olahan :
   a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
   a. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

   Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

2. Untuk UMKM OBA:
   a. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
   b. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
   c. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
   d. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
   e. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
   f. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

   Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:
   a. UMKM yang memproduksi kosmetik;
   b. UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
   c. UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
   d. UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

   Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :
   - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
   - Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
   - Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

TABEL 3.1.80

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN OLAHAN

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan

2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April - November	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. Obat Bahan Alam

TABEL 3.1.81

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM OBAT BAHAN ALAM

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi,

				pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

TABEL 3.1.82

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM KOSMETIK

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor: PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025, Perhitungan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB harus menyesuaikan dengan perhitungan manual IKU baru, yaitu sebagai berikut :

Perhitungan target B1 - B11:

Persentase UMKM yang didampingi = A / B

A. Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik
B. Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

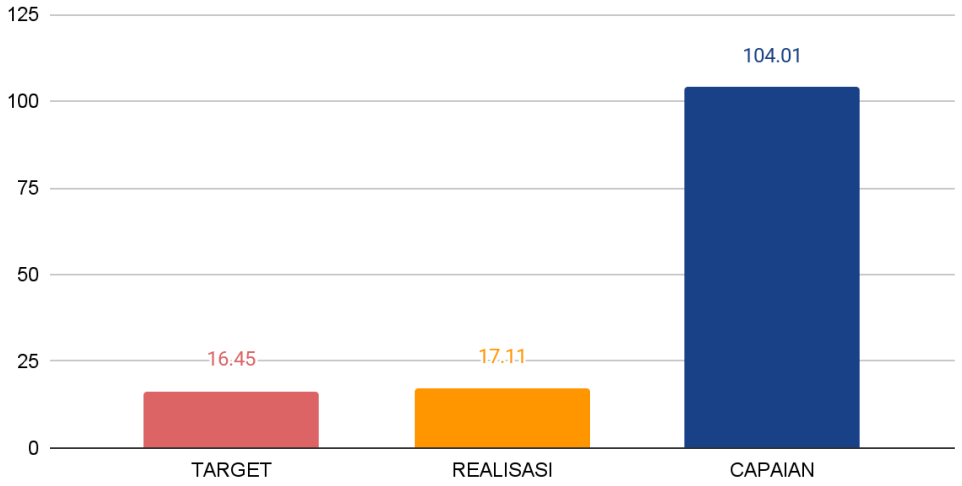
TABEL 3.1.83
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16.45%	17.11%	104.01%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, sesuai perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tanggal 29 Agustus 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 16.45%. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 17.11%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 104.01% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.41
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

Target tahun 2029 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 99.34% untuk tahapan pendampingan yang dilaksanakan. Jika realisasi kinerja pada TA 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada TA 2025 sebesar 17.22% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

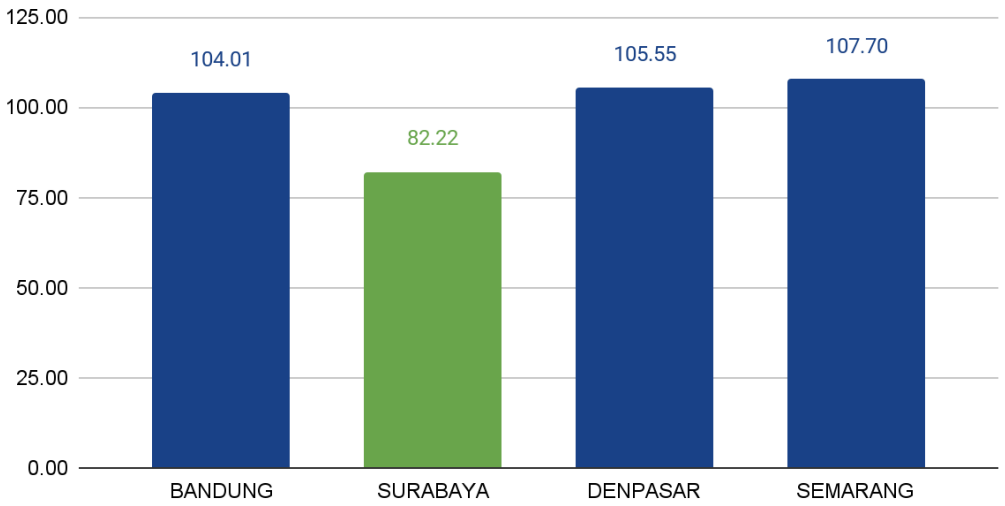
TABEL 3.1.84
PERBANDINGAN REALISASI TW 3 DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN TW III	KATEGORI	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	99.34%	17.11%	17.22%	Perlu Upaya Keras	▼

dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.42
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 73,00%. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yang dihitung pada triwulan II masih berupa persentase tahapan progress kegiatan fasilitasi dan pendampingan. Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor: PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025, terdapat perubahan perhitungan capaian kinerja sesuai manual IKU yang baru, sehingga realisasi kinerja triwulan I dan triwulan II menjadi sebagai berikut :

TABEL 3.1.86
PERUBAHAN REALISASI TA 2025

INDIKATOR	TW 1		TW 2	
	Realisasi Awal	Realisasi Baru	Realisasi Awal	Realisasi Baru
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	16,67%	30,77%	65,67%	81,54%

yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan				

Berdasarkan data tersebut, realisasi persentase tahapan progress pendampingan pada triwulan I adalah sebesar 30,77%, pada triwulan II adalah sebesar 81,54% dan pada triwulan III adalah sebesar 88,46%. Dengan adanya perubahan perhitungan tersebut, perbandingan hanya dapat dilaksanakan untuk nilai realisasi kinerja. Dengan demikian, pada triwulan III ini terjadi kenaikan realisasi kinerja sebesar 6,92% dibanding pada triwulan II, dan sebesar 57,69% dibandingkan triwulan I.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan III tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Revisi target UMKM
- Kegiatan Bimtek UMKM Pangan Olahan dilaksanakan lebih cepat dari target waktu yang telah dijadwalkan

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Tahapan Seleksi Target Pendampingan UMKM

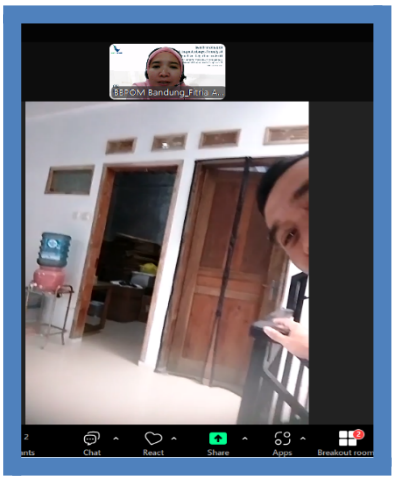
  Untuk menetapkan UMKM yang akan dijadikan target dalam program pendampingan UMKM Tahun 2025 dilakukan tahapan seleksi UMKM. Pada tahapan ini BBPOM Di Bandung membuka pendaftaran yang disosialisasikan secara terbuka melalui medsos BBPOM Di Bandung,

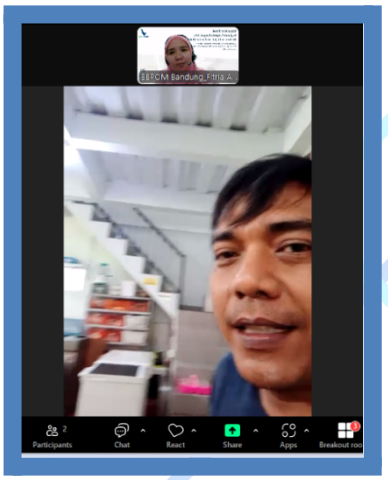


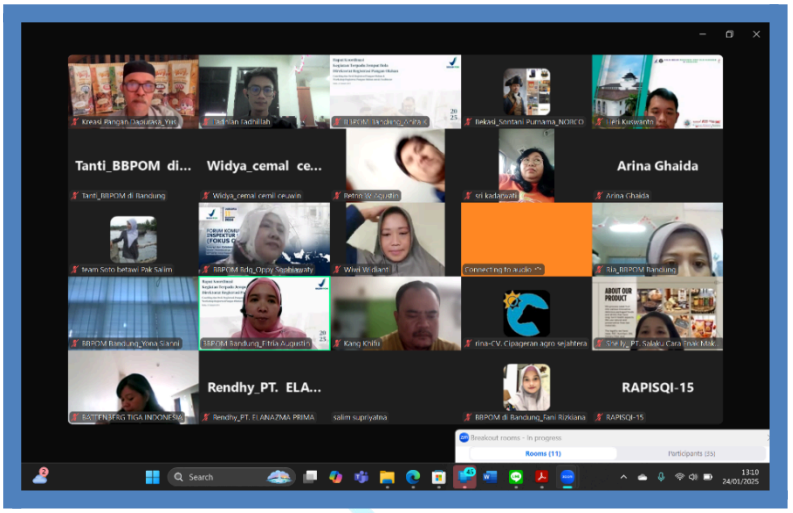
Gambar 3.1.22 Informasi pendaftaran pendampingan UMKM

Selain itu BBPOM Di Bandung juga berkolaborasi dengan instansi atau stake holder terkait dimana pada tahapan ini memberikan usulan UMKM yang dapat dicalonkan menjadi target pendampingan.

Dari UMKM yang mendaftar secara langsung dan UMKM yang diusulkan oleh stake holder tersebut, dilakukan pemilihan target berdasarkan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh masing-masing UMKM. Untuk UMKM yang lolos tahapan evaluasi dokumen selanjutnya dilaksanakan tahapan seleksi yang dilakukan melalui wawancara terhadap UMK secara daring (aplikasi zoom).



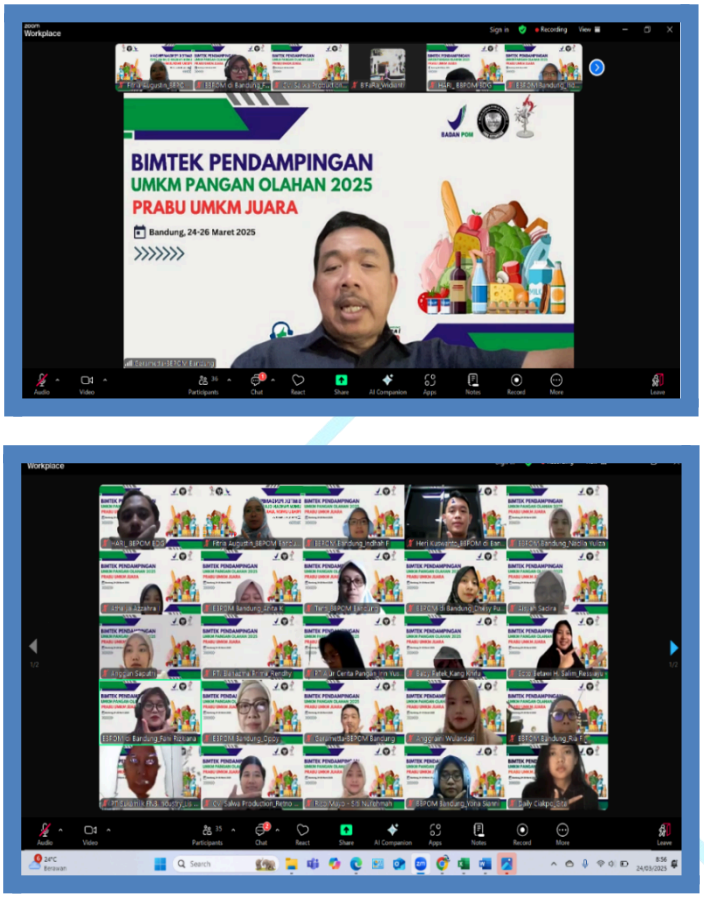




Gambar 3.1.23 Wawancara terhadap UMKM yang lolos seleksi

- Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan

  Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pangan Olahan yang diselenggarakan secara daring untuk 18 UMKM pangan olahan pada tanggal 24-26 Maret 2025 yang merupakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), E-Sertifikasi dalam Rangka Izin Penerapan CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan melali E-Reg RBA.



Gambar 3.1.24 Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan

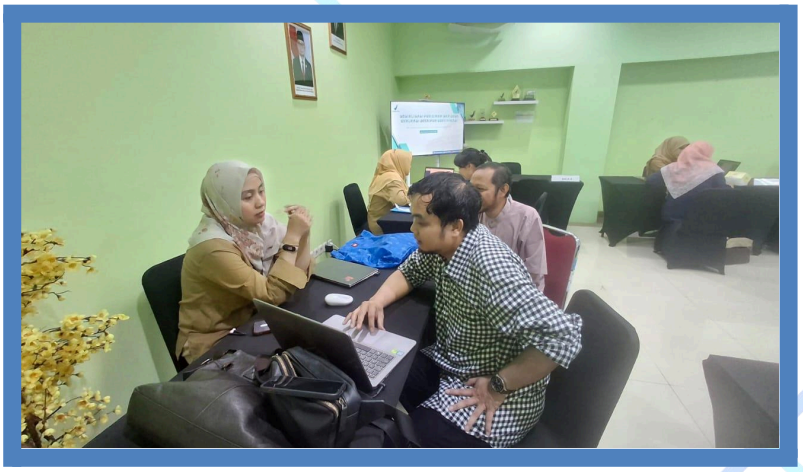
- Sosialisasi Keamanan Pangan yang diselenggarakan secara daring dan terbuka untuk seluruh UMK pangan olahan pada tanggal 25 Mei 2025 yang merupakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), E-Sertifikasi dalam Rangka Izin Penerapan CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan melalui E-Reg RBA.



Gambar 3.1.25 Sosialisasi Keamanan Pangan

- Desk dan Coaching Klinik E-sertifikasi Izin Penerapan CPPOB

  Melaksanakan kegiatan Desk Evaluasi Dokumen CAPA Sertifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 di Aula Balai Besar POM di Bandung dengan mengundang para pelaku usaha yang sedang berproses perizinan Balai Besar POM di Bandung. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan E-Sertifikasi dalam Rangka Izin Penerapan CPPOB.



Gambar 3.1.26 Desk dan Coaching Klinik E-sertifikasi Izin Penerapan CPPOB

- Desk Jemput Bola E-registrasi Pangan Olahan

  Bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM RI, pada tanggal 24 dan 25 Juni 2025 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi Prabu UMKM Juara yang diikuti oleh 50 pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha yang menjadi peserta pada kegiatan ini merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BBPOM di Bandung untuk tahun 2024 dan 2025. Para pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 23 nomor izin edar (NIE) dan 8 akun Perusahaan.



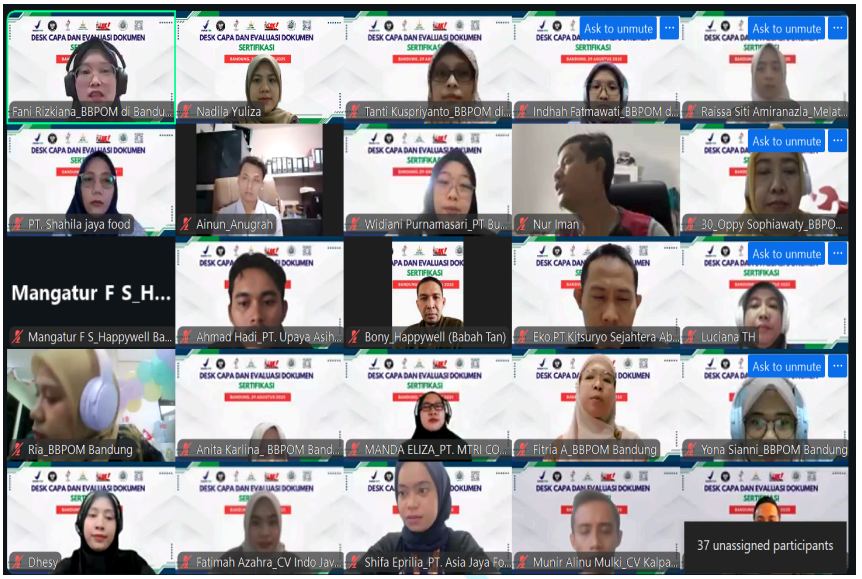
Gambar 3.1.27 Desk Jemput Bola E-registrasi Pangan Olahan

6. Pelaksanaan Desk CAPA

Melaksanakan kegiatan Desk Evaluasi Dokumen CAPA Sertifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025 di Aula Balai Besar POM di Bandung dengan mengundang para pelaku usaha yang sedang berproses perizinan Balai Besar POM di Bandung dan pada tanggal 29 Agustus 2025 dilaksanakan secara daring. Pada kegiatan ini para pelaku usaha memberikan perbaikan terhadap temuan yang dilaksanakan pada saat pendampingan ke sarana untuk memperoleh Izin Penerapan CPPOB.



Gambar 3.1.28 Desk CAPA pada tanggal 25 Juli 2025



Gambar 3.1.29 Desk CAPA secara daring tanggal 29 Agustus 2025

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.88
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW III	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	104.01%	96.08%	1.08	0.08	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik

dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-5

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 116.42% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.89.

TABEL 3.1.89
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72.00	83.82	116.42	Tidak dapat Disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			116.42	Tidak dapat disimpulkan	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar

30%; dan

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3. Apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

TABEL 3.1.90
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025

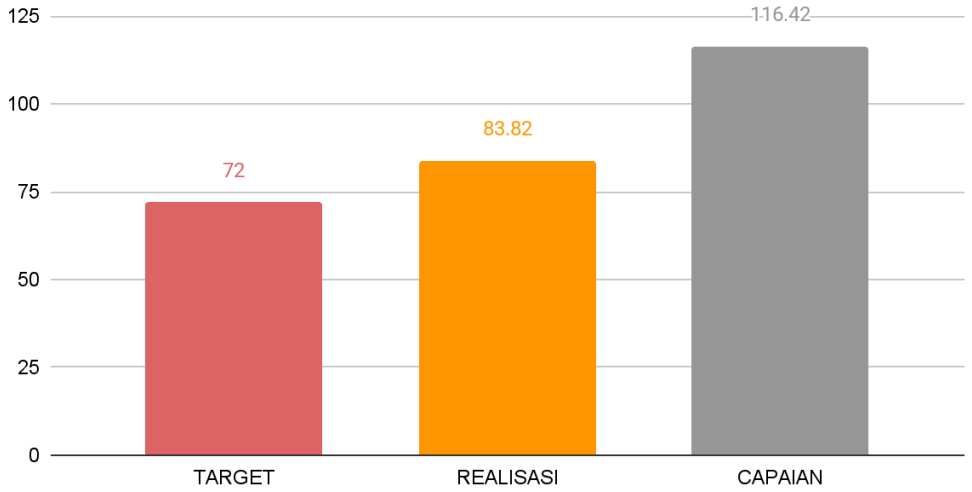
INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72.00%	83.82%	116.42%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 72,00%. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung sebesar 83,82%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 116,42% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.

Grafik 3.1.43
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

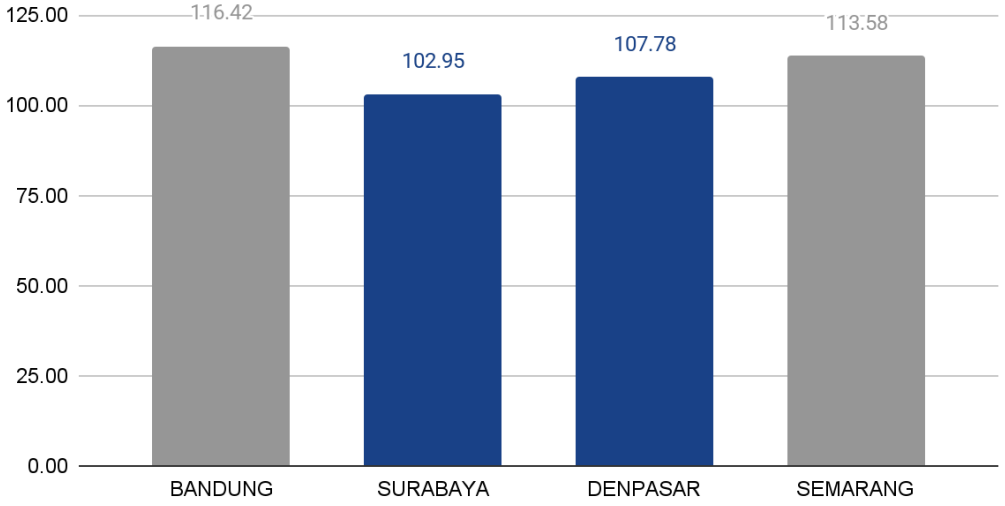
Target Renstra tahun 2029 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 80.00%. Jika realisasi kinerja pada Tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 104.78% dengan kategori Tercapai/ Melampaui.

TABEL 3.1.91
PERBANDINGAN REALISASI TA 2025 DENGAN TARGET RENSTRA
PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	80%	83.82%	104.78%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.44
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika dibandingkan realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2025 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara maka BBPOM di Bandung memiliki realisasi dan capaian kinerja tertinggi dimana realisasi kinerja berturut-turut dari yang tertinggi yaitu: BBPOM di Bandung (116.4250, BBPOM di Semarang (113.58%), BBPOM di Denpasar (107.78%), dan BBPOM di Surabaya (102.95%).

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Terpeliharanya jejaring informasi dalam pengumpulan bahan keterangan yang baik, sehingga didapatkan informasi awal yang akurat terkait terjadinya tindak pidana Obat dan Makanan. Pada tahun 2025, BBPOM di Bandung melakukan penanganan terhadap 7 (tujuh) perkara kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerjanya, dengan rincian : 3 (tiga) perkara Tahap 2, 2 (dua) perkara P21, dan 2 (dua) perkara SPDP.
- Terhadap 2 (dua) perkara dengan status P21, telah dilakukan koordinasi khususnya dengan lintas sektor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk

pelaksanaan Tahap 2 akan dilakukan di awal tahun 2026 mengingat penerbitan pembatasan waktu serah-terima tersangka dan barang bukti pada akhir tahun 2025.

- Terhadap 2 (dua) perkara dengan status SPDP telah dilakukan penerbitan DPO mengingat kedua tersangka tidak ditemukan keberadaannya. Penerbitan DPO dilakukan oleh Polda Jawa Barat setelah melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan.
- Selain menangani perkara baru, pada tahun 2025 BBPOM di Bandung juga melanjutkan penanganan perkara carry over dari tahun-tahun sebelumnya, dimana dari 10 perkara carry over, 5 perkara telah diselesaikan hingga Tahap 2 dan 5 (lima) perkara lainnya berstatus P21.
- Peningkatan dalam penanganan perkara, baik perkara baru maupun perkara carry over, tidak terlepas dari koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin baik dengan para pemangku kepentingan dalam lingkup ICJS yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Korwas PPNS Polda Jawa Barat sehingga penyelesaian berkas perkara dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu se-optimal mungkin.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk memelihara atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Memelihara jejaring informasi secara berkelanjutan tentang kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang terjadi di *catchment area* BBPOM di Bandung.
- Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui Poksi Infokom dan diteruskan ke Poksi Penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut.
- Optimalisasi pemberkasan perkara agar perkara yang masih berjalan dapat segera penyelesaian.
- Melakukan evaluasi intensif khususnya terhadap perkara-perkara carry over sehingga dapat diperoleh rencana tindak lanjut dalam penanganan perkara.
- Memelihara koordinasi berkelanjutan dengan pejabat di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar dan Metro Jaya khususnya dalam proses pelaksanaan bantuan teknis dan taktis sehingga dapat menunjang kegiatan operasi penindakan dan sepanjang proses penyidikan.

- Meningkatkan koordinasi dengan Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk setiap berkas perkara yang sedang ditangani agar penyelesaian berkas dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Penyidikan Obat dan Makanan

  Perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada tahun 2025, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 17 perkara dengan rincian 7 (tujuh) perkara tahun 2025 dan 10 (sepuluh) perkara carry over.

  Perkara tahun 2025 yang ditangani merupakan tindak lanjut dari operasi penindakan yang dilakukan selama tahun 2025. Adapun posisi perkara tahun berjalan yang ditangani adalah sebagai berikut: 3 (tiga) perkara Tahap 2, 2 (dua) perkara P21, dan 1 (satu) perkara SPDP. Terhadap seluruh perkara yang sedang ditangani dilakukan upaya-upaya yang dianggap mampu mendukung penyelesaiannya, diantaranya: penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap 2 (dua) perkara SPDP yang tersangkanya tidak dapat ditemukan, dan koordinasi pelaksanaan Tahap 2 terhadap perkara yang sudah P21.

  Perkara carry over merupakan perkara tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah perkara carry over semula berjumlah 10 (sepuluh) perkara di awal Tahun 2025. Atas intensifikasi yang dilakukan PPNS, maka pada akhir Tahun 2025 terhadap 5 (lima) perkara dapat diselesaikan hingga Tahap 2. Adapun 5 (lima) perkara carry over yang tersisa berada pada tahap P-21 dan sedang diusahakan terkait penyelesaiannya hingga Tahap II melalui intensifikasi dan koordinasi terhadap lintas sektor terkait.

- Investigasi Awal

  Kegiatan investigasi awal adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil dari Kelompok Substansi Pemeriksaan baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun dalam rangka sertifikasi, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, berdasarkan surat dan/atau informasi dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media

online (patroli siber). Selama Triwulan IV tahun 2025, dilakukan kegiatan investigasi awal sebanyak 17 kali terhadap 13 sarana dengan hasil sejumlah 3 sarana dinyatakan berpotensi untuk dapat dilakukan penindakan.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.92
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	116.42%	88.85%	1.31	0.31	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-6

TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMANTAUAN SIBER DAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100,74% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.93.

TABEL 3.1.93
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00	90.67	100.74	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100,74%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan ke-enam, sebagai berikut:

PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16

tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
   a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
   b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

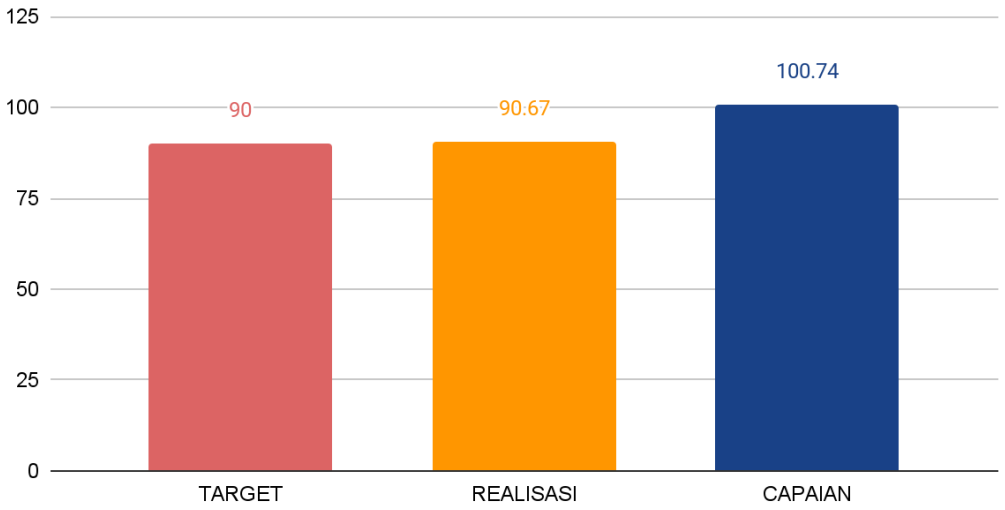
TABEL 3.1.94
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00	90.67	100.74	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,00%. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung sebesar 90,67%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100,74% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.45
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

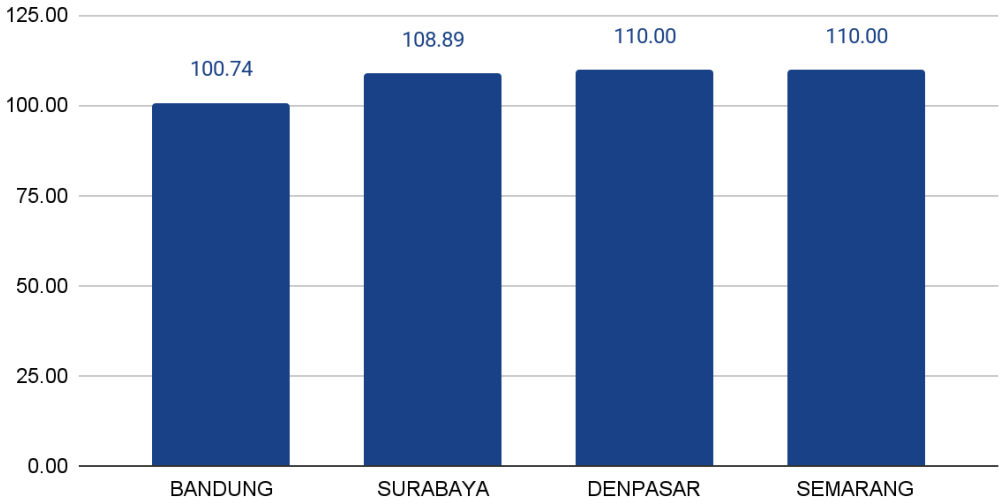
Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan III sebesar 55,56% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.95
PERBANDINGAN REALISASI 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2029
"PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00%	90.67%	100.74%	Tercapai/ Melampaui	

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.46
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Jika dibandingkan realisasi persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan pada tahun 2025 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara maka BBPOM di Bandung memiliki realisasi dan capaian kinerja terendah dimana realisasi kinerja berturut-turut dari yang tertinggi yaitu: BBPOM di Semarang dan BBPOM di Denpasar (110.00%), BBPOM di Surabaya (108.89%), dan BBPOM di Bandung (100.74%). Sekalipun demikian, capaian kinerja seluruh Balai Besar tersebut berada pada kategori yang sama yaitu SANGAT BAIK.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Pelaksanaan patrol siber menggunakan aplikasi *inawebcrawler* yang memudahkan petugas dalam input dan olah data. Dalam aplikasi tersebut tersedia menu pengaturan yang memungkinkan *cut-off* data dilakukan secara otomatis pada waktu yang telah diaturkan. Hal ini menyebabkan pelaporan patroli siber dapat dilaksanakan tepat waktu.
- Pada Triwulan IV Tahun 2025, dilakukan pengembangan pada aplikasi tersebut sehingga pelaporan patroli siber dilaksanakan secara manual. Namun hal ini tidak menjadi kendala berarti sehingga pelaporan pelaksanaan patroli siber tetap dapat dilaksanakan dengan memadai.

- Manajemen personil juga memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan capaian kinerja ini. Setiap staf di Poksi Penindakan secara rutin melaksanakan patroli siber di sela-sela waktu pelaksanaan kegiatan rutin lainnya.
- Kegiatan penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan diselesaikan pada TW IV tahun 2025 dengan tema Analisis Kejahatan Peredaran Obat Bahan Alam Ilegal Tahun 2025. Penyusunan analisis ini juga telah diberikan penilaian oleh Kepala BBPOM di Bandung.
- Kegiatan pelaporan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal tahun 2025 juga telah dilaksanakan yaitu sebanyak 1 laporan. Namun terdapat perubahan dari Direktorat Cegah Tangkal selaku Direktorat pengampu kegiatan, yakni terkait mekanisme dan tata cara pelaksanaan kegiatan termasuk tata cara penilaian. Perubahan ini tidak tersosialisasi dengan baik kepada UPT selaku pelaksana kegiatan sehingga terdapat kendala dalam pelaporan data baik terkait jumlah maupun terkait kualitas.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Memelihara dan meningkatkan kepatuhan personil dalam melakukan patroli siber dan input data melalui aplikasi yang ditentukan.
- Melakukan inventarisasi rekomendasi analisis/*policy brief* Dit. Cegah Tangkal yang ditujukan kepada UPT dan memantau pelaksanaan rekomendasi terutama yang melibatkan poksi lain.
- Melakukan koordinasi dengan poksi-poksi UPT dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi agar sesuai dengan yang diharapkan.
- Melakukan sosialisasi SOP atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Penelusuran Siber

   Penelusuran siber dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan yakni Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber). Patroli siber dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan yang dilakukan secara daring terutama terhadap komoditi yang diduga illegal, seperti : TIE, BKO, Iklan TMS, dll.

Perkembangan pemasaran produk melalui media daring seperti media social, platform e-commerce, dan website yang semakin meningkat merupakan potensi besar terjadinya pelanggaran. Patroli siber dilakukan dengan mengumpulkan data terkait peredaran produk meliputi data produk (identitas, dugaan pelanggaran, jumlah terjual, jumlah stok, dan harga jual), data penjual (nama penjual, platform yang digunakan, lokasi penjual) dan alamat atau link penjualan beserta *capture* laman penjualan. Seluruh data tersebut umumnya tersedia di platform yang digunakan dan tidak membutuhkan keahlian atau peralatan khusus dalam pengumpulannya.

Pengumpulan data dapat dilakukan dimana dan kapan saja serta oleh siapa saja. Pada pelaksanaannya, secara internal Poksi Penindakan menetapkan target minimal 50 (limapuluh) link penjualan untuk dilaporkan tiap bulan atau 600 link penjualan per tahun. Pada Tahun 2025 dilaporkan 1136 *link* penjualan online yang terindikasi melakukan pelanggaran. Terhadap seluruh *link* tersebut direkomendasikan untuk dilakukan *takedown*.

Berikut rekapitulasi hasil patroli siber yang dilakukan selama tahun 2025 :

TABEL 3.1.96

REKAPITULASI HASIL PATROLI SIBER

Berdasarkan Komoditi	
Komoditi	Jumlah
Obat	40
Obat Bahan Alam	785
Kosmetik	231
Suplemen Kesehatan	69
Pangan	11
Jumlah	1136

Berdasarkan Wilayah	
Kota/Kab	Jumlah
Kota Bandung	311
Kab. Bandung	201
Kab. Bandung Barat	37
Kota Cimahi	59
Kota Bekasi	148
Kab. Bekasi	248
Kab. Cianjur	3
Kota Cirebon	4
Kab. Cirebon	62
Kab. Garut	4
Kab. Indramayu	15
Kab. Karawang	14
Kab. Kuningan	2

Kab. Majalengka	7
Kab. Purwakarta	4
Kab. Subang	3
Kota Sukabumi	1
Kab. Sukabumi	6
Kab. Sumedang	7
Jumlah	1136

Kemudian terhadap 1 (satu) link dengan penjualan terbesar dilakukan profiling menggunakan aplikasi yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporan patrol siber. Hasil patrol siber dan profiling sepenuhnya dikelola dan diolah oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI.

2. Pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan

Fungsi cegah tangkal di UPT dilaksanakan melalui penyusunan analisis kerawanan kejahatan dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal. Penyusunan analisis dilakukan dengan membuat kajian/ analisis terhadap isu-isu kejahatan sesuai dengan wilayah UPT. Termasuk dalam kegiatan ini adalah Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Data yang di-input ke dalam aplikasi bersumber dari hasil kegiatan intelijen, hasil kegiatan penindakan/ penyidikan, hasil pengujian pihak ketiga di UPT, data permohonan bantuan ahli yang ditujukan kepada UPT dari pihak Kepolisian. Berdasarkan hasil monev dari Dit Cegah Tangkal Badan POM RI, pemetaan kerawanan kejahatan yang dilakukan BBPOM di Bandung pada tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh data yang di-input 100,0 % disetujui (tidak ada data ditolak/ di-hold/perlu perbaikan).

Telah dilakukan kegiatan Penggalangan Lintas Sektor pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan tema Kolaborasi BBPOM di Bandung Bersaa Lintas Sektor CJS dan Jaringan Intelijen Dalam Keberhasilan Penanganan Perkara Obat Bahan ALam Ilegal Tahun 2025. Kegiatan dilakukan dalam bentuk panel diskusi yang diawali dengan pemberian materi dari berbagai narasumber. Lintas sektor yang dilibatkan antara lain Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, BINDA Jabar, Kementerian/lembaga lain, dan Organisasi perusahaan/ profesi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan tema yang ditetapkan.

Penyusunan analisis kerawanan kejahatan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Bandung telah dilaksanakan dengan baik. Dokumen pelaporan yang disampaikan tidak hanya dokumen Analisis Kejahatan yang telah disusun tetapi disertakan juga Form Penilaian Penyusunan Analisis Kejahatan dan Laporan Kegiatan Penyusunan Analisis Kejahatan. Penyampaian dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Pedoman Kegitan Cegah Tangkal.

Terhadap rekomendasi tindak lanjut analisis kerawanan kejahatan, baik yang bersumber dari analisis Direktorat Cegah Tangkal maupun yang bersumber dari analisis kejahatan yang disusun oleh BBPOM di Bandung, telah dilakukan hal-hal berikut:

- Penyebaran informasi rekomendasi kepada poksi-poksi lain yang terkait melalui Ketua Tim kerja.
- Komunikasi dengan para ketua tim kerja terkait mengenai rekomendasi yang diberikan dengan harapan agar ketua tim dapat melakukan sinergi dalam hal pelaksanaan rekomendasi dengan pelaksanaan tugas rutin.
- Secara rutin memantau tindak lanjut/ feedback dari poksi-poksi terkait.
- Penyusunan laporan feedback untuk disampaikan pada TW IV tahun 2025.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi dalam upaya mencapai target kinerja dan mengukur performa poksi di BBPOM di Bandung
2. Melaksanakan kegiatan penggalangan lintar sektor khususnya dalam lingkup CJS dan pihak-pihak lain yang dinilai dapat memberikan kontribusi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam lingkup cegah tangkal.
3. Melaksanakan penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan pada untuk mendapatkan sudut pandang komprehensif terkait tindak pidana kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagai hasil analisis dengan tujuan pengendalian atau

intervensi terhadap kejahatan yang akan atau sedang terjadi berdasarkan pendekatan Cegah Tangkal.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.97
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	100,74%	97.26%	1.04	0.04	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-7 LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung pada akhir Tahun. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.98.

TABEL 3.1.98
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
1. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.92	104.68	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104.68	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D melalui pengukuran secara sistematis dengan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Tim penilai PEKPPP di lingkungan BPOM ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM, dan dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Penilaian dilakukan berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); Profesionalisme SDM (25%); Sarana Prasarana (18%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan Inovasi (12%).

Terdapat 3 (tiga) jenis kuesioner yang digunakan dalam penilaian PEKPPP, yaitu Formulir F-01 yaitu penilaian mandiri yang diisi oleh unit penyelenggara

pelayanan untuk memperoleh data perspektif; Formulir F-02 yaitu penilaian yang dilakukan oleh tim penilai berdasarkan penyampaian dokumen yang disampaikan dan verifikasi data melalui wawancara untuk memperoleh nilai objektif; Formulir F-03 yang diisi oleh pengguna layanan untuk memperoleh data persepsi.

Penetapan nilai Indeks Pelayanan Publik berdasarkan pembobotan Formulir F02 dan Formulir F03 untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik, dengan persentase F02 : F03 yaitu 75% : 25%.

Kategori nilai:

TABEL 3.1.99

KATEGORI NILAI INDEKS PELAYANAN PUBLIK

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP) telah dilaksanakan oleh tim penilai dari berbagai unit kerja di BPOM pusat. Penilaian dilakukan dengan melihat data dukung terhadap 6 (enam) aspek yang telah disajikan, dan dilakukan wawancara konfirmasi. Berdasarkan penyampaian data dukung dan hasil wawancara tersebut, BBPOM di Bandung memperoleh nilai 4,92 dengan predikat "Pelayanan Prima".

Hasil PEKPPP BBPOM di Bandung digambarkan sebagai berikut:



Formulir	Kode	Aspek	Bobot	Indeks per Aspek
F02	I	Kebijakan Pelayanan	24%	5
	II	Profesionalisme SDM	25%	5
	III	Sarana Prasarana	18%	5
	IV	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4.7
	V	Konsultasi dan Pengaduan	10%	5
	VI	Inovasi	12%	4.5
Indeks Formulir F02			4.91	
Indeks Formulir F03			4.96	
Indeks Pelayanan Publik			4.92	



TABEL 3.1.100

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

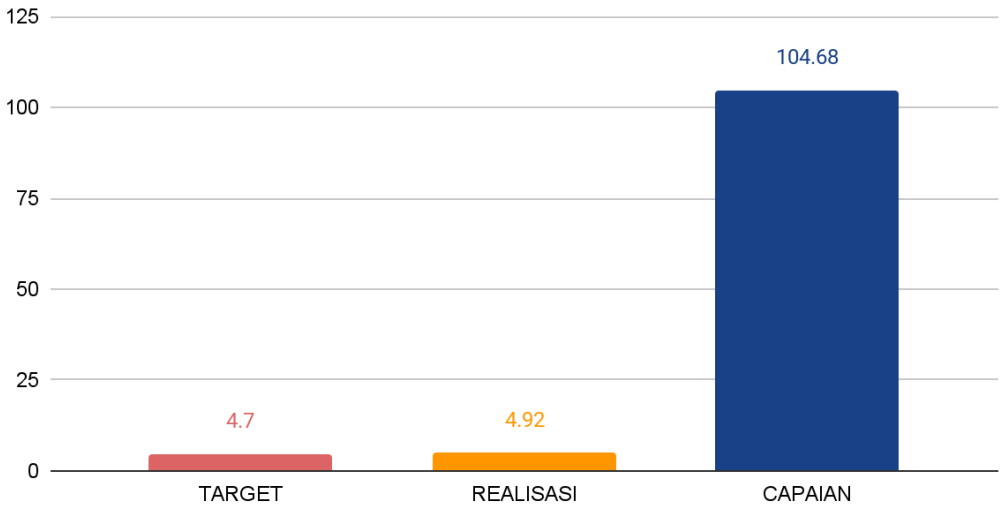
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.92	104.68	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 4.7. Indeks Pelayanan Publik UPT BBPOM di Bandung sebesar 4.92. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 104.68% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.47
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

Target Indeks Pelayanan Publik pada Rencana Strategis Tahun 2029 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah 4,90. Jika realisasi kinerja pada tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100,41% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

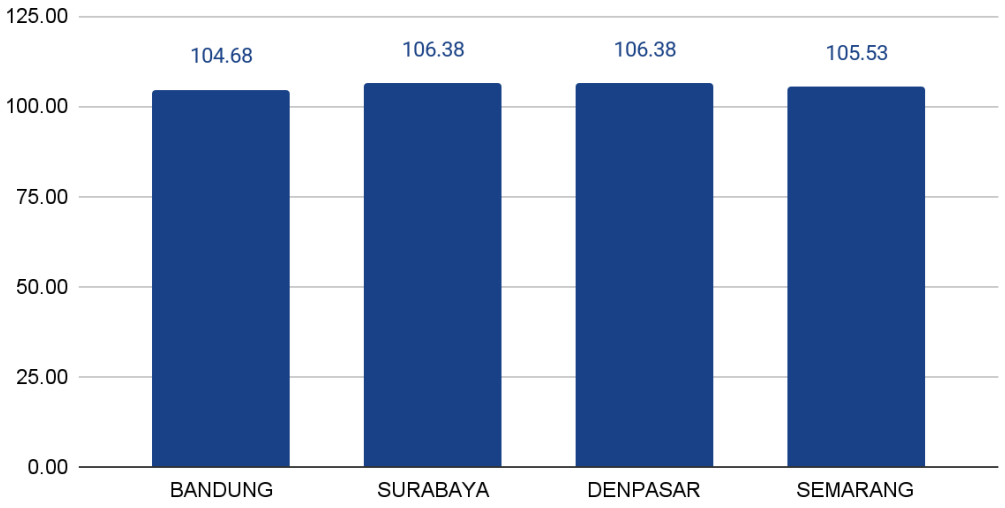
TABEL 3.1.101
PERBANDINGAN REALISASI TW 3 DENGAN TARGET TAHUNAN
INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	4,92	100,41%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.48
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Pelayanan Publik yang dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian seluruhnya melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian yang diperoleh berdasarkan urutan tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Denpasar dengan capaian 106,38%, diikuti BBPOM di Semarang dengan capaian 105,53%, dan selanjutnya BBPOM di Bandung dengan capaian 104,68%. Seluruh Balai telah melampaui target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung pada tahun 2025 antara lain karena pemenuhan indikator pelayanan publik yang tertuang pada PEKPPP sebagai berikut:

- Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik (SPP) terhadap 10 (sepuluh) jenis layanan yang diberikan BBPOM di Bandung, disesuaikan dengan regulasi terkini, peningkatan inovasi, analisis risiko, dan menyesuaikan dengan perkembangan layanan terkini, serta memastikan SPP yang disusun mencantumkan 14 (empat belas) komponen layanan.
- Melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan publikasi rancangan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai unsur di masyarakat yang diselenggarakan setiap tahun. Masukan/pendapat diperoleh dari unsur pengguna layanan (pelanggan) seluruh jenis layanan yang diberikan, unsur organisasi masyarakat sipil, unsur pemerintah/stakeholder lainnya, unsur akademisi/ahli, serta unsur media massa. Selain itu, diundang juga stakeholder yang dapat memberikan masukan tentang layanan untuk kelompok rentan. SPP yang telah ditetapkan selanjutnya dipublikasi yang mencantumkan komponen service delivery di berbagai media publikasi.
- Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan dan mempublikasikannya di berbagai media publikasi.
- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan secara berkala untuk seluruh jenis layanan, menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil SKM, melaporkan hasil dan kecepatan tindak lanjut hasil SKM, serta mempublikasikan hasil SKM di berbagai media publikasi.
- Memelihara dan meningkatkan kompetensi SDM pelayanan publik, melaksanakan pertemuan rutin untuk penyamaan persepsi, komunikasi, dan diseminasi serta memberikan motivasi dalam pelayanan, terdapat mekanisme reward and punishment, memiliki budaya pelayanan, serta menjaga kode etik dan kode perilaku dalam pelaksanaan pelayanan.
- Memelihara dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik seperti tempat parkir, toilet, fasilitas di ruang layanan, fasilitas untuk kelompok rentan, sistem antrian, dan sarana penunjang lainnya.
- Memastikan tersedianya sistem informasi pelayanan publik dapat berfungsi dengan baik, informatif, dan dimutakhirkan secara rutin antara lain melalui website, media sosial, serta SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional).
- Tersedianya media untuk pelaksanaan konsultasi dan pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat serta melakukan monitoring,

evaluasi, dan menindaklanjutinya, seperti kanal SP4N Lapor, media sosial, dan kanal lainnya.

- Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang dapat memudahkan pelanggan dan pemberi layanan sehingga layanan bisa lebih cepat, mudah, dan prima.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik untuk seluruh jenis layanan.
- Mengembangkan mutu sistem informasi pelayanan publik dengan melakukan pemutakhiran setiap hari kerja.
- Mengembangkan pelayanan publik inklusif untuk kelompok rentan.
- Mendapatkan saran dan masukan dari pelanggan melalui survei.
- Mengembangkan inovasi layanan publik serta melakukan pengukuran dampak dari inovasi yang telah diterapkan.
- Mengikutsertakan inovasi unggulan ke dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2025:

- BBPOM di Bandung hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga memudahkan akses pelanggan. Sepanjang tahun 2025, jumlah pelanggan yang telah memanfaatkan layanan BBPOM di Bandung di MPP Kota Bandung sebanyak 61 layanan, MPP Kabupaten Bandung sebanyak 19 layanan, MPP Kota Cimahi sebanyak 16 layanan, dan MPP Provinsi Jawa Barat sebanyak 10 layanan.
- Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 BBPOM di Bandung yaitu 93,16. Selain itu, pelaksanaan SKM mandiri setiap triwulan dengan hasil sebagai berikut: triwulan I (95,05); triwulan II (94,06), triwulan III (95,97), dan triwulan IV (97,57). Keseluruhan hasil survei menunjukkan bahwa kategori tingkat kualitas mutu pelayanan adalah "A" atau "Sangat Baik." BBPOM di Bandung menindaklanjuti 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah dari hasil SKM, dan menindaklanjuti saran dan masukan dari pelanggan.

- Mengembangkan inovasi SATU POM Jabar yaitu aplikasi terpadu layanan publik BBPOM di Bandung untuk mendukung kemudahan akses layanan diantaranya Satset (pengajuan persetujuan denah bagi PBF).
- Inovasi Prabu UMKM Juara (Pendampingan Pelaku Usaha Berdaya Unggul Jadikan UMKM Juara), yang sebelumnya bernama Booster UMKM Juara, mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan KemenPAN RB untuk kategori Kelompok Replikasi mewakili instansi Badan POM, dengan hasil lolos seleksi administrasi.
- BBPOM di Bandung mengikutsertakan 3 (tiga) inovasi pelayanan publik dalam lomba KOIN BPOM, yaitu kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh Badan POM. Inovasi PASUPATI berhasil meraih Top 22 dalam KOIN BPOM, sedangkan dua inovasi lainnya yaitu inovasi Prabu UMKM Juara dan inovasi 1POM Jabar dengan hasil Top 97 yaitu lolos seleksi administrasi.



- BBPOM di Bandung mengadakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tanggal 28 Mei 2025 yang melibatkan pengguna layanan, ahli/ praktisi/ akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat dan media massa untuk penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik.



- Sebagai wujud pengembangan sinergi dan kolaborasi dalam hal pendampingan UMKM, BBPOM di Bandung melakukan penandatangan komitmen bersama dengan RUMAH BUMN pada tanggal 28 Mei 2025. RUMAH BUMN akan mengadopsi program yang tertuang dalam inovasi Prabu UMKM Juara.



- BBPOM di Bandung melakukan kunjungan dan berdiskusi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Oktober 2025 untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan sebagai upaya untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Di tahun 2025, BBPOM di Bandung berhasil mempertahankan predikat "Informatif" dalam hal Keterbukaan Informasi Publik.



- BBPOM di Bandung memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan inklusif untuk kelompok rentan, seperti menambah fasilitas pegangan tangan di jalur kursi roda, melengkapi fitur komunikasi "talkback" dan aplikasi transkripsi "speech to text" di telepon genggam petugas layanan, penambahan kacamata baca, dan lain-lain. Untuk memperluas perspektif layanan yang ramah bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas, BBPOM di Bandung melakukan kunjungan ke Sentra Wyata Guna pada tanggal 10 Oktober 2025. Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan yang diselenggarakan Badan POM, persentase tingkat aksesibilitas untuk pelayanan kelompok rentan yang diperoleh BBPOM di Bandung adalah 87,35% dengan kategori "Terbaik".
- Untuk menjaga dan memelihara kompetensi petugas pelayanan publik, BBPOM di Bandung menyelenggarakan pelatihan yang diikuti oleh petugas layanan publik. Tema pelatihan yaitu "Effective Communication Training" dilaksanakan pada tanggal 19 November 2025.



- Kegiatan koordinasi, konsultasi, dan diskusi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM tanggal 18 Desember 2025 dengan topik layanan SKI, SKE, dan SMKPO. Kegiatan ini untuk meningkatkan transparansi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif.



- Selama tahun 2025, pelayanan publik yang diberikan BBPOM di Bandung adalah sebagai berikut:
  a. Layanan Sertifikasi

     Pada Tahun 2025, Poksi Sertifikasi Balai Besar POM di Bandung melaksanakan pelayanan sertifikasi dan rekomendasi teknis di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai kewenangan yang ditetapkan.

     Pada renstra tahun 2025-2029, sertifikasi tidak lagi menjadi indikator kinerja utama, namun pelaksanaannya

     Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

     1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT;
     2) Laporan pendampingan petugas pusat dalam pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi/surat persetujuan (jika diperlukan);
     3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
     4) Surat rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem

esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang;

5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang;
6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru dan sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran;
8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB;
9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK;
10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik;
11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; dan
12) Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Pelaksanaan berbagai jenis layanan tersebut menunjukkan peran strategis Poksi Sertifikasi dalam mendukung kelancaran peredaran produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Target dan Indikator Kinerja

Target kinerja layanan sertifikasi Poksi Sertifikasi BBPOM di Bandung pada awal Tahun 2025 ditetapkan sebesar 1.310 layanan sertifikasi, yang mencakup seluruh jenis layanan sebagaimana ruang lingkup tugas Poksi Sertifikasi.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian meliputi:

- Jumlah layanan sertifikasi yang dilaksanakan, dan
- Tingkat penyelesaian layanan sesuai standar waktu pelayanan.

Pada akhir Triwulan IV Tahun 2025, seiring dengan pembukaan blokir anggaran kegiatan sertifikasi, dilakukan penyesuaian target kinerja menjadi 1.750 layanan sertifikasi, guna mengoptimalkan pemanfaatan anggaran serta meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Capaian Kinerja

Secara umum, capaian kinerja layanan sertifikasi pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan responsif, terutama dalam merespons dinamika kebijakan anggaran dan kebutuhan layanan dari pelaku usaha.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun 2025, realisasi layanan sertifikasi Poksi Sertifikasi BBPOM di Bandung mencapai 1.924 layanan, dari target kinerja yang telah disesuaikan sebesar 1.750 layanan. Dengan demikian, capaian kinerja layanan sertifikasi Tahun 2025 mencapai 109,94%.

Capaian kinerja yang melampaui target tersebut menunjukkan bahwa Poksi Sertifikasi mampu merespons secara optimal dinamika kebutuhan layanan sertifikasi dari masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia secara efektif pada akhir tahun anggaran

Berdasarkan capaian layanan sertifikasi Tahun 2025, Poksi Sertifikasi BBPOM di Bandung:

a. Mampu melaksanakan layanan sertifikasi untuk seluruh jenis layanan yang menjadi kewenangan, termasuk layanan perizinan, sertifikasi, rekomendasi, surveilan, audit, dan pengujian pihak ketiga.
b. Menunjukkan peningkatan volume layanan seiring dengan penyesuaian target kinerja pada akhir Tahun 2025.
c. Sebagian besar layanan sertifikasi dapat diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan, meskipun terdapat sebagian kecil layanan yang mengalami keterlambatan dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pembahasan dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja layanan sertifikasi Poksi Sertifikasi Balai Besar POM di Bandung pada Tahun 2025 mencapai **109,94%**, dengan realisasi sebanyak **1.924 layanan** dari target yang telah disesuaikan sebesar **1.750 layanan**. Capaian kinerja di atas 100% tersebut **tidak menunjukkan ketidaktepatan dalam perencanaan kinerja**, melainkan mencerminkan karakteristik indikator kinerja layanan sertifikasi yang bergantung pada permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha.

Layanan sertifikasi merupakan layanan publik yang pelaksanaannya sangat bergantung pada **jumlah permohonan dari pelaku usaha**, sehingga volume layanan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan atau ditetapkan secara pasti sejak awal tahun. Penetapan target kinerja dilakukan berdasarkan proyeksi dan rata-rata capaian tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya dan anggaran yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, jumlah permohonan sertifikasi yang masuk pada Tahun 2025 mengalami peningkatan, khususnya setelah dilakukan **pembukaan blokir anggaran sertifikasi pada akhir Triwulan IV**, yang memungkinkan optimalisasi pelayanan terhadap seluruh permohonan yang diterima. Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, Poksi Sertifikasi tetap melaksanakan seluruh permohonan layanan yang masuk sesuai ketentuan, tanpa melakukan pembatasan kuota layanan, sepanjang didukung oleh ketersediaan anggaran dan sumber daya.

Dengan demikian, capaian kinerja yang melampaui target tersebut merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan layanan sertifikasi dari pelaku usaha serta responsivitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tidak mengindikasikan penurunan mutu perencanaan maupun pelaksanaan kinerja. Justru sebaliknya, capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Poksi Sertifikasi serta tingginya tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap layanan sertifikasi BBPOM di Bandung.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Bimbingan Teknis UMKM Pangan Olahan

   Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pangan Olahan yang diselenggarakan secara daring untuk 18 UMKM pangan olahan pada tanggal 24-26 Maret 2025 yang merupakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan. Pada kegiatan ini para pelaku usaha

diberikan pemaparan materi terkait seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), E-Sertifikasi dalam Rangka Izin Penerapan CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan melali E-Reg RBA.

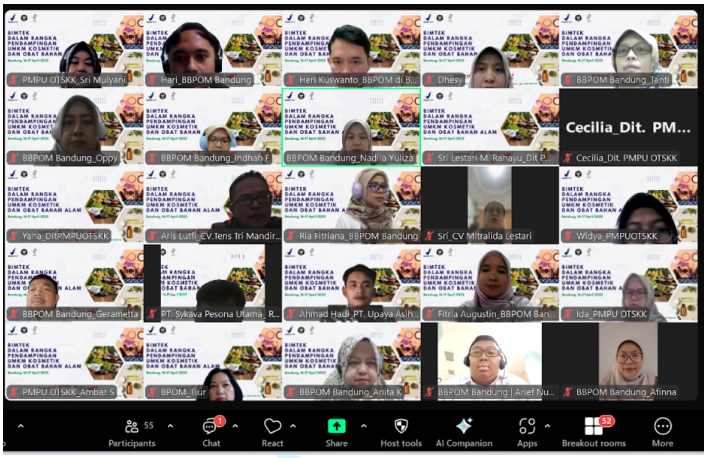


Gambar ….. Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan

2. Bimtek Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Bahan Alam

   Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 April 2025 kepada para 10 pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik yang merupakan peserta program Pendampingan UMKM. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPOTB/CPKB dan persyaratan pendaftaran OT/Kos, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.





Gambar....Bimtek Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Bahan Alam

3. Desk CAPA dan Sosialisasi Perizinan Untuk Pelaku Usaha

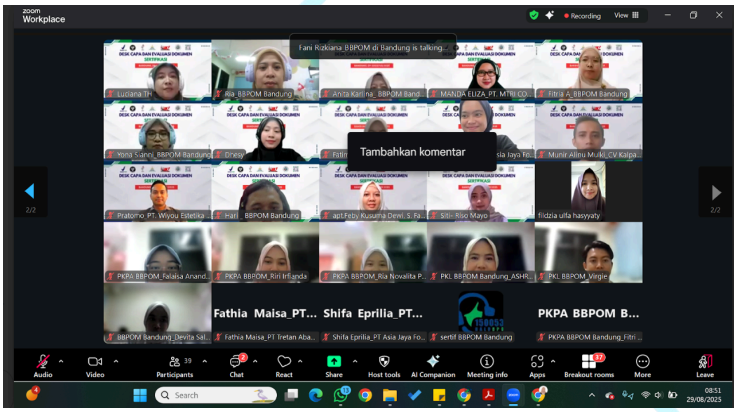
   Sosialisasi Keamanan Pangan yang diselenggarakan secara daring dan terbuka untuk seluruh UMK pangan olahan dan dilanjutkan dengan kegiatan Desk CAPA pada tanggal 25-26 Mei 2025. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), E-Sertifikasi dalam Rangka Izin Penerapan CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan melalui E-Reg RBA. Pada hari kedua dilanjutkan dengan Desk CAPA bagi para pelaku usaha yang sedang berproses perizinan.

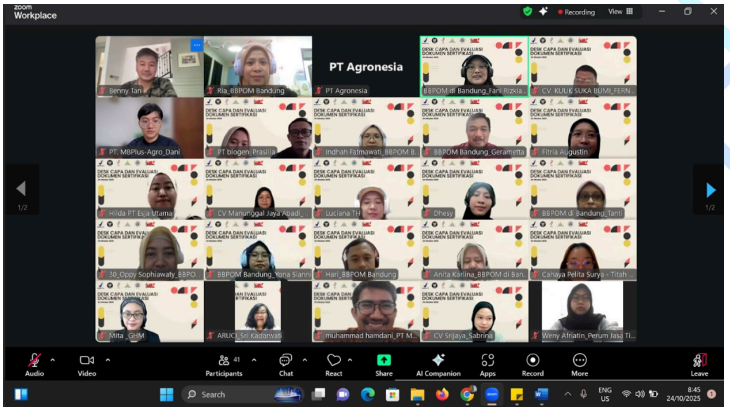
4. Desk CAPA dan Evaluasi Dokumen

   Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen CAPA Sertifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025; 29 Agustus 2025; dan 24 Oktober 2025 baik yang diselenggarkan di Aula Balai Besar POM di Bandung ataupun yang dilaksanakan melalui daring dengan mengundang para pelaku usaha yang sedang berproses perizinan Balai Besar POM di Bandung









Gambar… Desk CAPA dan Evaluasi Dokumen

5. Sosialisasi dan Desk Registrasi Prabu UMKM Juara Batch 1

   Sosialisasi dan Desk Registrasi Prabu UMKM Juara bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Bagan POM RI dilaksanakan kegiatan pada tanggal 25 dan 26 Juni 2025 yang dIIIkuti oleh 50 pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha yang menjadi peserta pada kegiatan ini merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BBPOM di Bandung untuk tahun 2024 dan 2025. Para pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan

pendaftaran produk pangan olahan oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 22 nomor izin edar (NIE) dan 8 akun Perusahaan.





Gambar…Sosialisasi dan Desk Registrasi Prabu UMKM Juara Batch 1

6. Desk Evaluasi Dokumen CAPA Sertifikasi Prabu UMKM Juara

   Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen CAPA Sertifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2025 di Hotel El Royal dengan mengundang para pelaku usaha yang sedang berproses perizinan Balai Besar POM di Bandung, pada kegiatan ini diterbitkan Sertifikat IP CPPOB untuk para peserta yang dapat melengkapi dokumen selama kegiatan berlangsung.





7. Sosialisasi dan Desk Registrasi Prabu UMKM Juara Batch 2

   Sosialisasi dan Desk Registrasi Prabu UMKM Juara bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Bagan POM RI dilaksanakan kegiatan pada tanggal 25 dan 26 November 2025 yang diikuti oleh 50 pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha yang menjadi peserta pada kegiatan ini merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BBPOM di Bandung untuk tahun 2024 dan 2025. Para pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 5 akun perusahaan, 11 Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan dan 24 Nomor Izin Edar (NIE).





b. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan sebanyak 3.056 layanan yang terdiri dari layanan informasi sebanyak 3.036 layanan, dan layanan pengaduan masyarakat sebanyak 20 layanan.

c. Layanan Pengujian Pihak Ketiga

Layanan pengujian pihak ketiga tahun 2025 sebanyak 601 layanan terdiri dari pihak ketiga kepolisian dan non kepolisian. Proses pelayanan didukung aplikasi SIPT Pihak Ketiga yang mempermudah pihak ketiga untuk mengunduh Sertifikat Hasil Pengujian secara mandiri.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.102
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT"
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	104.68%	99.45%	1.05	0.05	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-8 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang diukur pada akhir Tahun. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.103.

TABEL 3.1.103
KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
1. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.50	91.92	100.46	Sangat Baik	
2. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.10	81.35	97.89	Baik	
3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	5	100.00	Baik	
4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	2.938	99.59	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			99.49	Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT BALAI BESAR DI BANDUNG

   Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

a. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan.
b. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

TABEL 3.1.104

KRITERIA PENILAIAN PMPZI

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

TABEL 3.1.74

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

"NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT"

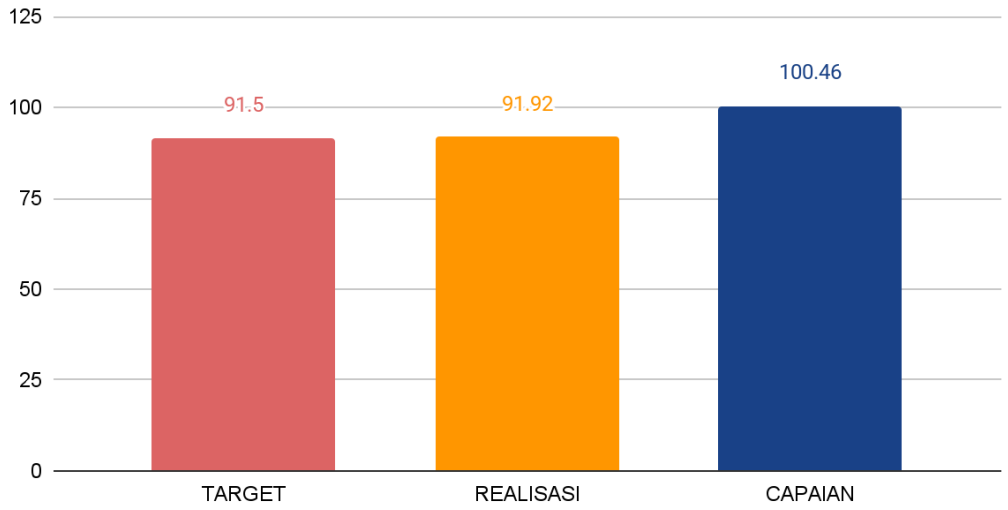
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Nilai Pembangunan ZI UPT	91.50	91.92	100.46	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91.5. Nilai Pembangunan ZI UPT BBPOM di Bandung sebesar 91.92. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100.46% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.49
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

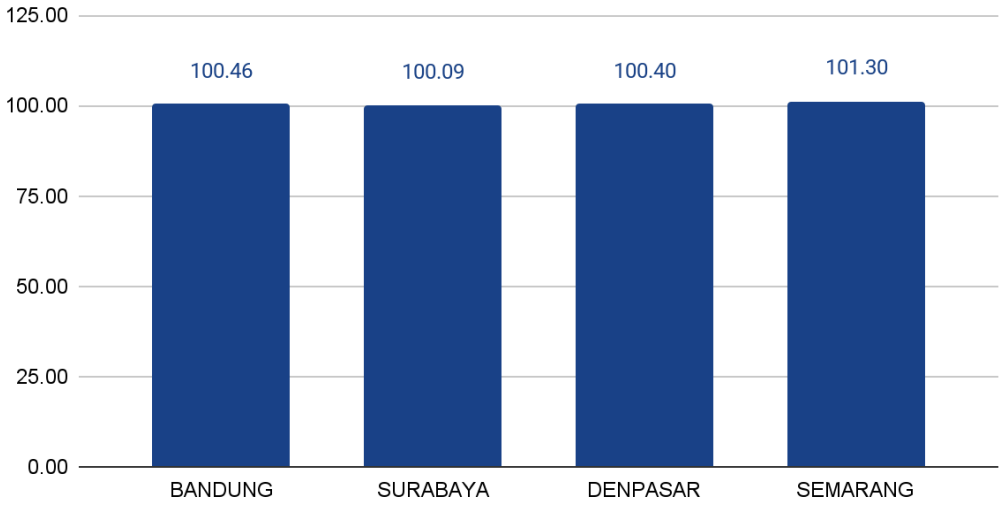
Target Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan pada indikator Nilai Pembangunan ZI UPT adalah sebesar 92.50%. Jika realisasi kinerja pada TA 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada TA 2025 sebesar 99.37% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.105
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2029
NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Nilai Pembangunan ZI UPT	92.50	91.92	99.37	Akan Tercapai	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.50
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Pada Tahun 2025, Jika realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka Nilai Pembangunan ZI UPT pada tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya sebesar 94.06%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 93.63%, Balai Besar POM di Denpasar sebesar 92.29%, dan Balai Besar POM di Bandung sebesar 91.92%.

Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Semarang sebesar 101.30%, Balai Besar POM di Bandung sebesar 100.46%, Balai Besar POM di Denpasar 100.40%, dan Balai Besar POM di Surabaya sebesar 100.09%.

Sedangkan dibandingkan dengan Target Nasional sebesar 96.3%, maka Capaian Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar POM di Bandung 88.52%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan III tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Balai Besar POM di Bandung telah melakukan pembangunan ZI secara konsisten dan berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2021. Balai Besar POM di Bandung juga telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi ZI.
- BBPOM di Bandung telah membangun lingkungan pengendalian disetiap kegiatan dengan adanya aplikasi pengendalian yang mendukung pelaksanaan Reformasi Briokrasi di BBPOM Bandung, diantaranya : Aplikasi SIADO, Aplikasi SiMangga, Mini handbook anti gratifikasi, dan Kuisioner Identifikasi Resiko Pegawai.
- Inovasi Pelayanan Publik antara lain LACAK PASTI, KELOM GEULIS, KABAYAN, SIPETA, SI ITEUNG, WARTA POPA, MELODI POPA, Kerjasama TV dan Radio Desa dalam Iklan Layanan Masyarakat, , Layanan Sertifikasi secara Daring, Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola. Beberapa inovasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat pada subsite BBPOM di Bandung yang berisi berbagai link aplikasi dan media pelayanan publik seperti BIC, KABAYAN, SI ITEUNG, LAPOR, Booster UMKM JUARA dan terintegrasi dengan BANDUNG SMART CITY smartcity.bandung.go.id.
- Upaya mendorong perbaikan pelayanan publik diwujudkan dalam inovasi BOOSTER UMKM JUARA yang menyediakan layanan sertifikasi dan pendampingan UMKM pada tahap pemeriksaan sarana oleh Balai atau registrasi dan meningkatkan kompetensi pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan desk CAPA dan desk registrasi.
- Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,64 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,86 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.
- Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 tidak memenuhi persyaratan minimal KemenPANRB (syarat minimal 3,75) untuk dapat diusulkan

WBBM. Hal ini menyebabkan penurunan nilai komponen hasil dan juga nilai PMPZI secara keseluruhan.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya berdasarkan Surat Inspektur Utama Nomor: B-PI.06.06.7.11.24.642 tanggal 28 November 2024 Perihal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Balai Besar POM di Bandung, adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan menetapkan program prioritas pada setiap area perubahan dalam rencana kerja pembangunan ZI
- Menindaklanjuti seluruh rencana tindak lanjut pembangunan ZI sesuai dengan rekomendasi dan mendokumentasikannya.
- Menyusun dan menetapkan ukuran keberhasilan pemanfaatan dan implementasi program Agent of Change (AoC)
- Menyusun laporan implementasi pemanfaatan inovasi pelayanan publik dengan yang dilengkapi dengan matriks before-after.
- Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis dengan rencana tindak lanjut yang relevan.
- Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Sosialisasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung tahun 2024.
- Forum Konsultasi Publik dan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor.
- Rencana Aksi Agen Perubahan BBPOM di Bandung dalam upaya menginternalisasi setiap inovasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar POM di Bandung merupakan upaya komitmen dalam pembangunan Zona Integritas.
- Inovasi aplikasi SATU POM JABAR yang mengintegrasikan seluruh inovasi elektronik yang dikembangkan Balai Besar POM di Bandung sebagai bentuk upaya penataan tata laksana yang baik. Sistem pengendalian dokumen mutu yang diinovasikan melalui SIADO merupakan sistem

administrasi dokumen yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengendalian dokumen mutu yang dapat diakses pegawai dan masyarakat.

- Inovasi SIDAKEP (Sistem Data Kepegawaian) merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai pusat informasi sumber daya manusia atau kepegawaian di Balai Besar POM di Bandung.
- Inovasi MANEKIN merupakan website yang mengintegrasikan seluruh proses manajemen kinerja Balai Besar POM di Bandung secara terstruktur dan terorganisir mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring evaluasi, laporan kinerja dan pemberian pengharagaan dan sanksi berdasarkan capaian kinerja.
- Inovasi link Lapor yang dibentuk menjadi media pelaporan bagi pegawai dan masyarakat atas pelanggaran berupa gratifikasi, WBS, dan benturan kepentingan serta telah disosialisasikan melalui berbagai media.
- Inovasi BOOSTER UMKM JUARA yang menyediakan layanan sertifikasi dan pendampingan UMKM pada tahap pemeriksaan sarana oleh Balai atau registrasi dan meningkatkan kompetensi pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan desk CAPA dan desk registrasi.
- Pemanfaatan berbagai media sosial yang dimiliki BBPOM di Bandung sebagai media komunikasi publik untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program dan kegiatan, kinerja dan KIE Obat dan Makanan yang terkini dll.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.106
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI UPT	100.46%	99.95%	1.01	0.01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BBPOM di Bandung disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

2. NILAI AKIP UPT

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk menilai pelaksanaan SAKIP, sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka diperlukan suatu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP, yang merupakan aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Hasil dari evaluasi ini adalah berupa Nilai AKIP.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

TABEL 3.1.107

BOBOT KOMPONEN PENILAIAN AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12

4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Nilai AKIP akan menggambarkan kondisi dari akuntabilitas kinerja dari suatu entitas organisasi, melalui penentuan Predikat nilai AKIP sebagai berikut:

TABEL 3.1.108

PREDIKAT NILAI AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sebagaimana Nota Dinas dari Inspektur Utama Badan POM nomor PI.04.71.7.01.26.03 tanggal 03 Januari 2026, nilai AKIP BBPOM di Bandung Tahun 2025 adalah sebesar 81,35 dengan predikat A. dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut :

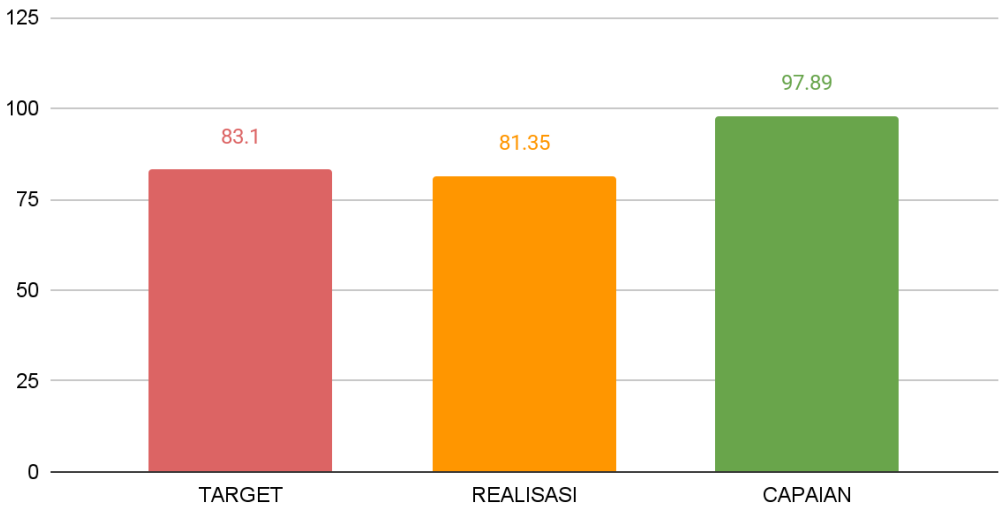
TABEL 3.1.109
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
NILAI AKIP UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Nilai AKIP UPT	83.1	81.35	97.89	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83.1. Nilai AKIP UPT BBPOM di Bandung sebesar 81.35. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 97.89% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.51
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Tahun sebelumnya

Pada Tahun 2025, realisasi indikator nilai AKIP lebih rendah 1,68 poin dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024. Penurunan nilai ini ada pada komponen Capaian Kinerja, sedangkan komponen lainnya memiliki nilai yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.1.110
RINCIAN NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan / Penurunan nilai)
			2024	2025	
1	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16	0
2	Pengukuran Kinerja	24	20,16	20,16	0
3	Pelaporan Kinerja	12	10,08	10,08	0
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	16,80	0
5	Capaian Kinerja	20	15,83	14,15	-1,68
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,03	81,35	-1,68
Predikat			A	A	

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

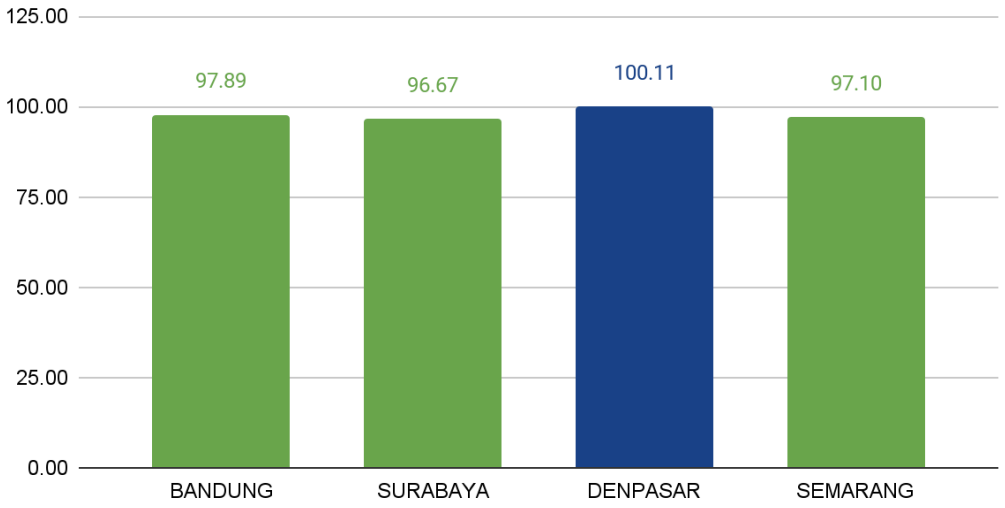
Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 83.70%. Jika realisasi kinerja pada TA 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada TA 2025 sebesar 97.19% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.111
PERBANDINGAN REALISASI TA 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2029
NILAI AKIP UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Nilai AKIP UPT	83.70	81.35	97.19	Akan Tercapai	

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.52
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Pada Tahun 2025, Jika realisasi Nilai AKIP UPT dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka Nilai AKIP UPT pada tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya sebesar 82.56%, Balai Besar POM di Bandung

sebesar 81.35%, Balai Besar POM di Denpasar sebesar 79.77%, dan Balai Besar POM di Semarang sebesar 79.62%.

Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Denpasar 100.11%, Balai Besar POM di Bandung sebesar 97.89%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 97.10%, dan Balai Besar POM di Surabaya sebesar 96.67%.

E. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Berdasarkan hasil penilaian SAKIP, komponen yang mengalami penurunan adalah Capaian Kinerja, sebesar 1,68. Hal ini dikarenakan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 sebesar 104,13 lebih rendah dibandingkan NKO tahun 2024, sebesar 104,63.
- Penurunan NKO terjadi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :
  a. Adanya perubahan penetapan capaian indikator kinerja sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM no 656 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, batas capaian kinerja yang dapat disimpulkan maksimal 110%, apabila capaian kinerjanya lebih dari 110%, maka dinyatakan tidak dapat disimpulkan dan nilainya akan dinormalisasi menjadi 110%. Sedangkan pada ketentuan sebelumnya batas capaian kinerja dan normalisasinya ada pada nilai 120%.
  b. Adanya 3 (tiga) Target Indikator Kinerja yang tidak tercapai, yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder; Nilai AKIP UPT BPOM; dan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Peningkatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja IKU, terutama untuk 3 Indikator Kinerja yang belum mencapai target.
- Melakukan usulan penyesuaian target kinerja bulanan, sesuai dengan proyeksi realisasi kinerja yang dapat dicapai.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Membuat sistem penyelenggaraan manajemen kinerja yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan monev
- Upaya peningkatan realisasi dan capaian IKU, yang dapat dilihat pada penjelasan masing-masing IKU.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.112
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
NILAI AKIP UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Nilai AKIP UPT	97.89%	94.18%	1.04	0.04	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Nilai AKIP UPT BBPOM di Bandung disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

3. NILAI KINERJA ANGGARAN UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)

7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Perencanaan Anggaran merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran :

TABEL 3.1.113
KATEGORI KONVERSI NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Bandung memperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 95.67, dengan rincian nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 92.98 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 98.36. Dengan demikian nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung termasuk dalam kategori "Sangat Baik" dengan konversi nilai sebesar 5.

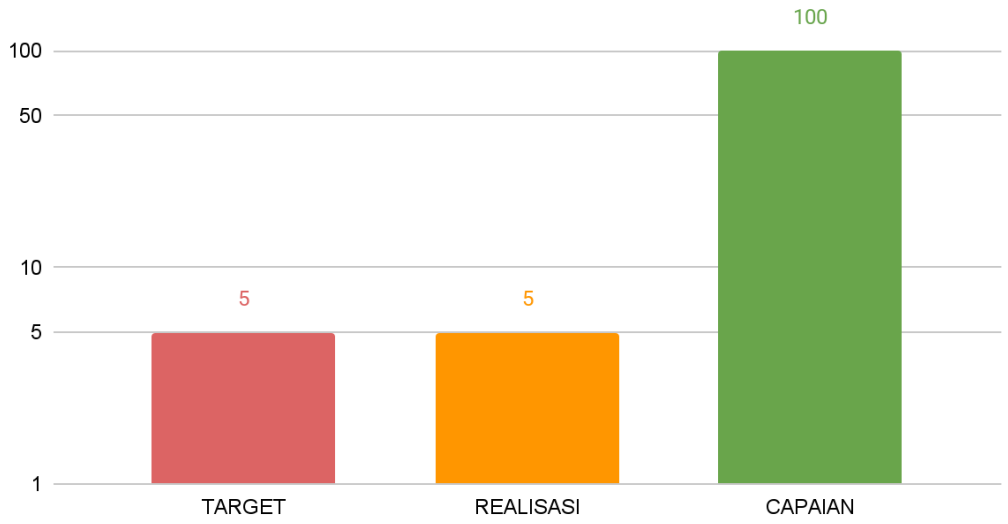
TABEL 3.1.114
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
NILAI KINERJA ANGGARAN UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	100	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 5, sedangkan realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BBPOM di Bandung sebesar 5. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.53
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

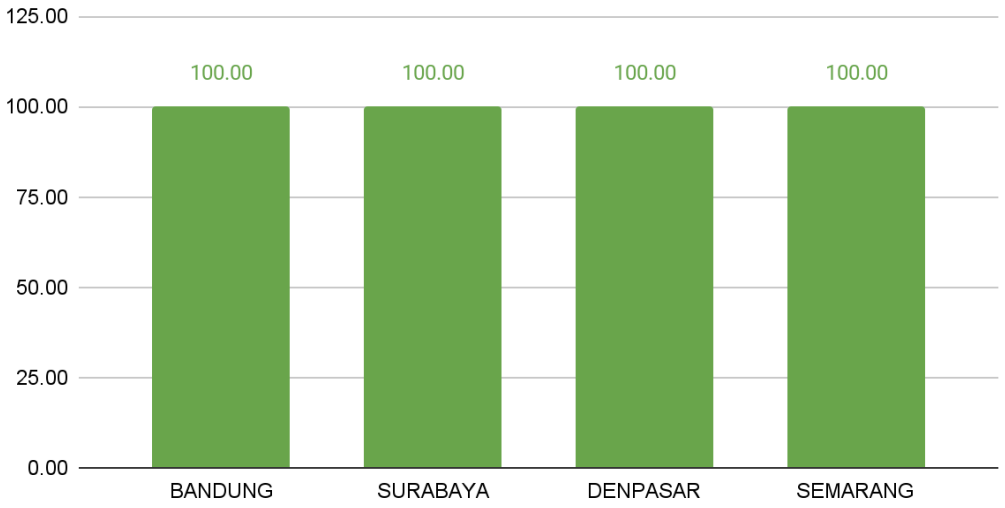
Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 5. Jika realisasi kinerja pada TA 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada TA 2025 sebesar 100% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.115
PERBANDINGAN REALISASI TW 3 DENGAN TARGET TAHUNAN
INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	100	Tercapai	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.54
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Pada Tahun 2025, Jika realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka Nilai Kinerja Anggaran UPT pada tahun 2025 seluruh UPT memiliki nilai realisasi dan Capaian Kinerja sama yaitu 100%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Pada nilai perencanaan Anggaran, nilai maksimal 100 hanya didapatkan dalam komponen penggunaan SBK, sedangkan nilai komponen yang paling rendah adalah komponen efisiensi SBK, sebesar 77,90. Hal ini dikarenakan efisiensi RO SBKK Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan tidak dapat mencapai nilai maksimal, hanya sebesar 11,15%.
- Pada nilai pelaksanaan anggaran, nilai maksimal 100 didapatkan oleh komponen Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, serta Pengelolaan UP dan TUP. Nilai komponen paling kecil ada pada komponen Revisi Halaman III DIPA, sebesar 93,14. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan relaksasi anggaran yang dapat mempengaruhi perencanaan pelaksanaan kegiatan dan realisasi

anggarannya, sehingga tidak sesuai dengan rencana penarikan dana yang sudah disusun sebelumnya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran, sehingga mengurangi pelaksanaan revisi DIPA yang dapat mengurangi nilai pelaksanaan anggaran
- Meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk keperluan pembayaran belanja/tagihan pelaksanaan kegiatan, sehingga akan meningkatkan nilai pelaksanaan anggaran
- Meningkatkan monitoring belanja kontraktual dan pembayaran tagihan, sehingga dapat selesai dilaksanakan sesuai standar waktu yang ditetapkan.
- Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada RO SBKK Perkara dan SBKU Layanan BMN

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan peningkatan kompetensi petugas khususnya pada pengelola keuangan, seperti melalui sosialisasi keuangan dan pajak, dan pelatihan sertifikasi PPK, yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tim pengelola keuangan.
- Penerapan sistem tata kelola yang terintegrasi antara pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangannya, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pembayaran tagihan, serta memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggarannya.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.116
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
NILAI KINERJA ANGGARAN UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran UPT	100,00%	99.05%	1.01%	0.01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Nilai Kinerja Anggaran UPT BBPOM di Bandung disimpulkan Efisien (0<1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

4. INDEKS MANAJEMEN RISIKO UPT

Indeks Manajemen Risiko adalah nilai tingkat maturitas implementasi manajemen risiko di suatu organisasi. Manajemen Risiko ini merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib mengimplementasikan manajemen risiko dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

TABEL 3.1.117

KARAKTERISTIK TINGKAT MATURITAS

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
	umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
b. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
c. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Tingkat maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko, yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

TABEL 3.1.118

NILAI MATURITAS MANAJEMEN RISIKO

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Pada tahun 2025, sebagaimana Nota Dinas Inspektur Utama Badan POM nomor PI.06.07.71.7.01.26.02 tanggal 02 Januari 2026, hasil penilaian tingkat

maturitas manajemen risiko BBPOM di Bandung adalah sebesar 2,938, dengan capaian seperti pada Tabel 3.1.74 sebagai berikut:

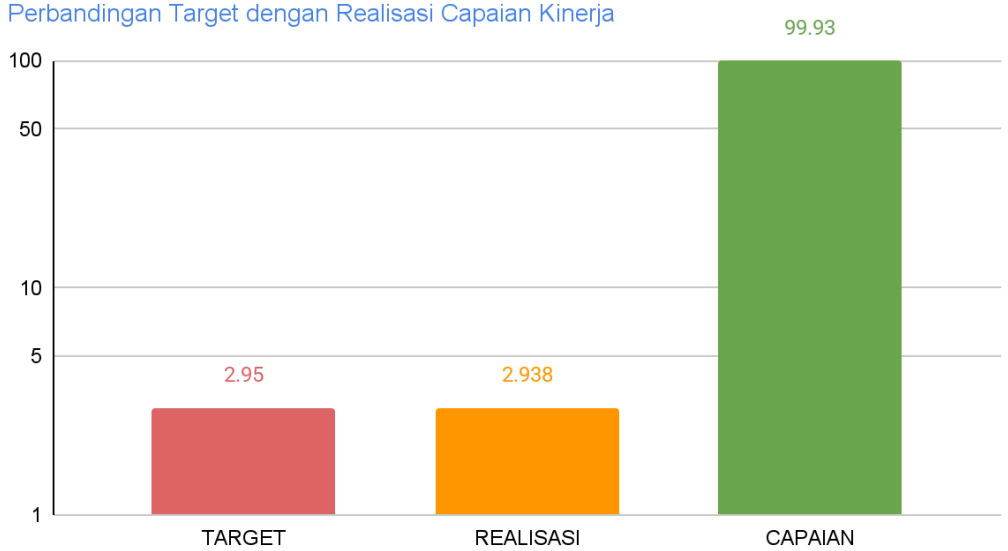
TABEL 3.1.119
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
INDEKS MANAJEMEN RISIKO UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KRITERIA	
Indeks Manajemen Risiko UPT	2.95	2.938	99.93	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2.95. Indeks Manajemen Risiko UPT UPT BBPOM di Bandung sebesar 2.938. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 99.93% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.55
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

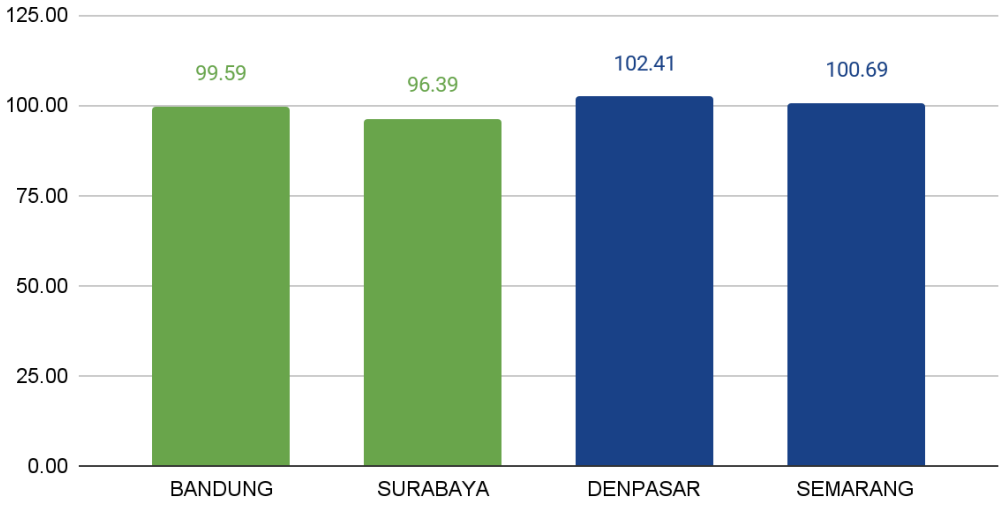
Target tahun 2029 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 3.15. Jika realisasi kinerja pada TA 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada TA 2025 sebesar 93.27% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.120
PERBANDINGAN REALISASI TA 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2029
INDEKS MANAJEMEN RISIKO UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2029	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	KATEGORI	
Indeks Manajemen Risiko UPT	3.15	2.938	93.27	Akan Tercapai	▲

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Grafik 3.1.56
Perbandingan Capaian Antar Satker dalam 1 Klaster



Pada Tahun 2025, Jika realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT dibandingkan dengan Balai lain yang berada dalam satu klaster pengklasifikasian, maka Indeks Manajemen Risiko UPT pada tahun 2025 tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang sebesar 3.63, Balai Besar POM di Surabaya sebesar 3.47, Balai Besar POM di Denpasar sebesar 2.97, dan Balai Besar POM di Bandung sebesar 2.938.

Namun jika dibandingkan persentase capaian maka yang persentasenya tertinggi adalah Balai Besar POM di Denpasar 102.41%, Balai Besar POM di Semarang sebesar 100.69%, Balai Besar POM di Bandung sebesar 99.93%, dan Balai Besar POM di Surabaya sebesar 96.39%.

D. Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Belum mempertimbangkan isu eksternal dan internal serta capaian kinerja periode sebelumnya pada saat melakukan identifikasi risiko
- Secara umum metode identifikasi risiko masih bersifat *bottom up*
- Belum mengidentifikasi risiko pada seluruh program / kegiatan / inisiatif baru
- Masih terdapat kesalahan dalam penentuan respon risiko untuk risiko residual ≩ 16

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini antara lain:

- Melakukan reviu dan penyesuaian terhadap identifikasi risiko dengan menetapkan uraian risk event yang spesifik serta atribut pengendalian yang selaras dengan aktivitas pengendalian;
- Melakukan reviu terhadap penilaian risiko dengan memastikan tidak terdapat peningkatan level risiko residual yang telah dilakukan pengendalian (existing control) serta kesesuaian antara kesimpulan efektivitas pengendalian dengan penilaian kelemahan pengendalian dan penurunan nilai/level risiko;
- Menyusun rencana mitigasi baru di luar aktivitas pengendalian saat ini (existing control) terhadap risiko residual dengan level risiko ≥16;
- Melakukan dan mendokumentasikan pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko inheren dengan level ≥16.
- Pengembangan Kompetensi pengelolaan Manajemen Risiko

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Pembuatan sistem informasi manajemen risiko melalui sites SiManis, dapat memudahkan proses pelaksanaan identifikasi,evaluasi, penilaian efektivitas pengendalian serta monitoring pelaksanaan pengendalian risiko .

- Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan oleh Inspektorat yang dapat meningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota tim dalam pelaksanaan pengelolaan risiko.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.121
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
INDEKS MANAJEMEN RISIKO UPT
TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2025	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT	99.93%	100.00%	0.99	-0.01	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Indeks Manajemen Risiko UPT BBPOM di Bandung disimpulkan Tidak Efisien (<1,00) karena capaian realisasi Anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

3.2. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Informasi kinerja merupakan informasi yang berisi data-data realisasi dan capaian kinerja suatu organisasi. Pemanfaatan informasi kinerja ini, dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait kinerja BBPOM di Bandung di Tahun 2025 secara transparan dan akuntabel.

Secara internal, informasi kinerja ini memberikan data-data yang dapat digunakan dalam rangka perbaikan ataupun peningkatan kinerja setiap fungsi, yang terlibat merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Selain itu, informasi kinerja dapat dimanfaatkan dalam membuat inovasi kegiatan baik bersifat internal maupun eksternal. Pemanfaatan Informasi Kinerja BBPOM di Bandung yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, yaitu :
    - Fungsi Inspeksi
        - Dari data informasi kinerja pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olaha, Fungsi inspeksi melakukan perbaikan mekanisme kerja dengan meningkatkan monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling melalui aplikasi secara online, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sehingga dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat proses pengambilan sampel di lapangan.
        - Dari data informasi kinerja pengawasan AMR, fungsi inspeksi telah melakukan perkuatan Kerjasama/Kolaborasi yang baik dengan stakeholder pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan resistensi antimikroba.
        - Dari data informasi kinerja pelaporan KTD/ESO, fungsi inspeksi telah melakukan visit dan memberikan konsultasi dengan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada sarana yang kesulitan melakukan pelaporan melalui aplikasi e-meso.
    - Fungsi sertifikasi

      Dari data informasi kinerja pelayanan publik, fungsi sertifikasi melakukan perbaikan capaian kinerja dengan membuat program Bimtek Pelaku Usaha

dan desk Evaluasi Dokumen yang dilaksanakan setiap triwulan. Kegiatan ini merupakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha baru yang sedang melakukan proses registrasi pendaftaran produk Obat dan Makanan. Dengan program ini proses perbaikan dan pemenuhan persyaratan oleh Pelaku Usaha menjadi lebih cepat dan baik, sehingga waktu yang diperlukan pelaku usaha dalam proses registrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan program ini indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung menjadi lebih meningkat.

- Fungsi Informasi dan Komunikasi
  - Dari data informasi kinerja program keamanan pangan, fungsi Infokom meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehingga penjadwalan dan pelaksanaan intervensi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target tahapan yang sudah ditetapkan, serta semua tahapan tersebut dapat dipastikan terlaksana. Sehingga manfaat program ini dapat dirasakan oleh pemda, pelaku usaha dan masyarakat setempat.

    Selain itu dilakukan juga perbaikan dan peningkatan Advokasi dengan Pemerintah Daerah setempat sehingga Program Keamanan Pangan dapat direplikasi dan dirasakan manfaatnya secara menyeluruh oleh Kabupaten/kota tersebut dan di Lokasi lainnya.
  - Dari data informasi kinerja efektivitas KIE, Fungsi Infokom telah melakukan diversifikasi sasaran dan media yang digunakan. Pelaksanaan KIE dengan civitas akademi untuk pemberdayaan dan peningkatan peran mahasiswa dalam pemberantasan peredaran produk Obat dan Makanan yang ilegal, merupakan upaya memperluas cakupan sasaran KIE. Selain itu juga telah dilaksanakan intensifikasi pelaksanaan KIE melalui diversifikasi media informasi yang digunakan. dengan semakin banyaknya media informasi yang diakses oleh msyarakat, akan menaikan nilai efektiftas KIE tersebut.
  - Dari data informasi kinerja Pendampingan Kabupaten/Kota aman, Fungsi Infokom telah melaksanakan kegiatan :

- peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan lintas sektor dan OPD terkait dalam pelaksanaan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA),
- melakukan sosialisasi terkait Kegiatan Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) secara masif baik secara langsung maupun melalui media sosial agar kabupaten/kota yang belum melakukan pengisian tools mandiri mendapatkan informasi.
- Melakukan pendampingan lebih intensif kepada OPD dalam pengisian tools penilaian mandiri KKPA agar hasil penilaian bisa mencapai minimal 60,0.

o Penyusunan dan pengembangan Materi dan Media Informasi, meliputi:

- Penyusunan Materi dan pelaksanaan KIE perlu disinergikan dengan program-program lain terkait lintas sektor/asosiasi pelaku usaha/dunia akademisi/ dan media yang sedang trending serta diudukung oleh stkeholder terkait.
- Mengembangkan desain berita melalui media sosial dan website.
- Memastikan publikasi tentang standar pelayanan telah dilakukan seluruhnya melalui berbagai media, memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pelanggan, meningkatkan fasilitas layanan publik, mengembangkan fasilitas layanan untuk kelompok rentan, serta meningkatkan kemudahan akses layanan untuk pelanggan sudah dilakukan oleh BBPOM di Bandung

● Fungsi Tata Usaha

Dari informasi kinerja terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal, fungsi Tata Usaha melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap :

- Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi lebih optimal. Dengan adanya monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan BMN secara rutin ini akan membantu menemukan berbagai Solusi atas permasalahan yang timbul, selain itu juga sebagai dasar untuk meningkatkan

kualitas pelaporan BMN sehingga lebih optimal dan penatausahaan BMN yang lebih akurat.

- Pengelolaan Keuangan baik dari Perencanaan hingga realisasi Keuangan untuk meningkatkan nilai Kinerja Anggaran.
- Menyusun dan mengimplementasikan pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian kinerja melalui dashboard site MANEKIN.

- Fungsi penindakan

  Dari data informasi kinerja, fungsi penindakan melakukan upaya peningkatan proses dan sarana maupun perlengkapan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor *criminal justice system* dalam penyelesaian berkas perkara terutama penyelesaian perkara-perkara carry over. Upaya yang telah dilakukan ini dapat meningkatkan efektivitas keberhasilan penyelesaian berkas perkara.

2. Melakukan Inovasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja
   - Inovasi berupa aplikasi atau tools yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan
     - Fungsi Pengujian
       - Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.
       - Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check

in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

- Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komodisti lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.

o Fungsi Inspeksi

- Penggunaan aplikasi 1POMJABAR untuk memantau dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor akan terlihat dengan jelas, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait secara efektif.
- Membuat dashboard berbasis IT yaitu aplikasi Galura Inspeksi untuk menampilkan capaian pemeriksaan, pelaporan SIPT, tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pelaku usaha dan CAPA nya. Selain itu menampilkan capaian pemeriksaan per individu, per kabupaten/ kota, sarana memenuhi ketentuan/ tidak memenuhi ketentuan.
- Pemanfaatkan aplikasi SIPT dan Aplikasi pengawasan iklan di Pusat antara lain SiAPIK untuk pengawasan iklan obat, SiREKA untuk pengawasan iklan Obat Bahan Alam,Kuasi dan Suplemen Kesehatan.

o Fungsi Sertifikasi

- Sebagai informasi dalam menentukan kebutuhan pelaku usaha dalam proses perizinan Obat dan Makanan diantaranya membuat aplikasi SISTER UMKM (Sistem Informasi Terpadu UMKM).
- Inovasi PRABU UMKM JUARA (Pendampingan Pelaku Usaha agar Berdaya Unggul untuk UMKM Juara yang merupakan inovasi dalam rangka pelaksanan program pendampingan UMKM. Dalam pelaksanaannya Prabu UMKM Juara berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat diantaranya adalah dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

o Fungsi Tata Usaha

- Pembuatan aplikasi SMART BMN untuk pengelolaan Persediaan yang lebih akurat. Aplikasi ini berfungsi untuk pelayanan BMN internal BBPOM di Bandung yang masih terbatas untuk persediaan. Hal ini dibuat untuk mengurangi jumlah temuan terkait Persediaan dan digitalisasi pelayanan BMN yang lebih cepat.
- Pengembangan aplikasi internal SiMangga++ (Sistem Informasi Monitoring Penugasan, Pengadaan dan Keuangan) bertujuan untuk membuat proses pekerjaan lebih cepat, akuntabel dan transparan sebagai salah bentuk digitalisasi dan pengurangan penggunaan kertas di BBPOM di Bandung. Pada aplikasi siMangga++ ini kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi dalam 1 aplikasi, mulai dari proses input permohonan pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, kehadiran pegawai, dll hingga nantinya dapat dijadikan sebagai lampiran dalam membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- Aplikasi MANEKIN merupakan aplikasi manajemen kinerja BBPOM Bandung. Aplikasi ini bermanfaat untuk pemenuhan informasi dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja BBPOM di Bandung sehingga memudahkan pengelolaan dan pencarian seluruh data kinerja.

- Aplikasi SiManis merupakan sistem informasi pelaksanaan manajemen risiko di BBPOM di Bandung secara terintegrasi, yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan risiko, mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, evaluasi risiko, penetapan aktivitas pengendalian dan penilaian efektifitas pengendalian, penetapan mitigasi risiko dan penilaian efektifitas rencana tindak lanjut, serta reviu risiko.
- Membuat dan mengembangkan aplikasi kearsipan terintegrasi dengan kertas kerja tim pengelola arsip sehingga menjadi database arsip/dokumen yang andal, otentik dan utuh serta dapat dipercaya.
- Membuat berbagai Inovasi dan juga pengembangan Inovasi Internal yang menunjang dan memperbaiki dalam pelaksanaan program kegiatan, AoC BOOSTER capacity building; dan SIDAKEP (Sistem Data Kepegawaian);

- Inovasi berupa membuat program dan kegiatan yang menunjang pencapaian dan peningkatan kinerja, yaitu :
  - Kegiatan nge-BAP (Ngobrol Seru Bareng Agen Perubahan BBPOM di Bandung) berupa kegiatan penyebaran informasi melalui podcast. Materi yang disampaikan harus memperhatikan target audiens, mudah dipahami dan mensinkronkan materi dengan hal-hal yang menjadi "trending".
  - Penyebaran informasi tidak langsung melalui berbagai media secara konsisten, salah satu program yang bisa dilakukan adalah one day one post.
  - KAHARTOS (Kamus Hasil Informasi Terkait Medsos) merupakan pemberian informasi terkait pengawasan BBPOM Bandung melalui media sosial.
  - Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha membahas terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Dari kegiatan ini akan

meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

- Kegiatan talkshow berupa penyebaran informasi dengan menghadirkan semua komponen Pentahelix (lintas sektor/pemerintah, akademisi, asosiasi pelaku usaha dan professional, media, dan Masyarakat umum).
- Melakukan pemberdayaan organisasi masyarakat dengan Pramuka (SAKA POM), melalui KIE SAKA POM, yaitu penyebaran Informasi keamanan pangan semakin meluas di komunitas sekolah dan pengujian sampel PJAS di sekolah-sekolah yang diintervensi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan keamanan dan mutu PJAS. Pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan Kwartir cabang Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mencetak kader keamanan pangan.
- Penyebaran informasi secara rutin melalui media sosial (Instagram, facebook, twitter). Khusus untuk media Instagram, Tim Media Sosial Balai Besar POM di Bandung mempunyai program penyebaran informasi melalui inovasi One Day One Post, pada program ini akan disajikan informasi setiap hari, yang menarik melaui media sosial baik berupa reels maupun infografis dengan tema mengenai obat dan makanan yang sedang populer di Masyarakat.

3. Informasi Kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan Target dan Rencana perbaikan kinerja pada periode selanjutnya

- Data informasi kinerja telah digunakan dalam menyusun dan menetapkan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian KInerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM, yang menyatakan bahwa Penyusunan PK memperhatikan realisasi tahun n-1 dan/atau target tahun n pada Renstra/reviu Renstra/revisi Renstra (realisasi tahun sebelumnya dapat digunakan untuk proyeksi target, namun target indikator tidak diperkenankan di bawah realisasi tahun n-1 dan/atau target

tahun n pada Renstra/reviu Renstra/revisi Renstra tanpa adanya justifikasi yang memadai).

- Data informasi kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perubahan RAPK untuk menyesuaikan target kinerja bulanan, dan atau menyesuaikan dengan Manual IKU yang terbaru.

3.3. RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Berdasarkan data kinerja pada periode sebelumnya, Tindak Lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya pada setiap indikator adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3.1
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
TAHUN 2025

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aplikasi SIPT belum menampilkan data timeline pengujian (SLA) untuk sampel rutin Sediaan Farmasi, baru diterapkan pada pengujian sampel pihak ketiga, sehingga pemantauan masih dilakukan secara manual	Sistem pemantauan SLA sampel rutin Sediaan Farmasi dilakukan secara manual yang dibuat internal	Desember 2025	Sistem pemantauan SLA sampel rutin Sediaan Farmasi secara manual yang dibuat internal		Desember 2025	Sistem pemantauan SLA sampel rutin Sediaan Farmasi secara manual yang dibuat internal
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Sarana pelayanan yang ada di wilayah Balai Besar POM Bandung belum secara rutin melakukan pelaporan efek samping obat yang terjadi di sarana	- monitoring dashboard pelaporan ESO - Pendampingan kepada yankes baik secara daring (WAG) maupun secara langsung	Desember 2025	1) Bimtek pelaporan KTD dan ESO kepada tenaga kesehatan sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2025; 2) Sarana pelayanan kesehatan yang sudah melaporkan KTD/ ESO sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 25 sarana		Desember 2025	Sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD /ESO kepada BPOM melalui e-meso jumlahnya meningkat, sampai dengan TW4, sebanyak 25 sarana (27,78%) dari 90 sarana yang diberikan Bimtek
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel Pangan Olahan belum dapat diuji karena alat ICPMS rusak	Perbaikan alat ICPMS	Maret 2025	Alat ICPMS telah diperbaiki		Maret 2025	Sampel Pangan Olahan dapat diuji menggunakan alat ICPMS
		Sampel Pangan Olahan belum dapat diuji karena alat AAS rusak	Perbaikan alat AAS	September 2025	Alat AAS telah diperbaiki		September 2025	Sampel Pangan Olahan dapat diuji menggunakan alat AAS
		Kerusakan ICP-MS di Laboratorium Pangan terjadi secara berulang karena tidak tersedianya anggaran kontrak servis dan terbatasnya anggaran pemeliharaan, sehingga menyebabkan	Pengajuan anggaran kontrak service untuk pemeliharaan ICPMS	Desember 2025	Terdapat penambahan anggaran pemeliharaan alat dari realokasi anggaran kegiatan lain di laboratorium sehingga pemeliharaan alat ICP-MS termasuk		Desember 2025	Sampel Pangan Olahan dapat diuji menggunakan alat ICPMS

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
		timeline pengujian tidak terpenuhi.			kalibrasi dapat dilakukan			
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Pengujian sampel dilakukan saat sampel KLB masuk ke Laboratorium Pengujian	Pembentukan tim pengujian sampel KLB	April 2025	Tim Pengujian sampel KLB telah dibentuk		April 2025	Tim Pengujian telah siap untuk melakukan pengujian sampel KLB
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel PIRT belum dapat diuji karena alat ICPMS rusak	Perbaikan alat ICPMS	Maret 2025	Alat ICPMS telah diperbaiki		Maret 2025	Sampel PIRT dapat diuji menggunakan alat ICPMS
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	CAPA yang diterima jumlahnya belum memadai	1) Menyampaikan surat pengingat CAPA/ respon kepada pelaku usaha atau instansi terkait baik melalui aplikasi Satu POM Jabar atau manual 2) Pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha berupa Desk CAPA 3) Pelaksanaan koordinasi terkait respon hasil pengawasan dengan instansi terkait 4) Pemantauan CAPA melalui aplikasi Galura Inspeksi/ Satu POM Jabar	Desember 2025	1) Membuat surat penagihan CAPA kepada pelaku usaha ; 2) menghubungi sarana untuk dilakukan desk CAPA		Desember 2025	CAPA yang diterima jumlahnya meningkat, sampai dengan TW 4, Respon dari Pelaku usaha sebesar 74,94% sedangkan respon dari lintas sektor 100%
		Pemantauan CAPA masih dilakukan secara manual yang diambil dari email corporate	- Penagihan CAPA melalui sistem atau surat resmi - Pelaksanaan desk CAPA secara berkala, bimtek atau sosialisasi regulasi - Aplikasi pemantauan CAPA yang bisa diakses oleh stakeholder untuk memantau progres - meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor - Melakukan evaluasi dan umpan balik secara berkala	Desember 2025	Pemantauan CAPA sudah bisa dilakukan melalui aplikasi Satu POM Jabar		Desember 2025	Pemantauan CAPA melalui sistem Galura Inspeksi
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual	Penarikan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan (tanggal 5 bulan berikutnya) dari akun admin UPT dan diolah menggunakan aplikasi satuPOM JABAR	Desember 2025	Penggunaan data dari SIPT untuk monev capaian produksi telah dilaksanakan untuk Monev sd TW 3 TAHUN 2025		Desember 2025	Data Monev sesuai dengan SIPT
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman	Penarikan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan (tanggal 5 bulan berikutnya) dari akun admin UPT	Desember 2025	Penggunaan data dari SIPT untuk monev capaian produksi telah dilaksanakan untuk		Desember 2025	Data Monev sesuai dengan SIPT

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual	dan diolah menggunakan aplikasi satuPOM JABAR		Monev sd TW 3 TAHUN 2025			
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pemantauan surat TL dan CAPA dilakukan secara manual dan melalui SIPT; 2) Tidak ada pemantauan timeline, kesesuaian TL pada SIPT 3) Surat TL yang diupload pada SIPT belum disahkan oleh kepala UPT	1) Pemantauan data base hasil pemeriksaan, pengiriman surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA pada aplikasi Galura Inspeksi 2) Pemantauan timeline, kesimpulan hasil pemeriksaan dan kesesuaian TL pada SIPT 3) Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi	Desember 2025	Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pengiriman surat TL, pemantauan CAPA sudah dilakukan melalui aplikasi Galura Inspeksi/ Satu POM Jabar		Desember 2025	- Memiliki database hasil pemeriksaan sarana secara digital - Pemantauan hasil pemeriksaan sarana secara digital - Memudahkan analisa data - Data dapat diakses setiap saat - Sampai dengan TW 4 capaian kinerja sebesar 96,07 %, sudah melampaui target
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pemantauan surat TL dan CAPA dilakukan secara manual dan melalui SIPT; 2) Tidak ada pemantauan timeline, kesesuaian TL pada SIPT 3) Surat TL yang diupload pada SIPT belum disahkan oleh kepala UPT	1) Pemantauan data base hasil pemeriksaan, pengiriman surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA pada aplikasi Galura Inspeksi 2) Pemantauan timeline, kesimpulan hasil pemeriksaan dan kesesuaian TL pada SIPT 3) Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi	Desember 2025	Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pengiriman surat TL, pemantauan CAPA sudah dilakukan melalui aplikasi Galura Inspeksi/ Satu POM Jabar		Desember 2025	- Memiliki database hasil pemeriksaan sarana secara digital - Pemantauan hasil pemeriksaan sarana secara digital - Memudahkan analisa data - Data dapat diakses setiap saat - Sampai dengan TW 4 capaian kinerja sebesar 97,80 %, sudah melampaui target
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	1. Timeline iklan OT dan SK tidak tercapai di bulan Januari	1. Perbaikan penjadwalan iklan. 2. Pemantauan timeline iklan OT dan SK	Desember 2025	Monitoring timeline Iklan OT dan SK		Desember 2025	- Timeline iklan OT pada bulan Agustus -September 2025 sudah tercapai (sebelum tanggal 30 bulan berjalan)

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
								- Timeline iklan SK pada bulan Februari -September 2025 sudah tercapai (sebelum tanggal 30 bulan berjalan)
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	1. Persentase timeline Pelaporan SIPT Penandaan/Label produk tembakau sampai September 2025 belum mencapai Target IKU 80 % (tercapai 77,78%)	Monev Penandaan Rokok secara rutin	Desember 2025	Monev Penandaan Rokok Setiap bulan		Desembe r 2025	Pelaporan SIPT Penandaan Rokok ke pusat sesuai timeline dari bulan Juli -Desember 2025
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Apotek yang memberikan antimikroba tanpa resep masih banyak	1) Melakukan Bimtek kepada PJT apotek ; 2) advokasi kepada lintas sektor; 3) Publikasi apotek yang memberikan antimikroba tanpa resep	Desember 2025	1) Dilakukan bimtek kepada 100 PJT apotek berkolaborasi dengan PBF dan KIE kepada masyarakat bersama dengan tokoh masyarakat; 2) Advokasi kepada lintas sektor dan memberikan masukan dalam penerbitan SE gubernur terkait AMR; 3) Publikasi persentase apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep di website BBPOM Bandung		Desembe r 2025	1) Apotek dan masyarakat yang terpapar pentingnya pengendalian AMR semakin meningkat. 2). Terlaksananya proses penerbitan SE Gubernur terkait AMR yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Prov Jabar ; 3) Persentase apotek yang menyerahkan antimikroba tanpa resep dipublikasi di website BBPOM Bandung
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pemenuhan metoda analisa terverifikasi, ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi laboratorium masih belum optimal	Pembuatan roadmap peningkatan nilai pemenuhan metoda analisa terverifikasi, ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi laboratorium	Juni 2025	Rencana kegiatan verifiasi metode analisa, kalibrasi alat lab, dan peningkatan kompetensi laboratorium		Desembe r 2025	Pengadaan alat laboratorium baru sudah dilaksanakan, optimalisasi anggaran belanja modal sedang dalam proses pengadaan, peningkatan kompetensi yang sudah dijadwalkan sudah dilaksanakan. Peningkatan nilai ruang lingkup melalui pengadaan sampel yang tidak tersedia

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
								direncanakan akan dilaksanakan di TW 4
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Kabupaten/kota belum terpapar Program Kabupaten/Kota Pangan Aman	Melaksanakan advokasi Program KKPA dan sosialisasi pengisian tools penilaian mandiri KKPA ke 19 Kab/kota	September 2025	Melaksanakan advokasi Program KKPA dan sosialisasi pengisian tools penilaian mandiri KKPA ke 19 Kab/kota		September 2025	Telah dilakukan advokasi program kkpa dan sosialisasi pengisian tools penilaian mandiri
		Belum ada komitmen dan kesadaran dari pemerintah daerah dalam pengisian tools penilaian mandiri kabupaten/kota pangan aman	Melaksanakan koordinasi dan pendampingan secara intensif ke Kab/kota yang menjadi target pendampingan	September 2025	Melaksanakan koordinasi dan pendampingan secara terus menerus ke Kab/kota yang menjadi target pendampingan		September 2025	Telah dilakukan koordinasi dan pendampingan secara terus menerus ke Kab/kota yang menjadi target pendampingan
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual	Penarikan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan (tanggal 5 bulan berikutnya) dari akun admin UPT dan diolah menggunakan aplikasi satuPOM JABAR	April 2025	Penggunaan data dari SIPT untuk monev capaian produksi telah dilaksanakan untuk Monev TW 1 TAHUN 2025		Juli 2025	Data Monev sesuai dengan SIPT
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1) indeks fektifitas KIE pada TW 1 memenuhi target sebesar 87,18%, namun jumlah target responden tatap muka belum memenuhi target hal ini dikarenakan Rencana Pelaksanaan KIE dengan tomas belum ada penjadwalan. Target responden untuk KIE Media juga belum memenuhi target dikarenakan jumlah responden yang mengisi tidak dapat secara tepat diperkirakan.	Melakukan koordinasi dengan tenaga Ahli untuk membuat penjadwalan untuk meningkatkan responden tatap muka. Untuk responden media diupayakan dengan membuat link dan survey lebih mudah serta ajakan kepada rsponden untuk mengisi survey efektifitas	Desember 2025	Pelaksanaan KIE di minggu Ke- 3 hanya dilakukan di 2 titik dengan jumlah peserta 400 orang. Untuk responden media sudah dilakukan publikasi ajakan pengisian survey.		Desember 2025	sudah dilaksanakan kegiatan KIE untuk 2 tomas sejumlah 4 titik dengan jumlah responden sebaran bulan 25 April 2025 untuk media 20 responden dan untuk tatap muka sejumlah 30 responden
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Advokasi dengan lintas sektor belum dilaksanakan	Memastikan tahapan advokasi dengan lintas sektor berjalan dengan baik sehingga pemerintah daerah setempat dapat berkomitmen untuk mereplikasi program sekolah dengan PJAS aman secara menyeluruh	April 2025	Advokasi ProPN Keamanan Pangan Terpadu bersama linsek dan pemda Kab.Bandung Barat dilaksanakan pada tgl 29 April 2025 dan telah dilaksanakan penandatanganan komitmen untuk melaksanakan		April 2025	Terlaksannaya kegiatan Advokasi ProPN KP Terpadu bersama Linsek dan Pemda pada tanggal 29 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
					semua tahapan kegiatan			Kabupaten Bandung Barat Lantai 1 Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
		Pemberdayaan SAKA POM belum optimal	Memberdayakan organisasi seperti Pramuka (SAKA POM) untuk mensosialisasikan keamanan pangan pada komunitas sekolah	Oktober 2025	Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dengan memberdayakan SAKA POM		Oktober 2025	akan dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan pada tanggal 17 Oktober bersama SAKA POM Garut mengundang sekolah SMP dan SMA se-Kab. Garut
		Masih kurangnya kesadaran sekolah tentang keamanan pangan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran sekolah akan pentingnya keamanan pangan sehingga sekolah dapat memprioritaskan untuk melakukan program keamanan pangan.	Desember 2025	Melaksanakan pengawalan Sekolah dengan PJAS Aman dan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tanggal 27 Mei 2025 melalui Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan mengundang 26 sekolah yang diintervensi pada tahun 2024 dari kab. Subang, Kab. Cianjur dan Kota Bekasi, 17 sekolah yang diintervensi tahun 2025 dari kab. Bandung Barat dan 63 sekolah dari Kab. Subang dan Kota Bandung sebagai target perluasan tahun 2025. Peserta yang hadir adalah kepala sekolah, guru, siswa, pengelola kantin, staf UKS		Mei 2025	Dari hasil evaluasi pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan pada tanggal 27 Mei 2025, disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan sebesar 27,5% dengan nilai psot test rata-rata 88.
		Kader Keamanan Pangan Sekolah belum maksimal dalam mensosialisasikan Keamanan pangan	Mendorong keaktifan kader keamanan pangan sekolah untuk mensosialisasikan keamanan pangan secara masive baik secara langsung atau melalui media sosial supaya informasi terbaru terkait	Desember 2025	- Melaksanakan pengawalan kepada 26 sekolah yang telah diintervennsi pada tahun 2025 dan memonitor realisasi		Mei 2025	Telah dilaksanakan pengawalan kepada 26 sekolah yang telah diintervennsi

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
			keamanan pangan dapat diketahui secara luas		pelaksanaan rencana aksi di tahun 2025 secara daring pada tanggal 27 Mei 2025. - Dilakukan komunikasi secara kontinu dan masive melalui WAG bersama kader KP Sekolah terkait update informasi terbaru terkait keamanan pangan agar informasi tersebut dapat di sampaikan kembali ke komunitasnya baik secara langsung ataupun tidak langsung			pada tahun 2025 dan memonitor realisasi pelaksanaan rencana aksi di tahun 2025 dan melakukan komunikasi secara kontinu dan masive melalui WAG bersama kader KP Sekolah terkait update informasi terbaru terkait keamanan pangan
19	Jumlah desa pangan aman	Advokasi dengan lintas sektor belum dilaksanakan	Peningkatan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan dan keberlanjutan program agar tetap bisa berjalan secara mandiri	April 2025	Advokasi ProPN Keamanan Pangan Terpadu bersama linsek dan pemda Kab.Bandung Barat dilaksanakan pada tgl 29 April 2025 dan telah dilaksanakan penandatanganan komitmen untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan		April 2025	sudah dilakukan koordinasi dengan pemeritah daerah Kabupaten Bandung Barat terkait target yang akan mejadi lokus desa yang akan mendapatkan intervensi Program Desa Pangan Aman
		Masih kurangnya komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk tentap konsisten melaksanakan Program Desa Pangan Aman	Peningkatan komitmen pemerintah Desa /Kelurahan untuk dapat melanjutkan program Desa Pangan Aman dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun oleh kader keamanan pangan	Desember 2025	Melaksanakan pengawalan kepada kader keamanan pangan desa di 8 desa yang telah diintervensi kegiatan Desa Pangan aman tahun 2024 di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang dan Kota Bekasi. Kegiatan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 11 September 2025. Kegiatan berupa refresment materi keamanan pangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 terkait pelaksanaan		September 2025	Telah dilaksanakan pengawalan kepada kader keamanan pangan desa di 8 desa yang telah diintervensi kegiatan Desa Pangan aman tahun 2024 secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 11 September 2025.

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
					program desa pangan aman			
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Program PPABK	Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPABK	April 2025	Advokasi ProPN Keamanan Pangan Terpadu bersama linsek dan pemda Kab.Bandung Barat dilaksanakan pada tgl 29 April 2025 dan telah dilaksanakan penandatanganan komitmen untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan		April 2025	Terlaksannaya kegiatan Advokasi ProPN KP Terpadu bersama Linsek dan Pemda pada tanggal 29 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat Lantai 1 Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
		Masih kurangnya komitmen pimpinan/kader keamanan pangan di pasar tentang keamanan pangan	Peningkatan tindaklanjut hasil sampling dan pengujian	Desember 2025	Melaksanakan Bimtek dan Penyuluhan kepada Komunitas Pasar di Pasar Panorama Lembang Kab. Bandung Barat pada tanggal 20 Mei 2025, yang dihadiri oleh pengelola pasar, pedagang dan lintas sektor		Mei 2025	- Telah dilaksanakan Bimtek Pengelola Pasar pada tanggal 20 Mei di pasar Panorama Lembang KBB - Telah dilaksanakan Kampanye dan Penyuluhan kepada Pedagang dan KOmunitas Pasar pada tanggal 20 Mei di Pasar panorama Lembang KBB
		Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pedagang tentang keamanan pangan	Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pedagang	Desember 2025	Melaksanakan Kampanye dan Penyuluhan kepada Pedagang dan KOmunitas Pasar pada tanggal 20 Mei di Pasar panorama Lembang KBB		Mei 2025	Telah dilaksanakan Kampanye dan Penyuluhan kepada Pedagang dan KOmunitas Pasar pada tanggal 20 Mei di Pasar panorama Lembang KBB
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	Masih kurangnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan	Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan umk	Desember 2025	Melaksanakan tahapan fasilitasi kepada UMK Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik		Desembe r 2025	Pendampingan UMKM 100% sudah terbit sertifikatnya yaitu 18 sarana Pangan, 5 sarana

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
	dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan							kosmetika dan 3 sarana OBA
		Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang persyaratan dan regulasi yang berlaku	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha UMK	April 2025	Sudah dilaksanakan Bimbingan Teknis UMKM untuk Pelaku usaha UMK Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik		April 2025	Pelaku usaha sudah memahami tentang persyaratan dan regulasi yang berlaku
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	Pada akhir Triwulan II tahun 2025, terdapat 6 perkara carry over dimana seluruhnya sudah P21. Perkara tahun berjalan pada akhir Triwulan II tahun 2025 berjumlah 4 (empat) perkara yaitu 3 perkara SPDP dan 1 perkara Tahap 1.	1. Intensifikasi penyelesaian berkas perkara 2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelesaian perkara 3. Melakukan operasi penindakan terhadap target-target yang memiliki potensi untuk dilanjutkan ke tahap pro justicia	Desember 2025	1. Intensifikasi penyelesaian berkas perkara 2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelesaian perkara 3. Melaksanakan penggalangan lintas sektor sebagai upaya penyeragaman persepsi atas isu-isu kejahatan obat dan makanan 4. Melakukan operasi penindakan terhadap target-target yang memiliki potensi untuk dilanjutkan ke tahap pro justicia 5. Penerbitan permohonan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada pihak kepolisian atas tersangka yang tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian		Desember 2025	1. Dari 7 (tujuh) target perkara tahun 2025 telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian dengan hasil sebagai berikut: • 3 (tiga) perkara telah diselesaikan hingga tahap 2 • 2 (dua) perkara telah diterbitkan P 21 • 2 (dua) perkara telah diterbitkan DPO 2. Terhadap perkara dengan status P 21 telah dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan hasil Tahap 2 akan dilaksanakan pada Triwulan 1 Tahun 2026. 3. Telah dilaksanakan kegiatan Penggalangan Pemangku Kepentingan dengan tema Kolaborasi BBPOM di Bandung Bersama Lintas Sektor CJS dan Jaringan Intelijen Dalam keberhasilan Penanganan Perkara Obat Bahan Alam Ilegal Tahun

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
								2025 pada tanggal 27 November 2025 bertempat di Ruang BIC BBPOM di Bandung.
23	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	Belum dilakukan dilakukan penyusunan analisis kejahatan tahun 2025, beserta laporan penyusunan dan nilai penyusunan analisis. Belum dilakukan penyusunan rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan untuk Semester II tahun 2025.	Akan dilakukan penyusunan analisis, penilaian, dan laporan penyusunan analisis kejahatan tahun 2025 pada Triwulan IV. Akan dilakukan penyusunan rekapitulasi rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan tahun 2025 pada akhir Semester II.	Desember 2025	• Telah dilaksanakan penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan dengan tema 'Analisis Kejahatan Obat Bahan Alam Ilegal Tahun 2025'. Penyusunan analisis telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen perencanaan dan pelaporan. • Telah dilakukan penyusunan rekapitulasi feedback rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan. • Seluruh kegiatan Cegah Tangkal tahun 2025 telah disampaikan melalui pelaporan ke Direktorat Cegah Tangkal melalui aplikasi Srikandi dan bit.ly pelaporan kegiatan cegah tangkal.		Desember 2025	Telah tersedia: 1. Analisis kejahatan obat dan makanan tahun 2025 2. Laporan penyusunan dan penilaian analisis kejahatan obat dan makanan tahun 2025 3. Rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan tahun 2025 4. Laporan kegiatan Cegah Tangkal tahun 2025
				Desember 2026	Dilakukan inventarisasi terhadap tindak lanjut atas rekomendasi analisis yang sudah dilakukan beserta follow up terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.		Desember 2026	1. Analisis kejahatan obat dan makanan tahun 2025
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Terdapat perubahan/pembaruan regulasi tentang perizinan, sehingga standar pelayanan perlu dilakukan reviu, serta ada penambahan jenis pelayanan sehubungan dengan	Melakukan reviu standar pelayanan publik untuk 9 jenis layanan yang ada, dan menyusun draft standar pelayanan untuk layanan Rekomendasi Importir OBA, SK, obat Kuasi. Serta melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan Standar Pelayanan	Mei 2025	Terdapat 2 jenis layanan yang sudah direviu		Mei 2025	Terdapat Standar Pelayanan yang ditetapkan

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
		pelimpahan kewenangan untuk layanan Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, obat Kuasi						
		Terdapat satu inovasi pelayanan publik yang diikutkan lomba inovasi pelayanan publik	Melakakukan reviu, telaah, dan pengembangan terhadap inovasi pelayanan publik yang sudah dimiliki, dan selanjutnya yang memungkinkan dapat diikutkan dalam lomba inovasi pelayanan publik	Desember 2025	Mengikutsertakan 3 inovasi dalam lomba inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan BPOM		Desembe r 2025	Terdapat inovasi yang mengikuti lomba inovasi KOIN BPOM
		Perlunya memperluas layanan untuk kelompok inklusi	Melaksanakan kegiatan yang melibatkan kelompok rentan / disabilitas	Desember 2025	Kegiatan Penyebaran Informasi kepada kelompok rentan		Desembe r 2025	Terdapat kegiatan yang melibatkan kelompok rentan
25	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	Belum terdapat penetapan pengelola Inovasi kegiatan Internalisasi WBS	Menetapkan pengelola inovasi kegiatan internalisasi WBS dan menindaklanjuti pengaduan sampai dengan tuntas	Desember 2026	Menetapkan pengelola inovasi kegiatan internalisasi WBS dan menindaklanjuti pengaduan sampai dengan tuntas		Desembe r 2025	2. Laporan penyusunan dan penilaian analisis kejahatan obat dan makanan tahun 2025
		Belum terdapat pengembangan invovasi layanan publik	Menyusun dan menetapkan latar belakang pengembangan inovasi pelayanan publik berdasarkan risiko yang ada atau kebutuhan Unit Kerja	Desember 2027	Menyusun dan menetapkan latar belakang pengembangan inovasi pelayanan publik berdasarkan risiko yang ada atau kebutuhan Unit Kerja		Desembe r 2025	Terdapat Pengembangan Inovasi Layanan Publik
		Belum terlaksana Continuous improvement	Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko sehingga mampu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Desember 2028	Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko sehingga mampu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		Desembe r 2025	3. Rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan tahun 2025
26	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	Belum memiliki Rencana Strategis Tahun 2025-2029	Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	Desember 2025	Menyusun Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2025-2028		Desembe r 2025	SRencana Strategis TA 2025-2029 sudah tersusun
		Tidak ada penetapan Indikaor Kinerja Utama	Menyusun SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat seluruh indikator pada Perjanjian Kinerja (PK)	Desember 2025	Menyusun SK penetapan IKU		Desembe r 2025	Tersusunnya SK Penetapan IKU

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
		Belum ada reviu dalam penetapan target IKU	Menyusun matriks reviu target indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta kertas kerja reviu menyajikan seluruh indikator dan dilengkapi dengan informasi target usulan dari Balai, hasil reviu unit pengampu/Biro Perencanaan dan Keuangan	Maret 2025	Menyusun matriks reviu target indikator kinerja (Matriks A2 melalui aplikasi simetris)		Maret 2025	telah dilakukan Reviu dalam penetapan target IKU
		Terdapat perbedaan target pada dokumen perencanaan kinerja	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Maret 2025	Menyusun kertas kerja keselarasan target indikator kinerja PK, RAPK,		Maret 2025	Target pada dokumen perencanaan kinerja sudah sesuai
		Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan secara lengkap	Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada e-SAKIP REVIU dan subsite Satuan Kerja	Mei 2025	Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP ; Renstra, PK, dan RAPK pada e-SAKIP Reviu dan subsite informasi kinerja bbpom bandung		Mei 2025	Dokumen perencanaan kinerja sudah dipublikasikan secara lengkap
		Belum ada manual IKU yang merupakan dasar pengukuran kinerja	Menyusun dan mengesahkan manual IKU sebagai acuan dalam pengukuran kinerja seluruh indikator	Desember 2025	Menyusun manual IKU Tahun 2025-2029		Desember 2025	Sudah terdapat Manual IKU TA 2025-2029
		SOP mikro tentang Manajemen Kinerja Organisasi belum mengatur secara lengkap dan rinci	Menyempurnakan SOP Mikro Manajemen Kinerja Organisasi pada mekanisme Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dengan menambahkan: • Media/sarana pengumpulan data; Timeline penyampaian laporan kinerja bulanan dan triwulanan; Mekanisme usulan perubahan/perbaikan data kinerja	Juli 2025	Melakukan reviu dan revisi SOP Mikro manajemen kinerja, pada mekanisme Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dengan menambahkan:		Juli 2025	Revisi SOP Mikro Manajemen Kinerja Organisasi sudah di sah kan
		Notulen rapat beum menggambarkan arahan pimpinan yang spesifik	Menyusun notulen rapat evaluasi internal yang menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja secara spesifik	Desember 2025	Menyusun notulen rapat monev dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pencapaian kinerja secara spesifik		Desember 2025	Notulen rapat sudah menggambarkan arahan pimpinan yang spesifik
		Realisasi kinerja pada pelaporan di SIMETRIS, SKP Pimpina, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim berbeda	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Desember 2025	Sumber data pelaporan menggunakan sumber data valid di aplikasi SIMETRIS.. dan Membuat kertas kerja realisasi kinerja 2025, sbb: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-HFxbIIkbumjXhnilelZiAIDrdTbnHYX/e		Desember 2025	Realisasi kinerja pada pelaporan di SIMETRIS, SKP Pimpina, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim sudah sesuai

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
					dit?usp=sharing&ouid=112059272181934449045&rtpof=true&sd=true			
		Pengisian Kendala dan RTL pada aplikasi SIMETRIS tidak tertib	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib dan memadai	Desember 2025	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib		Desember 2025	Pengisian Kendala dan RTL pada aplikasi SIMETRIS sudah sesuai
		Laporan kinerja interim belum menyajikan terkait peruabhan ndikator dan upaya perbaikan kinerja	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan: Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja, Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan atau rencana aksi dalam rangka pencapaian target kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan seluruh indikator	Desember 2025	Menyususn laporan kinerja interim, dengan menyajikan penjelasan terkait penambahan indikator kinerja dan upaya perbaikan penyempurnaan kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan seluruh indikator		Desember 2025	Laporan kinerja interim sudah menyajikan terkait peruabhan ndikator dan upaya perbaikan kinerja
		Laporan kinerja tahunan belumsesuai dengan Pedoman SAKIP	Menyusun laporan Kinerja tahunan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan penggunaan target akhir periode renstra yang mutakhir	Februari 2025	Menyusun laporan kinerja tahun 2024 sesuai pedoman penyelenggaraan SAKIP			Laporan Kinerja Tahunan seudah sesuai pedoman
		Penyajian realisasi kinerja pada berbagai laporan, masih terdapat perbedaan	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja	Desember 2025	Menyusun kertas kerja keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja, melalui link sbb :		Desember 2025	Realisasi Kinerja pada Laporan sudah sesuai
		belum ada rencana pengembangan kompetensi tim kerja	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Manajemen Kinerja terkait implementasi SAKIP	Maret 2025	Menyusun pengembangan kompetensi tim manajemen kinerja terkait implementasi SAKIP			Terdapat Rencana Pengembangan Kompetensi tim Kerja
		Laporan evaluasi internal belum sesuai pedoman SAKIP	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan: Analisis capaian target output berupa identifikasi kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjutnya; Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan; Timeline pelaksanaan	Desember 2025	Menyususn Laporan Evaluasi Internal sesuai Pedoman penyelenggaraan SAKIP BPOM		Desember 2025	Laporan evaluasi internal sudah sesuai pedoman SAKIP

www.bandung.pom.go.id

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
			rekomendasi/rencana aksi dan penentuan timeline yang memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal; Menyusun identifikasi kendala dan rencana aksi secara memadai					
27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	Nilai komponen deviasi Hal III masih belum maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi RPD secara berkala	Desember 2025	Melakukan monev dan penyesuaian RPD setiap Triwulan		Desember 2025	Nilai komponen deviasi Hal III meningkat dari tahun sebelumnya
		Nilai komponen pengelolaan UP dan TUP masih belum maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi UP / TUP secara berkala	Desember 2025	Monitoring pelaksanaan UP /TUP		Desember 2025	Nilai komponen pengelolaan UP dan TUP meningkat dari Tahun sebelumnya
		Penetapan target belum menyesuiakan dengan kondisi efisiensi dan relaksasi	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian target RO	Desember 2025	Melakukan monev dan penyesuaian target caput setiap TW		Desember 2025	Realisasi Target Capaian Output tercapai
28	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	Keterlibatan semua pegawai dalam pengelolaan risiko belum maksimal	Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai dalam pengelolaan risiko, terutama dalam melakukan identifikasi risiko	September 2025	Menyusun kuisioner Identifikasi Risiko untuk seluruh pegawai		September 2025	Seluruh Pegawai telah mengisi kuisioner identifikasi Risiko
		Data dukung pelaksanaan kegiatan pengendalian aktifitas belum optimal	Menyusun mekanisme pengendalian aktifitas yang memuat data dukung atribut pengendalian	September 2025	Membuat Kertas Kerja aktifitas pengendalian per poksi		September 2025	Tersusunnya Kertas Kerja aktivitas pengendalian per poksi
		Belum ada tinjauan implementasi manajemen risiko	Melaksanakan tinjauan manajemen risiko	September 2025	Melaksanakan tinjauan implementasi manajemen risiko		September 2025	Telah dilakukan tinjauan implementasi menajemen risiko

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100.00	realisasi sesuai dengan perencanaan dan juknis	Telah dilakukan penyusunan analisis, penilaian, dan laporan penyusunan analisis kejahatan tahun 2025 pada Triwulan IV.	• Telah dilaksanakan penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan dengan tema 'Analisis Kejahatan Obat		Desember 2025

www.bandung.pom.go.id

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
							Akan dilakukan penyusunan rekapitulasi rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan tahun 2025 pada akhir Semester II.	Bahan Alam Ilegal Tahun 2025'. Penyusunan analisis telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen perencanaan dan pelaporan. • Telah dilakukan penyusunan rekapitulasi feedback rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan. • Seluruh kegiatan Cegah Tangkal tahun 2025 telah disampaikan melalui pelaporan ke Direktorat Cegah Tangkal melalui aplikasi Srikandi dan bit.ly pelaporan kegiatan cegah tangkal.		
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1,750	1,924	109.94	Belum dilakukan penyusunan rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan untuk Semester II tahun 2025.	Pelaksanaan kegiatan bimtek dan desk e-registrasi pangan olahan berkoordinasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pelaksanaan kegiatan Desk CAPA sebagai upaya peningkatan dan percepatan layanan sertifikasi	Melaksanakan evaluasi dalam rangka layanan sertifikasii (Izin Penerapan CPPOB, CPOTB Bertahap, SPA CPKB, CDOB, Rekomendasi BPUN/Importir Obat, Importir OBA, persetujuan denah bangunan PBF dan SKI/SKE) Melaksanakan Desk CAPA		Desember 2025
3	3165.BDC.001	KIE Obat dan	75,335	23788	31.58	Terjadi blokir	Mengusulkan	Dilaukan		Desember

www.bandung.pom.go.id

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
		Makanan Aman oleh UPT				anggaran sebesar 69,48 % yang mengakibatkan tidak mungkin mencapai target output awal.	revisi penyesuaian output sesuai dengan hasil pembahasan bersama Biro Perencanaan Badan POM dari target output 75.335 orang menjadi 21.835 orang	perhitungan penyesuain Capaian Output sesuai Surat Kementerian Keuangan No S-699/PB.2/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2025		2025
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	Realisasi sudah sesuai perencanaan	Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi ASN dan Non ASN, serta pelaksanaan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi ASN dan Non ASN, serta pelaksanaan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Desember 2025
5	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	19	70.37	Anggaran terblokir sekitar 85% dari pagu awal tahun	Upaya memaksimalkan anggaran yang tersedia/tidak terblokir dengan upayan capaian output yang maksimal dan optimal	Dilaukan perhitungan penyesuain Capaian Output sesuai Surat Kementerian Keuangan No S-699/PB.2/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2025		Desember 2025
6	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	Anggaran Blokir	-	-	-	-
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	0	0	Anggaran Blokir	-	-	-	-
8	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di	4	0	0	Anggaran Blokir	-	-	-	-

www.bandung.pom.go.id

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
		Indonesia								
9	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100.00	Reallisasi sesuai dengan perencanaan	Pelaksanaan kegitanan Bimtek Internal bagi penguji, pemeliharaan alat laboratorium, dan melaksanakan pengadaan bahan penyelenggaraan laboratorium.	Kegiatan Bimtek Internal dan Menyelesaikan kegiatan pemeliharaan alat laboratorium dan pengadaan bahan penyelenggaraan laboratorium		Desember 2025
10	3165.QCD.U02	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	7	100.00	Realisasi sesuai dengan perencanaaan dan juknis	Melaksanakan operasi penindakan pada Triwulan IV terhadap target yang memiliki potensi untuk dilakukan tindakan pro justicia	1. Intensifikasi penyelesaian berkas perkara 2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelesaian perkara 3. Melaksanakan penggalangan lintas sektor sebagai upaya penyeragaman persepsi atas isu-isu kejahatan obat dan makanan 4. Melakukan operasi penindakan terhadap target-target yang memiliki potensi untuk dilanjutkan ke tahap pro justicia 5. Penerbitan permohonan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada pihak kepolisian atas tersangka yang tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian		Desember 2025

www.bandung.pom.go.id

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
11	3165.QDB.001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	17	17	100	realisasi sesuai dengan perencanaan dan juknis	Melaksanakan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah pada tanggal 29 Juli 2025 untuk 17 sekolah yg diinterveni	Melaksanakan seluruh tahapan		Oktober 2025
12	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	6	6	100	realisasi sesuai dengan perencanaan dan juknis	- Melaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa untuk 3 desa di kecamatan Padalarang, KBB pada tanggal 29 Agustus 2025 - Mlaksanakan Pengawalan dan Monev Desa Pangan Aman kepada 8 Desa yang diintervensi tahun 2024 secara daring pada tanggal 11 September 2025 - Melaksanakan Bimtek Komunitas Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Desa di 3 Desa Kecamatan Padalarang, KBB pada tanggal 23 September 2025	Melaksanakan seluruh tahapan		November 2025
13	3165.QDB.003	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	1	100	realisasi sesuai dengan perencanaan dan juknis	Melaksanakan monev pelakasanaan pengawasan keamanan pangan oleh kader keamanan pangan di Pasar Panorama tanggal 31 Juli 2025	target sudah tercapai, sudah dilaksanaan seluruh tahapan sesuai juknis		Oktober 2025
14	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	90	90	100	Kurangnya pemahaman tentang farmakovigilans di kalangan tenaga kesehatan (dokter, apoteker, perawat),	1) memberikan pendampingan kepada petugas tenaga kesehatan di RS, Klinik, Puskesmas dalam pelaporan KTD/	1) Memberikan pendampingan kepada tenaga kesehatan baik melalui WAG maupun langsung saat		Desember 2025

www.bandung.pom.go.id

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
						terutama terkait cara mengidentifikasi dan melaporkan efek samping obat	ESO; 2) melakukan Monev terhadap sarana dan laporan yang dikirimkan oleh sarana	kunjungan oleh petugas UPT; 2) Monev sarana dan laporan KTD / ESO melalui e Meso		
15	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	26	100	- Masih kurangnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan - Revisi target UMKM	Melakukan desk CAPA kepada pelaku usaha	Melaksanakan tahapan fasilitasi kepada UMK Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik		Desember 2025
16	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	745	100.00	Keterbatasan anggaran dan keterbatasan jumlah sampel dipasaran	Melakukan penyesuaian renlak sampling makanan	Melakukan penyesuaian renlak sampling makanan		Desember 2025
17	3165.QIA.002	Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1,766	1767	100.06	Kerbatasan anggaran karena ada sampel targeted dengan harga yang mahal dan keterbatasan jumlah sampel dipasaran	Melakukan penyesuaian renlak sampling sediaan farmasi	Melakukan penyesuaian renlak sampling sediaan farmasi		Desember 2025
18	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	309	103.69	belum meratanya kompetensi inspektur dalam melaksanakan pengawasan	- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel - Pelatihan personil yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya	Pelatihan Inspektur pangan dan Sharing knowledge antar inspektur		Desember 2025
19	3165.QIC.003	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT	36	36	100	Database sarana produsen fortifikasi tidak update	Sinkronisasi data inspeksi dengan data sertifikasi dan menjadikannya sebagai database sarana produksi fortifikasi	updating data hasil sertifikasi sarana produksi fortifikasi s.d Desember 2024		Desember 2025
20	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang	995	1023	102.81	Database sarana Distribusi belum update	Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pengiriman surat TL, pemantauan	Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pengiriman surat TL,		Desember 2025

www.bandung.pom.go.id

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
		Diperiksa oleh UPT					CAPA sudah dilakukan melalui aplikasi Galura Inspeksi/ Satu POM Jabar	pemantauan CAPA sudah dilakukan melalui aplikasi Galura Inspeksi/ Satu POM Jabar		
21	3165.RAB.001	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100	Pemilihan alat laboratorium yang diadakan harus memenuhi TKDN yang disyaratkan, namun alat laboratorium yang dibutuhkan sedikit yang memiliki TKDN yang disyaratkan	Pelaksanaan pengadaan alat laboratorium	Pengadaan seluruh alat laboratorium yang telah direncanakan dan Pemanfaatan anggaran optimalisasi belanja modal untuk alat laboratorium yang sudah direkomendasikan		Desember 2025
22	6384.EBA.956	Layanan BMN	1	1	100	Realisasi sudah sesuai perencanaan	Pelaksanaan kegiatan pendampingan satwil keuangan dan BMN	Pelaksanaan kegiatan pendampingan satwil keuangan dan BMN		November 2025
23	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	100	Realisasi sudah sesuai perencanaan	pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan operasional kantor	pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan operasional kantor		Desember 2025

www.bandung.pom.go.id

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp66.709.935.000,-, Pagu Non Blokir sebesar Rp37.650.601.000,- dengan rincian: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp46.778.823.000,-, pagu non Blokir sebesar Rp20.282.457.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp19.931.112.000,-, pagu non Blokir sebesar Rp17.368.144.000,-. Pada Tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp. 37.506.843.954,- (99.62%).

TABEL 3.3.1
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2025

PROGRAM	PAGU (Rp)	PAGU DIKURANGI BLOKIR	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	46.778.823.000	20.282.457.000	20.147.953.101	99.34%
Program Dukungan Manajemen	19.931.112.000	17.368.144.000	17.358.890.853	99.95%
TOTAL	66.709.935.000	37.650.601.000	37.506.843.954	99.62%

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.3.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	10.469.564.000	10.456.715.621	99.88%

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	58.922.000	58.919.000	99.99%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	7.547.656.000	7.530.571.086	99.77%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	46.436.000	44.616.575	96.08%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	866.166.000	769.608.393	88.85%
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	41.720.000	40.577.176	97.26%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	829.727.000	825.199.474	99.45%
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	17.790.410.000	17.780.636.629	99.95%
TOTAL		37.650.601.000	37.506.843.954	99.62%

Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada Tahun 2025 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Kegiatan kedua yaitu: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan pagu sebesar Rp58.922.000,- dan realisasi sebesar Rp58.919.000,- dengan capaian 99.99%.

www.bandung.pom.go.id

2) Sasaran Kegiatan kesembilan yaitu: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan pagu sebesar Rp17.790.410.000,- dan realisasi sebesar Rp17.780.636.629,- dengan capaian 99.95%.
3) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp10.469.564.000,- dan realisasi sebesar Rp10.456.715.621,-, dengan capaian 99.88%.
4) Sasaran Kegiatan keempat yaitu Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp7.547.656.000,- dan realisasi sebesar Rp7.530.571.086,-, dengan capaian 99.77%.
5) Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu: Layanan Publik UPT yang Prima dengan pagu sebesar Rp829.727.000,- dan realisasi sebesar Rp825.199.474,- dengan capaian 99.45%.
6) Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dengan pagu sebesar Rp41.720.000,- dan realisasi sebesar Rp40.577.176,- dengan capaian 97.26%.
7) Sasaran Kegiatan kelima yaitu: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan pagu sebesar Rp46.436.000,- dan realisasi sebesar Rp44.616.575,- dengan capaian 96.08%.
8) Sasaran Kegiatan keenam yaitu: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp866.166.000,- dan realisasi sebesar Rp769.608.393,- dengan capaian 88.85%.

Pada TA 2025, RPD yang tercantum dalam Halaman III DIPA BBPOM di Bandung sebesar Rp. 37.650.601.000,-, maka deviasi sebesar 0 dengan kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan tabel berikut :

TABEL 3.3.3
HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD
TAHUN 2025

Bulan	% RPD Halaman III DIPA	% Realisasi	Deviasi	Kategori

www.bandung.pom.go.id

Oktober	82.15	80.76	5.66	Kurang Baik
November	90.98	89.37	2.20	Baik
Desember	100.00	99.62	2.20	Baik

Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025 bahwa target RPD per triwulan, mengacu pada target penyerapan anggaran per triwulan:

a. Triwulan II, sebesar minimal 15 persen;
b. Triwulan II, sebesar minimal 40 persen;
c. Triwulan III, sebesar minimal 60 persen; dan
d. Triwulan IV, sebesar minimal 99 persen.

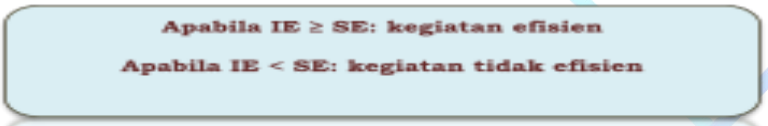
TABEL 3.3.4
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2025

Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
99%	99.62%	100.63%

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian.

www.bandung.pom.go.id

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:



Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:



Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.3.5
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TAHUN 2025

www.bandung.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111.00	99.92	1.11	0.11	EFISIEN
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	106.84	97.59	1.09	0.09	EFISIEN
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112.90	99.71	1.13	0.13	EFISIEN
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	1.00	0.00	EFISIEN
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.25	99.64	1.18	0.18	EFISIEN
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	99.72	83.15	1.20	0.20	EFISIEN
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang	107.82	99.98	1.08	0.08	EFISIEN

www.bandung.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115.91	99.98	1.16	0.16	EFISIEN
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.31	100.00	1.01	0.01	EFISIEN
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115.06	99.78	1.15	0.15	EFISIEN
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	115.18	100.00	1.15	0.15	EFISIEN
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	114.58	100.00	1.15	0.15	EFISIEN

www.bandung.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.26	98.72	1.02	0.02	EFISIEN
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	106.73	99.91	1.07	0.07	EFISIEN
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100.00	99.95	1.00	0.00	EFISIEN
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.25	99.99	1.00	0.00	EFISIEN
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	103.39	99.77	1.04	0.04	EFISIEN
18	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	100.00	99.68	1.00	0.00	EFISIEN
19	Jumlah desa pangan aman	100.00	99.83	1.00	0.00	EFISIEN

www.bandung.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	99.97	1.00	0.00	EFISIEN
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	104.01	96.08	1.08	0.08	EFISIEN
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	116.42	88.85	1.31	0.31	EFISIEN
23	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan olehBBPOM di Bandung	100.74	97.26	1.04	0.04	EFISIEN
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	104.68	99.45	1.05	0.05	EFISIEN
25	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	100.46	99.95	1.01	1.01	EFISIEN
26	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	97.89	94.18	1.04	0.04	EFISIEN

www.bandung.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	100.00	99.05	1.01	0.01	EFISIEN
28	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	99.59	100.00	1.00	0.00	EFISIEN
TOTAL		104.29	99.62	1.05	0.05	EFISIEN

Pada Tahun 2025, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori **Efisien (0.05)**.

Sedangkat hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.3.6
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT
TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	14	100.00%	41,720,000	40,577,176	97.26%

www.bandung.pom.go.id

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1750	Keputusan	1924	109.94%	829,727,000	825,199,474	99.45%
3	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	77085	Orang	23788	30.86%	7,292,425,000	7,275,888,209	99.77%
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	1	100.00%	439,467,000	438,937,676	99.88%
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	19	70.37%	16,177,000	16,134,000	99.73%
6	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	Unit	0	0.00%	0	0	0.00%
8	3165.CBV.001 Prasarana Bidang Kesehatan	4	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%

www.bandung.pom.go.id

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
9	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	1	100.00%	2,646,701,000	2,645,350,230	99.95%
10	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	Perkara	7	100.00%	866,166,000	769,608,393	88.85%
11	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	17	100.00%	88,624,000	88,340,375	99.68%
12	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	6	Lembaga	6	100.00%	125,757,000	125,542,045	99.83%
13	3165.QDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	Lembaga	1	100.00%	24,673,000	24,666,457	99.97%
14	3165.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	Orang	90	100.00%	12,960,000	12,648,271	97.59%
15	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	UMKM	26	100.00%	46,436,000	44,616,575	96.08%
16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	745	100.00%	622,568,000	620,783,776	99.71%

www.bandung.pom.go.id

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
17	3165.QIA.002 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	Sampel	1767	100.06%	1,492,536,000	1,491,276,111	99.92%
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	Sarana	309	103.69%	640,815,000	640,709,061	99.98%
19	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	Sarana	36	100.00%	58,922,000	58,919,000	99.99%
20	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	Sarana	1023	102.81%	1,155,124,000	1,151,499,836	99.69%
21	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	1	100.00%	3,881,659,000	3,877,256,436	99.89%
22	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	Layanan	1	100.00%	1,098,000	933,300	85.00%
23	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100.00%	17,367,046,000	17,357,957,553	99.95%

www.bandung.pom.go.id

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
TOTAL						37.650.601.000	37.506.843.954	99.62%

Pada Tahun 2025, BBPOM di Bandung melaksanakan 23 (dua puluh tiga) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Tidak Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung (TE=0.13) karena adanya beberapa angagaran blokir sehingga terdapat penyesuaian capaian output. Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada TA 2025 terlaksana secara TIDAK EFISIEN (TE=-0.16)

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

www.bandung.pom.go.id

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
4.2 Saran

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 mengukur pencapaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025-2029. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2025, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 5 (lima) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, 2 (dua) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, dan 1 (satu) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
   - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 106.31% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jawa Barat serta keberhasilan Balai Besar POM di dalam menguatkan lab pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT..
   - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua sebesar 100.25% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas Pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di Jawa Barat.
   - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketiga sebesar 100.85% dengan kriteria sangat baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas KIE di Jawa Barat.
   - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 104.01% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan berhasilnya upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan di Jawa Barat.
   - ❖ Capaian kinerja sasaran strategis kelima sebesar 116.42% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung

www.bandung.pom.go.id

dalam melaksanakan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di Jawa Barat.

- ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan keenam sebesar 100,74% dengan kriteria Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif.
- ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 104.68% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam memberikan layanan publik UPT yang prima.
- ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan sebesar 99.49% dengan Kriteria Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan unit organisasi yang optimal.

3. Pada Tahun 2025, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) didapatkan hasil EFISIEN sebesar (TE = 0.05).

4.2 SARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam periode Renstra 2025 - 2029. Capaian Kinerja pada Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penetapan dan pencapaian target Renstra sampai dengan Tahun 2029, serta pencapaian Sasaran Kegiatan dan Tujuan BBPOM di Bandung.

Dari capaian sasaran kegiatan Tahun 2025 ini, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh BBPOM di Bandung, dalam meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam periode selanjutnya, yaitu :

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
2. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka implementasi instruksi presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, melalui peningkatan kualitas reviu perencanaan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berbasis kinerja.
3. Peningkatan dan penguatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, baik itu

www.bandung.pom.go.id

premarket, post market, penyidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang lebih efektif dan efisien.

4. Meningkatkan implementasi manajemen risiko menjadi *Risk Define*, dimana seluruh risiko dalam pencapaian kinerja sudah dapat diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja BBPOM di Bandung.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.

www.bandung.pom.go.id

BADAN POM

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan TA 2025
2. Perjanjian Kinerja TA 2025
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025
4. Laporan Evaluasi Internal TA 2025
5. Capaian Output TA 2025

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171
Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 0224230546
Email : bpom_bandung@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOMOR HK.02.02.8A.09.24.605 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di BAndung pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2025.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG



I MADE BAGUS GERAMETTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOMOR HK.02.02.8A.09.24.605 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26%
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 %
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,7
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,5
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	6 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85 %
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,50
		Nilai AKIP UPT BPOM	83,85
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,75
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

I MADE BAGUS GERAMETTA

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: I MADE BAGUS GERAMETTA
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
I MADE BAGUS GERAMETTA	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDUNG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85 persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.68 persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80 persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7 nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.26 persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57 persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94 nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	17 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	6 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.45 persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	72 persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.5 nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.1 nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 66,709,935,000 (Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	46,778,823,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19,931,112,000

Bandung, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

I MADE BAGUS GERAMETTA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	1,491,483,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	99,200,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	399,859,200
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	45,841,800
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	169,467,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	78,401,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	315,073,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	315,073,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	93	93	93	93	93	582,583,500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	453,528,500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	84.68	84.68	84.68	84.68	84.68	25,593,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	1,053,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	25,686,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			79	79	79	80	80	80	81	81	81	81.7	7,912,527,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												5.26	7,400,000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	4.8	11	19	32	44	44	44	57	57	57	57	58,922,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	22,875,451,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	10	20	25	40	40	50	75	75	100	100	17	586,716,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	10	15	25	35	35	60	65	75	80	100	6	916,015,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	10	20	25	60	80	100	100	100	100	100	1	152,100,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	15	40	50	60	70	72	73	74	75	16.45	109,594,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	14	16	17	55.88	57.65	58	59	60	62	64	66	72	866,166,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	283,012,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	829,727,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.5	24,886,694,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.1	2,981,328,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	72,400,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	169,040,000
														Total	66,709,935,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Bandung, 29 August 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

I MADE BAGUS GERAMETTA

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat Kantor Balai Besar POM di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt
   NIP : 19690718 199603 1 001
   Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

2. Nama : Dwi Kurniasari, S.Si., Apt
   NIP : 19810108 200604 2 004
   Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar POM di Bandung

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai Besar POM di Bandung periode Oktober sampai dengan bulan Desember 2025 dengan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output (RO) Triwulan IV

No	Program/ Kegiatan/RO	Volume				Anggaran		
		Target 2025	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	**3165.AEA.001** – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	14	100.00%	41,720,000	40,577,176	97.26%
2	**3165.BAH.001** Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1750	Keputusan	1924	109.94%	829,727,000	825,199,474	99.45%
3	**3165.BDC.001** KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	Orang	23788	30.86%	7,292,425,000	7,275,888,209	99.77%
4	**3165.BKB.001** Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	1	100.00%	439,467,000	438,937,676	99.88%
5	**3165.BMB.001** Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	19	70.37%	16,177,000	16,134,000	99.73%
6	**3165.CAB.002** Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%
7	**3165.CAN.001** Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	Unit	0	0.00%	0	0	0.00%
8	**3165.CBV.001** Prasarana Bidang Kesehatan	4	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%
9	**3165.PDD.001** Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	1	100.00%	2,646,701,000	2,645,350,230	99.95%

No	Program/ Kegiatan/RO	Volume				Anggaran		
		Target 2025	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
10	**3165.QCD.U02** Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	Perkara	7	100.00%	866,166,000	769,608,393	88.85%
11	**3165.QDB.001** Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	17	100.00%	88,624,000	88,340,375	99.68%
12	**3165.QDB.002** Desa Pangan Aman	6	Lembaga	6	100.00%	125,757,000	125,542,045	99.83%
13	**3165.QDB.003** Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	Lembaga	1	100.00%	24,673,000	24,666,457	99.97%
14	**3165.QDC.001** Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	Orang	90	100.00%	12,960,000	12,648,271	97.59%
15	**3165.QDG.001** UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	UMKM	26	100.00%	46,436,000	44,616,575	96.08%
16	**3165.QIA.001** Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	745	100.00%	622,568,000	620,783,776	99.71%
17	**3165.QIA.002** Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	Sampel	1767	100.06%	1,492,536,000	1,491,276,111	99.92%
18	**3165.QIC.001** Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	Sarana	309	103.69%	640,815,000	640,709,061	99.98%
19	**3165.QIC.003** Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	Sarana	36	100.00%	58,922,000	58,919,000	99.99%
20	**3165.QIC.004** Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	Sarana	1023	102.81%	1,155,124,000	1,151,499,836	99.69%
21	**3165.RAB.001** Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	1	100.00%	3,881,659,000	3,877,256,436	99.89%
22	**6384.EBA.956** Layanan BMN	1	Layanan	1	100.00%	1,098,000	933,300	85.00%
23	**6384.EBA.994** Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100.00%	17,367,046,000	17,357,957,553	99.95%
	TOTAL					**37,650,601,000**	**37,506,843,954**	**99.62%**

2. Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan IV

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW IV	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	g=(f/ex100)	h	i	j=(h/ix100)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	98.51	111.00	1,491,483,000	1,490,223,111	99.92%
		2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27.78	106.84	12,960,000	12,648,271	97.59%
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	95.96	112.90	403,733,200	402,573,454	99.71%
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	45,841,800	45,840,761	100.00%
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99.67	117.25	171,553,000	170,929,561	99.64%
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	84.76	99.72	84,372,800	70,153,264	83.15%
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	96.61	108.86	315,073,500	315,025,578	99.98%
		8 Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92.73	115.91	315,073,500	315,025,578	99.98%
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	96.07	103.31	575,841,500	587,918,280	102.10%
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97.80	115.06	441,424,500	440,465,843	99.78%
		11 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.68	97.54	115.18	22,635,000	22,634,571	100.00%
		12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	91.67	114.58	1,053,000	1,053,000	100.00%
		13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100.26	100.26	41,518,200	40,985,785	98.72%
		14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	87.20	106.73	6,528,360,000	6,522,606,666	99.91%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW IV	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	g=(f/ex100)	h	i	j=(h/ix100)
		15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.26	5.26	100.00	18,641,000	18,631,900	99.95%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57.14	100.25	58,922,000	58,919,000	99.99%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	89.89	103.39	7,308,602,000	7,292,022,209	99.77%
		18 Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	17.00	100.00	88,624,000	88,340,375	99.68%
		19 Jumlah desa pangan aman	6	6.00	100.00	125,757,000	125,542,045	99.83%
		20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1.00	100.00	24,673,000	24,666,457	99.97%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16.45	17.11	104.01	46,436,000	44,616,575	96.08%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	83.82	116.42	866,166,000	769,608,393	88.85%
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23 Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan olehBBPOM di Bandung	90	90.67	100.74	41,720,000	40,577,176	97.26%
8	Layanan Publik UPT yang Prima	24 Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.92	104.68	829,727,000	825,199,474	99.45%
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25 Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.5	91.92	100.46	17,663,704,000	17,654,357,055	99.95%
		26 Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.1	81.35	97.89	4,452,000	4,193,000	94.18%
		27 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	5	5.00	17,517,000	17,350,974	99.05%
		28 Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	2.938	99.59	104,737,000	104,735,600	100.00%
	TOTAL					**37,650,601,000**	**37,506,843,954**	**99.62%**

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Kepala Bagian Tata Usaha

Dwi Kurniasari, S.Si., Apt,

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Reallisasi anggaran dan capaian output dibandingkan target dan nilai efisiensi sampai dengan Triwulan IV 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	KET
a	b	c		d	e = (d/c x 100)	f	g	h = (g/f x 100)	i = (e/h)	j = i-1	
1	**3165.AEA.001** – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	14	100.00%	41,720,000	40,577,176	97.26%	1.03	0.03	EFISIEN
2	**3165.BAH.001** Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1310	Keputusan	1924	109.94%	829,727,000	825,199,474	99.45%	1.11	0.11	EFISIEN
3	**3165.BDC.001** KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	Orang	23788	30.86%	7,292,425,000	7,275,888,209	99.77%	0.31	-0.69	TIDAK EFISIEN
4	**3165.BKB.001** Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	1	100.00%	439,467,000	438,937,676	99.88%	1.00	0.00	EFISIEN
5	**3165.BMB.001** Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	19	70.37%	16,177,000	16,134,000	99.73%	0.71	-0.29	TIDAK EFISIEN
6	**3165.CAB.002** Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	**3165.CAN.001** Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	Unit	0	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	**3165.CBV.001** Prasarana Bidang Kesehatan	4	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	**3165.PDD.001** Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	1	100.00%	2,646,701,000	2,645,350,230	99.95%	1.00	0.00	EFISIEN
10	**3165.QCD.U02** Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	Perkara	7	100.00%	866,166,000	769,608,393	88.85%	1.13	0.13	EFISIEN
11	**3165.QDB.001** Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	17	100.00%	88,624,000	88,340,375	99.68%	1.00	0.00	EFISIEN
12	**3165.QDB.002** Desa Pangan Aman	6	Lembaga	6	100.00%	125,757,000	125,542,045	99.83%	1.00	0.00	EFISIEN
13	**3165.QDB.003** Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	Lembaga	1	100.00%	24,673,000	24,666,457	99.97%	1.00	0.00	EFISIEN
14	**3165.QDC.001** Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	Orang	90	100.00%	12,960,000	12,648,271	97.59%	1.02	0.02	EFISIEN
15	**3165.QDG.001** UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	UMKM	26	100.00%	46,436,000	44,616,575	96.08%	1.04	0.04	EFISIEN
16	**3165.QIA.001** Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	745	100.00%	622,568,000	620,783,776	99.71%	1.00	0.00	EFISIEN

17	**3165.QIA.002** Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	Sampel	1767	100.06%	1,492,536,000	1,491,276,111	99.92%	1.00	0.00	EFISIEN
18	**3165.QIC.001** Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	Sarana	309	103.69%	640,815,000	640,709,061	99.98%	1.04	0.04	EFISIEN
19	**3165.QIC.003** Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	Sarana	36	100.00%	58,922,000	58,919,000	99.99%	1.00	0.00	EFISIEN
20	**3165.QIC.004** Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	Sarana	1023	102.81%	1,155,124,000	1,151,499,836	99.69%	1.03	0.03	EFISIEN
21	**3165.RAB.001** Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	1	100.00%	3,881,659,000	3,877,256,436	99.89%	1.00	0.00	EFISIEN
22	**6384.EBA.956** Layanan BMN	1	Layanan	1	100.00%	1,098,000	933,300	85.00%	1.18	0.18	EFISIEN
23	**6384.EBA.994** Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100.00%	17,367,046,000	17,357,957,553	99.95%	1.00	0.00	EFISIEN
Total				**29777**	**83.38%**	**37,650,601,000**	**37,506,843,954**	**99.62%**	**0.84**	**-0.16**	**TIDAK EFISIEN**

NO	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		Volume				Anggaran				
		Target 2025	Target TW IV	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	CAPAIAN TE
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	88.75	98.51	111.00	1,491,483,000	1,490,223,111	**99.92%**	1.11	0.11	EFISIEN
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	26	27.78	106.84	12,960,000	12,648,271	**97.59%**	1.09	0.09	EFISIEN
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	95.96	112.90	403,733,200	402,573,454	**99.71%**	1.13	0.13	EFISIEN
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	100.00	45,841,800	45,840,761	**100.00%**	1.00	0.00	EFISIEN
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	99.67	117.25	171,553,000	170,929,561	**99.64%**	1.18	0.18	EFISIEN
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	84.76	99.72	84,372,800	70,153,264	**83.15%**	1.20	0.20	EFISIEN

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	88.75	96.61	108.86	315,073,500	315,025,578	**99.98%**	1.09	0.09	EFISIEN
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	92.73	115.91	315,073,500	315,025,578	**99.98%**	1.16	0.16	EFISIEN
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	96.07	103.31	575,841,500	587,918,280	**102.10%**	1.01	0.01	EFISIEN
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	97.80	115.06	441,424,500	440,465,843	**99.78%**	1.15	0.15	EFISIEN
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.68	84.68	97.54	115.18	22,635,000	22,634,571	**100.00%**	1.15	0.15	EFISIEN
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80	91.67	114.58	1,053,000	1,053,000	**100.00%**	1.15	0.15	EFISIEN
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100.26	100.26	41,518,200	40,985,785	**98.72%**	1.02	0.02	EFISIEN
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	81.7	87.20	106.73	6,528,360,000	6,522,606,666	**99.91%**	1.07	0.07	EFISIEN
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.26	5.26	5.26	100.00	18,641,000	18,631,900	**99.95%**	1.00	0.00	EFISIEN
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57	57.14	100.25	58,922,000	58,919,000	**99.99%**	1.00	0.00	EFISIEN
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	86.94	89.89	103.39	7,308,602,000	7,292,022,209	**99.77%**	1.04	0.04	EFISIEN
18	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	17	17.00	100.00	88,624,000	88,340,375	**99.68%**	1.00	0.00	EFISIEN
19	Jumlah desa pangan aman	6	6	6.00	100.00	125,757,000	125,542,045	**99.83%**	1.00	0.00	EFISIEN
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1.00	100.00	24,673,000	24,666,457	**99.97%**	1.00	0.00	EFISIEN

21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16.45	16.45	17.11	104.01	46,436,000	44,616,575	**96.08%**	1.08	0.08	EFISIEN
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	72	83.82	116.42	866,166,000	769,608,393	**88.85%**	1.31	0.31	EFISIEN
23	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan olehBBPOM di Bandung	90	90	90.67	100.74	41,720,000	40,577,176	**97.26%**	1.04	0.04	EFISIEN
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.7	4.92	104.68	829,727,000	825,199,474	**99.45%**	1.05	0.05	EFISIEN
25	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.5	91.5	91.92	100.46	17,663,704,000	17,654,357,055	**99.95%**	1.01	0.01	EFISIEN
26	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.1	83.1	81.35	97.89	4,452,000	4,193,000	**94.18%**	1.04	0.04	EFISIEN
27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	5	5	5.00	17,517,000	17,350,974	**99.05%**	0.05	-0.95	TIDAK EFISIEN
28	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	2.95	2.94	99.59	104,737,000	104,735,600	**100.00%**	1.00	0.00	TIDAK EFISIEN
	TOTAL			**1,820**	**107.56%**	**37,650,601,000**	**37,506,843,954**	**99.62%**	**1.08**	**0.08**	**EFISIEN**

A. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

No	Program?kegiatan/Output	Target Tahunan	B10			B11			B12			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B10		B11		B12	
1	**3165.AEA.001** – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	10	10	100	11	11	100	14	14	100.00%	41.720.000	26.280.946	62,99%	8.013.676	19,21%	40577176	97,26%
2	**3165.BAH.001** Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1310	1310	1573	120,0763359	1740	1749	100,517241	1750	1924	109.94%	829.727.000	380.005.129	45,80%	314.798.514	37,94%	825199474	99,45%
3	**3165.BDC.001** KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	21663	20443	94,36827771	23585	23788	100,860717	75335	23788	30.86%	7.292.425.000	6.190.680.412	84,89%	4.496.945.086	61,67%	7275888209	99,77%
4	**3165.BKB.001** Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	83	0	0	91	1	1	100.00%	439.467.000	255.186.898	58,07%	118.655.600	27,00%	438937676	99,88%
5	**3165.BMB.001** Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	19	14	73,68421053	19	17	89,4736842	27	19	70.37%	16.177.000	11.750.400	72,64%	2.040.000	12,61%	16134000	99,73%
6	**3165.CAB.002** Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00%	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7	**3165.CAN.001** Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00%	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!
8	**3165.CBV.001** Prasarana Bidang Kesehatan	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00%	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!
9	**3165.PDD.001** Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	88,57	0	0	99,33	1	1	100.00%	2.646.701.000	1.604.295.633	60,61%	786.919.918	29,73%	2645350230	99,95%
10	**3165.QCD.U02** Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	5	7	140	6	7	116,666667	7	7	100.00%	866.166.000	577.569.527	66,68%	342.903.503	39,59%	769608393	88,85%
11	**3165.QDB.001** Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	15	17	75	17	17	100	17	17	100.00%	88.624.000	47.440.175	53,53%	43.947.575	49,59%	88340375	99,68%
12	**3165.QDB.002** Desa Pangan Aman	6	6	6	52,25	6	6	100	6	6	100.00%	125.757.000	115.034.245	91,47%	54.723.440	43,52%	125542045	99,83%
13	**3165.QDB.003** Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100.00%	24.673.000	17.679.965	71,66%	12.530.000	50,78%	24666457	99,97%
14	**3165.QDC.001** Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	90	90	100	90	90	100	90	90	100.00%	12.960.000	7.190.271	55,48%	4.188.571	32,32%	12648271	97,59%
15	**3165.QDG.001** UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	22	23	104,5454545	23	24	104,347826	26	26	100.00%	46.436.000	30.314.320	65,28%	27.844.320	59,96%	44616575	96,08%
16	**3165.QIA.001** Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	661	683	103,3282905	727	725	99,7248968	745	745	100.00%	622.568.000	550.189.180	88,37%	416.269.043	66,86%	620783776	99,71%
17	**3165.QIA.002** Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	1546	1569	101,4877102	1725	1728	100,173913	1766	1767	100.06%	1.492.536.000	1.132.739.357	75,89%	711.479.452	47,67%	1491276111	99,92%
18	**3165.QIC.001** Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	257	282	109,7276265	283	302	106,713781	298	309	103.69%	640.815.000	485.755.260	75,80%	312.634.259	48,79%	640709061	99,98%
19	**3165.QIC.003** Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	36	36	100	36	36	100	36	36	100.00%	58.922.000	49.037.000	83,22%	37.325.000	63,35%	58919000	99,99%
20	**3165.QIC.004** Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	846	880	104,0189125	930	970	104,301075	995	1023	102.81%	1.155.124.000	889.375.871	76,99%	622.025.621	53,85%	1151499836	99,69%
21	**3165.RAB.001** Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	1	#DIV/0!	1	1	100	1	1	100.00%	3.881.659.000	3.711.311.436	95,61%	3.711.311.436	95,61%	3877256436	99,89%
22	**6384.EBA.956** Layanan BMN	1	0	0	83,33	0	0	91,66	1	1	100.00%	1.098.000	9.333	0,85%	-	0,00%	9333	0,85%
23	**6384.EBA.994** Layanan Perkantoran	1	0	0	83,33	0	0	91,66	1	1	100.00%	17.367.046.000	14.325.304.293	82,49%	11.585.979.821	66,71%	17357957553	99,95%

B. Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	B10			B11			B12			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B10		B11		B12	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	88.75	98.64	108.42	86.25	98.64	111.15	88.75	98.51	111.00	1.491.483.000	1.132.739.357	75,95%	1.371.508.524	91,96%	1.490.223.111	99,92%
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-	-	-	-	-	-	26	27.78	106.84	12.960.000	7.190.271	55,48%	9.155.271	70,64%	12.648.271	97,59%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	94.80	112.11	85.00	94.80	111.53	85	95.96	112.90	403.733.200	356.686.967	88,35%	378.617.097	93,78%	402.573.454	99,71%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	45.841.800	41.969.658	91,55%	43.779.424	95,50%	45.840.761	100,00%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	99.67	117.25	85.00	99.67	117.25	85	99.67	117.25	171.553.000	150.092.556	87,49%	160.091.321	93,32%	170.929.561	99,64%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.00	85.00	80.61	98.41	85.00	80.61	94.84	85	84.76	99.72	84.372.800	39.777.913	47,15%	48.705.929	57,73%	70.153.264	83,15%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	88.75	95.92	106.44	88.00%	95.92	108.07	88.75	96.61	108.86	315.073.500	241.805.702	76,75%	299.633.800	95,10%	315.025.578	99,98%
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	93.05	115.10	80.00	93.05	116.31	80	92.73	115.91	315.073.500	241.805.702	76,75%	299.633.800	95,10%	315.025.578	99,98%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	93.00	97.60	104.28	91.75	97.60	104.95	93	96.07	103.31	575.841.500	470.300.083	81,67%	525.380.183	91,24%	587.918.280	102,10%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	97.59	117.34	85.00	97.59	114.81	85	97.80	115.06	441.424.500	340.477.626	77,13%	383.869.726	86,96%	440.465.843	99,78%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	84.68	97.78	119.21	83.48	97.78	115.47	84.68	97.54	115.18	22.635.000	8.369.500	36,98%	21.314.571	94,17%	22.634.571	100,00%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	80.00	88.53	0	80	88.53	110.66	80	91.67	114.58	1.053.000	-	0,00%	-	0,00%	1.053.000	100,00%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	-	-	-	-	100	100.26	100.26	41.518.200	32.594.606		36.153.943	87,08%	40.985.785	98,72%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.70	81.00	85.40	103.75	80	85.40	105.43	81.7	87.20	106.73	6.528.360.000	5.315.607.069	81,42%	5.626.638.117	86,19%	6.522.606.666	99,91%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.26	-	-	-	-	-	-	5.26	5.26	100.00	18.641.000	17.239.600		17.239.600		18.631.900	99,95%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	57.00	57.14	101.01	32	57.14	100.25	57	57.14	100.25	58.922.000	49.037.000	83,22%	57.525.000	97,63%	58.919.000	99,99%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	B10			B11			B12			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B10		B11		B12	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	86.94	89.70	100.09	86.94	89.70	100.56	86.94	89.89	103.39	7.308.602.000	6.202.430.812	84,86%	6.910.667.528	94,56%	7.292.022.209	0.12%
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	100.00	100.00	150.00	75.00	100.00	100.00	17	17.00	100.00	88.624.000	47.440.175	53,53%	84.580.175	95,44%	88.340.375	0.00%
		Jumlah desa pangan aman	6	80.00	100.00	87.50	65.00	100.00	100.00	6	6.00	100.00	125.757.000	115.034.245	91,47%	123.434.245	98,15%	125.542.045	0.00%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1	1.00	100.00	24.673.000	17.679.965	71,66%	21.692.965	87,92%	24.666.457	0.00%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16.45	74.00	89.23	100.95	72.00	89.23	100.46	16.45	17.11	104.01	46.436.000	30.314.320	65,28%	31.917.376	68,73%	44.616.575	96,08%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72.00	64.00	72.65	102.19	60.00	72.65	105.88	72	83.82	116.42	866.166.000	577.569.527	66,68%	689.106.393	79,56%	769.608.393	88,85%
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	90	90.67	100.74	41.720.000	26.280.946	62,99%	29.163.616	69,90%	40.577.176	97,26%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	-	-	-	-	4.92	104.68	4.7	4.92	104.68	829.727.000	380.005.129	45,80%	421.472.395	50,80%	825.199.474	99,45%
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.50	-	-	-	-	91.92	100.46	91.5	91.92	100.46	17.663.704.000	14.491.675.817	82,04%	15.945.908.419	90,27%	17.654.357.055	99,95%
		Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.1	-	-	-	-	-	-	83.1	81.35	97.89	4.452.000	-	0,00%	-	0,00%	4.193.000	94,18%
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	-	-	-	-	-	-	5	5	5.00	17.517.000	17.350.974	99,05%	17.350.974	99,05%	17.350.974	99,05%
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	-	-	-	-	-	-	2.95	2.94	99.59	104.737.000	56.598.100	54,04%	94.998.100	90,70%	104.735.600	100,00%

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

No.	Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Status Konfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	AEA	001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	283,012,000	40,577,176	P	14	kegiatan	14	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	14	14	100
2	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	BAH	001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	829,727,000	824,771,166	N	1750	dokumen	1924	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1750	1750	100
3	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	BDC	001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	22,773,723,000	7,271,838,209	P	77085	Orang	23788	31.58	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	77085	77085	96.64
4	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	BKB	001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	3,686,000,000	438,700,676	P	1	laporan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
5	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	BMB	001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	101,728,000	16,134,000	P	27	kegiatan	19	70.35	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	27	27	100
6	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	CAB	001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	50,000,000	0	Y	1	Unit	0	0	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	1	0
7	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	CAN	001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,000,000	0	Y	12	Unit	0	0	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	12	12	0
8	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	CBV	001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	4,342,350,000	0	Y	4	Unit	0	0	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	4	4	0

tanggal cetak : 05-01-26 07:05:19 oleh : 432753

9	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	PDD	001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2,646,701,000	2,644,853,230	N	1	Lembaga	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	2	Maximize	Stabilized	1	1	100
10	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QCD	U02	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDUNG	866,166,000	769,608,393	N	7	Perkara	7	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	7	7	100
11	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QDB	001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	586,716,000	88,340,375	P	17	Lembaga	17	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	17	17	100
12	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QDB	002	Desa Pangan Aman	916,015,000	125,542,045	P	6	Lembaga	6	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	6	6	100
13	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QDB	003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	152,100,000	24,666,457	P	1	Lembaga	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
14	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QDC	001	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	99,200,000	12,648,271	P	90	Orang	90	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	90	90	100
15	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QDG	001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	109,594,000	44,376,299	P	26	UMKM	26	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	26	26	100
16	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QIA	001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	622,568,000	620,783,776	N	745	Produk	745	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	745	745	100
17	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QIA	002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1,492,536,000	1,491,275,911	N	1766	Produk	1767	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1766	1766	100

18	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QIC	001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	640,815,000	640,002,061	N	298	Lembaga	309	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	298	298	100
19	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QIC	003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	58,922,000	58,740,000	N	36	Lembaga	36	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	36	36	100
20	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	QIC	004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,155,124,000	1,151,394,720	N	995	Lembaga	1023	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	995	995	100
21	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	DR	3165	RAB	001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5,265,826,000	3,877,256,436	P	1	Paket	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	1	100
22	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	WA	6384	EBA	956	Layanan BMN	8,000,000	933,300	P	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
23	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	12	WA	6384	EBA	994	Layanan Perkantoran	19,923,112,000	17,350,802,053	P	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
Total Nilai																								1,996.64	
Jumlah Output																								20	